

**PROSIDING**

**KONFERENSI NASIONAL GAMA INSTITUTE**

**Local Solution Global Impact:  
Indonesia's Path to Sustainable Development Goals**



**PROSIDING**  
**KONFERENSI NASIONAL GAMA INSTITUTE**

**Local Solution Global Impact:  
Indonesia's Path to Sustainable Development Goals**

**Editor:**

Siti Roisadul Nisok, S.Ag., M.Phil.

Rahmiyati, S.Psi., M.A.

Yogyakarta, 28 September 2024



GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS

**Prosiding Konferensi Nasional Gama Institute  
Local Solution Global Impact: Indonesia's Path to Sustainable Development Goals  
Yogyakarta, 28 September 2024**

**Penulis:**

Achmad Rifa'i  
Putri Uzdah Wulandari  
Esti Rahayu  
Arista Damayanti  
Yuyut Prayuti  
Happy Yulia Anggraeni  
Yeni Nuraeni,  
L. Alfies Sihombing  
Erna Listiawati  
Paskalis Krisna Puspadewa  
Yun Prihantina Mulyani  
Anindya Laksmi Larasati  
Eliya Nur Safitri  
Diniyarti  
Dini Rachmadhani

**Editor:**

Siti Roisadul Nisok, S.Ag., M.Phil.  
Rahmiyati, S.Psi., M.A.

**Reviewer:**

Ir. Mukhammad Rizka Fahmi Amrozi, S.T., M.Sc., Ph.D.  
Dr. Muhamad Sulhan, SIP., M.Si.  
Dr. Iswari Nur Hidayati, S.Si., M.Sc.  
Virga Dwi Efendi, S.H., LL.M.  
Lina Agustina Pujiwati, SST., M.Ec.Dev.  
Rahmat Siregar, S.Pd.

**Steering Committee:**

Anggi Budiono Putro, S.H.  
Theresia Yohana Manurung, S.H.  
Zuhriyyah Hasna Nur Fatima, S.P.

**Susunan Panitia:**

**Penasihat :**

Direktorat Kemahasiswaan UGM

**Pembina :**

Ir. Muhammad Waziz Wildan, M.Sc, Ph.D.  
Dr. Widyanto Dwi Nugroho, S.Hut., M.Agr.

**Penanggung Jawab :**

Apt. Muhammad Erick Mutaqin, S.Farm. M.Pharm.

**Ketua Pelaksana :**

Siti Nurfajrin, S.P.W.K., M.Sc.

**Sekretaris :**

Octavia Novita Sari, S.Hub.Int.

**Bendahara :**

Adelia Maharani Bramadita, S.T.P.

**Divisi Acara :**

Koor. Seminar - Diniyarti, S.P.W.K.  
Koor. Konferensi - Rahmiyati, S.Psi., M.A.  
Koor. Edu Fair - Ruth Ade Putri, S.H.

**Divisi Hubungan Masyarakat – Liaison Officer :**

Romario Deni Manoppo S.I.Kom.

**Divisi Sponsorship – Kemitraan :**

Trisnanda Fredinabila Ramadhani, S.Pt.

**Divisi Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi :**

Ihsan Nurijal, S.Si.

**Divisi Konsumsi :**

Olgha Caeshar Fiorentya, S.Pd.

**Divisi Kesekretariatan :**

Chintya Koestri Ayuningrum, S.Sos.

**Divisi Perlengkapan :**

John Benyamin M. Paulus, S.H.

**Desain sampul:**

Siti Nurfajrin

**Tata letak isi:**

Dwi

**Penerbit:**

Gadjah Mada University Press  
Anggota IKAPI dan APPTI

**Ukuran** : 15,5 × 23 cm; x + 98 hlm

**ISBN** : 978-623-359-715-9

**Redaksi:**

Jl. Sendok, Karanggayam CT VIII Caturtunggal  
Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281  
Telp.: (0274) 561037, Mobile/WA: 0822 6515 8106  
ugmpress.ugm.ac.id | gmupress@ugm.ac.id

**Cetakan pertama:****Hak penerbitan © 2026 Gadjah Mada University Press**

*Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun, baik cetak, photoprint, microfilm, dan sebagainya.*



## KATA PENGANTAR

Seiring dengan semakin kompleksnya tantangan global yang dihadapi umat manusia, upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) menjadi sangat penting. Di tengah perubahan iklim, ketimpangan sosial-ekonomi, dan tantangan politik, solusi lokal kini semakin diakui sebagai elemen penting dalam mencapai dampak global yang positif. Indonesia, dengan kekayaan budaya, sumber daya alam, dan keragaman sosialnya, memiliki potensi besar untuk menjadi pionir dalam mengintegrasikan kearifan lokal dalam pencapaian SDGs.

Dalam rangka mendukung peran serta Indonesia dalam upaya global ini, Gama Institute dengan bangga menyelenggarakan prosiding ini yang mengangkat tema “*Local Solution Global Impact: Indonesia’s Path to Sustainable Development Goals*”. Tema ini mencerminkan keyakinan kami bahwa setiap solusi lokal yang diimplementasikan dengan baik, tidak hanya akan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun global.

Prosiding ini memuat berbagai hasil penelitian, kajian, dan inovasi dari peneliti, akademisi, dan praktisi yang fokus pada solusi berbasis lokal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Topik yang diangkat mencakup berbagai aspek penting, seperti ketahanan pangan melalui kearifan lokal, investasi untuk pembangunan inklusif, perlindungan hak konsumen di ruang maya, analisis media terkait kendaraan listrik, pemberdayaan ekonomi melalui industri kerajinan lokal, serta pemanfaatan data spasial dalam perencanaan penggunaan lahan yang efisien dan berkelanjutan.

Prosiding ini menjadi bukti komitmen kita untuk mendukung Indonesia dalam mencapai SDGs melalui berbagai solusi inovatif yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Semoga hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang terdapat

dalam prosiding ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam pembangunan berkelanjutan, serta memberikan inspirasi bagi penelitian dan praktik lebih lanjut.

Yogyakarta, 8 November 2025.  
Siti Nurfajrin, S.P.W.K., M.Sc.  
Ketua Pelaksana Gama Institute

## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR ~ vii**

**DAFTAR ISI ~ ix**

**MEMBANGUN KETAHANAN PANGAN MELALUI SUBAK:  
KEARIFAN LOKAL DALAM PERTANIAN BERKELANJUTAN  
DI PULAU BALI ~ 1**

Achmad Rifa'i

**TREN DAN DINAMIKA INVESTASI DALAM PEMBANGUNAN  
IBU KOTA NUSANTARA ~ 15**

Putri Uzdah Wulandari, Esti Rahayu, Arista Damayanti

***ACCES TO JUSTICE* KONSUMEN DI RUANG MAYA MELALUI  
PENATAAN PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DAN LITERASI  
DIGITAL ~ 37**

Yuyut Prayuti, Happy Yulia Anggraeni, Yeni Nuraeni,  
L. Alfies Sihombing, Erna Listiawati

**IDENTIFIKASI DISKUSI PUBLIK DI MEDIA MASSA TERKAIT  
KENDARAAN LISTRIK DI INDONESIA MENGGUNAKAN  
*LATENT DIRICHLET ALLOCATION* ~ 51**

Paskalis Krisna Puspadewa, Yun Prihantina Mulyani

**KAJIAN *TIKARWE* (TIKAR ROTAN) SEBAGAI *HOME*  
*INDUSTRY* DI DUSUN KOPO, DESA MUNGKIN, KECAMATAN  
ORONG TELU, KABUPATEN SUMBAWA ~ 63**

Anindya Laksmi Larasati, Eliya Nur Safitri

**PENGGUNAAN DATA SPASIAL UNTUK PENILAIAN  
KESESUAIAN LAHAN PERTANIAN DAN PERMUKIMAN DI  
KABUPATEN BANTUL ~ 83**

Diniyarti, Dini Rachmadhani

# **Membangun Ketahanan Pangan Melalui Subak: Kearifan Lokal dalam Pertanian Berkelanjutan di Pulau Bali**

**Achmad Rifa'i**

Magister Manajemen Agribisnis, Departemen Sosial Ekonomi Pertanian,  
Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada

achmadrifai@mail.ugm.ac.id

## **Abstrak**

Pembangunan ketahanan pangan di Pulau Bali dapat dilakukan melalui subak yang merupakan upaya strategis dalam mengintegrasikan kearifan lokal dalam sistem pertanian yang berkelanjutan. Subak adalah lembaga tradisional di Pulau Bali sebagai pengelola irigasi dan pertanian yang mempunyai peran penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan di tengah tantangan modernisasi dan alih fungsi lahan. Pertanian berkelanjutan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara melalui pengembangan ekonomi, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Beberapa tujuan lain yang harus difokuskan dalam pertanian berkelanjutan antara lain adalah produktivitas jangka panjang, jaminan stabilitas lingkungan (aman, bersih, seimbang, dan terbarukan), dan kebebasan serta pemberdayaan petani. Subak adalah organisasi tradisional di bidang tata guna air dan tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat Bali yang bersifat sosio-agraris, religius, dan ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang. Keberlanjutan pertanian menjadikan subak mempunyai peran ganda sebagai lembaga pengelola irigasi sekaligus pengelola unit usaha ekonomi dan bisnis di tingkat usahatani. Keberlanjutan subak harus dilaksanakan dengan menerapkan menerapkan agribisnis dari hulu ke hilir dalam artian mempunyai prinsip tanam – petik – olah – jual. Beberapa jenis usaha yang dapat dilaksanakan oleh subak misalnya adalah usaha lumbung padi,

usaha penggilingan padi, penyediaan alat-alat mesin pertanian, dan usaha pengadaan sarana produksi serta lainnya. Terdapat empat submodal pada model pengelolaan subak yaitu modal sosial, modal lingkungan, dan modal ekonomi serta modal budaya. Pengembangan subak di Pulau Bali tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga fokus kepada pelestarian budaya dan lingkungan. Hal ini menjadikan subak sebagai model pertanian berkelanjutan yang mampu menunjang ketahanan pangan sehingga relevan untuk diterapkan di berbagai daerah lain.

*Kata Kunci: Subak, Kearifan Lokal, Pertanian Berkelanjutan, Ketahanan Pangan, Usaha Tani*

## **Pendahuluan**

Ketahanan pangan adalah isu utama dalam sektor pertanian yang selalu digaungkan selama bertahun-tahun. Ketahanan pangan seharusnya menjadi prioritas utama dalam upaya pembangunan karena pangan adalah kebutuhan dasar bagi manusia sehingga sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Saliem (2002) menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi sehingga mencakup pada tingkat rumah tangga dan tingkat nasional. Ketahanan pangan merupakan topik permasalahan yang harus diselesaikan baik secara makro maupun mikro dan di pusat ataupun daerah.

Setiap daerah di Indonesia selalu mempunyai keunikan budaya tersendiri yang berbeda dengan daerah lainnya, salah satunya adalah Bali. Pulau Bali mempunyai julukan sebagai pulau seribu pura yang mempunyai potensi wisata yang luar biasa. Sektor wisata adalah sektor penyumbang terbesar dalam PDRB Provinsi Bali tahun 2023 dengan sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar kedua. Sektor pertanian menyumbang PDRB Provinsi Bali sebesar 14%, sedangkan sektor pariwisata yang berupa penyediaan akomodasi dan makan minum menyumbang sebesar 20%.

Subak adalah sistem pengairan terintegrasi yang terkenal dalam pertanian di Bali, bahkan pada tahun 2012 sistem subak di Bali telah diakui sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO. Windia (2015) subak mempunyai konsep yang berkaitan dengan keharmonisan antara manusia dengan Sang Pencipta (*parhyangan*), harmoni antara manusia dengan sesamanya (*pawongan*), dan harmoni antara manusia dengan lingkungan (*palemahan*). Ketiga konsep tersebut dinamakan dengan *Tri Hita Karana* (THK) yang diambil dari kata “*Tri*” artinya tiga, “*Hita*” artinya tiga, dan

“*Hita*” artinya kebahagiaan atau kesejahteraan serta “*Karana*” yang artinya penyebab. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Tri Hita Karana* bermakna “Tiga poin mengarah ke menciptakan kepuasan dan juga kesejahteraan”.

Menurut Geria, dkk (2019) peradaban subak di Bali tidak hanya pada aspek budaya, melainkan juga terkait dengan aspek sosial. Ada tiga komponen dasar sistem sosial budaya, yaitu super struktur, struktur sosial, dan infrastruktur material. Aspek super struktur meliputi cara yang telah terpolakan sehingga dengan cara tersebut masyarakat berpikir untuk melakukan konseptualisasi, menilai dan merasa sebagai lawan kata dari apa yang mereka lakukan dalam dunia nyata. Super struktur mencakup beberapa hal sub komponen yaitu superstruktur umum, agama, ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastaan.

Aspek struktur sosial merujuk pada pola perilaku aktual, sebagai lawan dari kesan atau konsepsi mental yang dimiliki orang tentang pola tersebut. Struktur sosial mempunyai enam sub komponen, yaitu stratifikasi sosial, stratifikasi rasial dan etnik, kepolitikan, pembagian kerja secara seksual dan ketidaksamaan secara seksual, keluarga dan kekerabatan, serta pendidikan. Aspek infrastruktur material berisi bahan baku dan bentuk sosial yang berkaitan dengan upaya manusia mempertahankan hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya. Infrastruktur material terdiri atas empat sub komponen, yaitu teknologi, ekonomi, ekologi, dan demografi.

Subak sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Bali yang terbentuk karena adanya kepentingan dari sekelompok petani akan kebutuhan air pengairan untuk lahan pertanian dari sumber air tertentu. Pemecahan masalah dilakukan dengan bersama secara gotong royong dan mufakat. Budaya subak adalah sistem tata kelola irigasi tradisional yang merupakan pilar kebudayaan masyarakat Bali yang mulai menghadapi masalah. Permasalahan yang muncul adalah alam yang mulai terdegradasi sehingga berpotensi melemahkan harmonisasi antara manusia dengan lingkungan. Sejumlah subak sudah mulai terdegradasi akibat konversi lahan, alih profesi, dan ekonomi yang lemah serta generasi muda yang tidak tertarik untuk melanjutkan keberlangsungan subak. Permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait permasalahan ekonomi mengakibatkan pengalih fungsian lahan pada sektor yang lebih mudah mendatangkan keuntungan secara ekonomis.

Sedana (2013) dalam studinya menyatakan bahwa yang menjadi penyebab berkurang bahkan musnahnya beberapa subak adalah hilangnya satu atau lebih unsur penciri THK dalam sistem subak. Unsur-unsur yang

dimaksud adalah hilangnya sistem fisik, seperti lahan sawah, tata tanam, sarana, dan prasarana jaringan irigasi. Alih fungsi lahan yang semakin besar setiap tahunnya dapat mengancam keberlanjutan subak karena berhubungan dengan tanah yang merupakan tempat bagi masyarakat yang menjalankan kewajiban pemeliharaan dan pelaksanaan upacara pada subak. Luas sawah di Bali telah terkonversi sekitar 7501.000 hektar per tahun. Hal tersebut didukung dengan data dari BPS yang menyebutkan bahwa lahan sawah yang ada di Provinsi Bali pada tahun 2021 hanya tersisa 74.657 hektar. Fenomena tersebut mengakibatkan hilangnya beberapa subak dikarenakan sudah tidak memiliki lahan sawah.

Sriartha dan Windia (2015) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari masih lemahnya sistem regulasi yang ada, fakta alih fungsi lahan sawah di lapangan yang terus meningkat, dan adanya penilaian negatif dari masyarakat. Subak harus diupayakan memiliki posisi yang tinggi terhadap kebijakan pemerintah daerah karena Bali merupakan daerah tujuan wisata budaya. Agar subak akan selalu ada dan lestari dari zaman ke zaman. Karena subak sebagai wisata rakyat harus memberikan peran dan peluang bagi masyarakat dan ketidakberadaan subak akan berpengaruh terhadap segala sektor yang ada di Bali. Selain itu, akan berpengaruh pula dengan kondisi lingkungan, kebudayaan, ekonomi, politik, serta kearifan lokal yang ada.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kerja subak, memahami konsep pertanian berkelanjutan, dan mengetahui peran subak dalam menunjang ketahanan pangan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Subak**

Subak adalah suatu organisasi yang melaksanakan pengairan tradisional dan menjadi bagian dari budaya yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat Bali. Sistem irigasi subak memiliki tiga subsistem yaitu subsistem budaya (pola pikir, norma, dan nilai), subsistem sosial ekonomi, dan subsistem kebendaan (termasuk teknologi) (Windia, 2015). Menurut Perda Provinsi Bali Nomor 9 tahun 2012, subak merupakan organisasi tradisional di bidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat Bali yang bersifat sosioagraris, religius, dan ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.

Tujuan pokok subak adalah memelihara dan melestarikan organisasi subak, menyejahterakan kehidupan petani, mengatur pengairan dan tata tanaman, melindungi dan mengayomi petani, dan memelihara serta memperbaiki saluran air ke sawah.

Subak sebagai organisasi tradisional mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di bidang pertanian.
2. Melaksanakan hukum adat dan adat istiadat dalam subak.
3. Menetapkan *awig-awig* sebagai suatu kesepakatan dalam mengatur kepentingan sosial pertanian dan keagamaan.
4. Membina dan melestarikan nilai-nilai agama dan adat istiadat Bali serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan anggota.
5. Menjaga, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan subak.
6. Mengembangkan kemampuan krama subak untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani.
7. Menjaga kelestarian wilayah subak dan lingkungannya dalam rangka pertanian berkelanjutan.

Subak mengenal konsep *Tri Hita Karana* (THK) yang pada intinya mengedepankan harmoni dan prinsip-prinsip kebersamaan dalam kehidupan umat manusia. Konsep *Tri Hita Karana* di Bali tercermin dalam tata kehidupan masyarakat yang meliputi tiga unit yaitu:

1. *Parhyangan*

*Parhyangan* dalam konsep *Tri Hita Karana* dapat diartikan sebagai hubungan manusia dengan *Hyang Widhi Wasa* (Tuhan Yang Maha Esa). *Parhyangan* merupakan kiblat setiap manusia untuk mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta yang diaktualisasikan dalam bentuk tempat suci. Pura sebagai tempat pemujaan Tuhan Yang Maha Esa dan dianggap sebagai bagian dari mekanisme kontrol terhadap pengelolaan air irigasi. Petani subak secara rutin menyelenggarakan upacara keagamaan setiap hari suci agama hindu yakni hari suci Purnama, Tilem, Kajeng Kliwon, maupun hari suci keagamaan lainnya dengan mempersembahkan sesajen (banten) di pelinggih yang terletak di tengah sawah (pura ulun carik). Selain itu para petani juga menghaturkan sesajen di aliran air sungai menuju sawah yang dikenal oleh masyarakat dengan nama temukuan. Selain melaksanakan persembahan rutin pada

setiap hari suci agama hindu, para anggota subak dan masyarakat umum juga merayakan odalan setiap enam bulan sekali di pura subak yang ada di masing-masing subak.

## 2. *Pawongan*

*Pawongan* merupakan hubungan umat manusia dengan alam semesta (lingkungan). *Pawongan* merupakan sebuah pengakuan yang tulus dari manusia itu sendiri, bahwa manusia tidak dapat hidup menyendiri tanpa bersama-sama dengan manusia lainnya.

Konsep *pawongan* ini menggambarkan bagaimana manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain. Air merupakan komponen penting dalam menjalankan usahatani. Pada konsep *pawongan* ini menggambarkan bagaimana harmoni hubungan antar anggota subak, misalnya apabila ada petani yang membutuhkan air pada saat proses penanaman ataupun pertumbuhan kegiatan usaha taninya, para petani tidak lagi saling berebut antara satu dengan yang lainnya. Selain itu untuk menumbuhkan rasa solidaritas atau kebersamaan, anggota subak juga melaksanakan gotong royong. Semua masyarakat berperan aktif untuk melaksanakan program ini.

Sistem pembagian air juga diatur dalam *awig-awig* maupun *pararem*. *Awig-awig* merupakan anggaran dasar dalam suatu organisasi, sedangkan *pararem* merupakan anggaran rumah tangga dalam suatu organisasi. Substansi pada *awig-awig* menyangkut mengenai hal-hal yang pokok saja, sebaliknya substansi pada *pararem* menyangkut mengenai hal-hal yang lebih rinci. Jika pernyataan di *awig-awig* sudah jelas, maka di *pararem* akan dikatakan cukup jelas, serta jika di *awig-awig* ada yang tidak jelas, maka akan dibahas di *pararem*.

## 3. *Palemahan*

*Palemahan* adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan (alam semesta). *Palemahan* merupakan bentuk kesadaran manusia bahwa manusia hidup dan berkembang di alam, bahkan merupakan bagian dari alam itu sendiri. Para petani anggota subak diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan sumberdaya perairan (sungai). Hal ini dipertegas dengan adanya awigawig subak yang di dalamnya terdapat aturan untuk menjaga kebersihan sumberdaya perairan. Awig-awig berisi larangan bagi anggota subak untuk tidak membuang sampah di sungai, agar tidak mengganggu proses pertumbuhan padi, palawija maupun mengganggu pertumbuhan ikan. Selain itu juga untuk seluruh anggota subak setiap satu bulan

sekali diadakan gotong royong pembersihan saluran air. Hal ini dilakukan agar air dalam subak dapat mengalir dengan lancar dalam pendistribusiannya.

Topografi lahan subak umumnya miring dan sawahnya bertingkat. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengaturan sistem irigasi (suplesi dan drainase). Selain itu, subak-subak di Bali masing-masing mempunyai wilayah dengan batas-batas alamiah yang jelas, seperti gunung, hutan, jurang, sungai dan desa. Dengan begitu menunjukkan keserasian antara konsep yang ada dalam subak dengan lingkungan. Keserasian antara subak dan lingkungan akan mampu menunjang keberlanjutan pertanian yang ada di Bali. Setiap blok atau kompleks persawahan milik petani memiliki bangunan-sadap dan saluran drainase (*one inlet and one outlet system*). Hal ini dilakukan agar distribusi air kepada para anggota subak bisa adil dan merata sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Subak memanfaatkan bahan-bahan lokal untuk pembangunan sarana jaringan irigasi di kawasan yang bersangkutan. Keserasian antara subak dengan lingkungan inilah yang mampu menjadikan subak bisa menunjang keberlanjutan pertanian yang ada di Bali.

## **Konsep Pertanian Berkelanjutan**

Pertanian berkelanjutan adalah sistem usahatani yang dipandang secara menyeluruh yaitu secara ekonomi menguntungkan, secara ekonomi menguntungkan, ramah lingkungan, sesuai dengan budaya setempat, secara sosial dapat diterima dan diterapkan oleh masyarakat. Pertanian berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pengembangan ekonomi, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Selain itu juga harus fokus pada tujuan-tujuan produktivitas jangka panjang, jaminan stabilitas lingkungan (aman, bersih, seimbang, dan terbarukan), dan kebebasan serta pemberdayaan petani.

Pertanian berkelanjutan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara melalui pengembangan ekonomi, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Tujuan lain yang menjadi fokus pertanian berkelanjutan adalah produktivitas jangka panjang, jaminan stabilitas lingkungan (aman, bersih, seimbang, dan terbarukan), dan kebebasan serta pemberdayaan petani.

Sugino (2003) menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian berkelanjutan sangat ditentukan oleh dua faktor penting yaitu praktek pengelolaan sumberdaya pertanian yang terbaik dan intervensi dari pemerintah. Praktek manajemen terbaik untuk membangun sistem pertanian berkelanjutan adalah manajemen unsur hara dengan aplikasi pupuk organik, pengelolaan hama terpadu, kesesuaian sistem pertanian untuk mengurangi kerusakan tanaman dan konservasi tanah serta efisiensi dalam pengelolaan irigasi. Indikator pertanian berkelanjutan dapat dikelompokkan pada berbagai tingkatan yaitu tingkat usahatani atau rumah tangga, tingkat masyarakat, dan tingkat nasional pada ekosistem (ekosistem pesisir, ekosistem dataran tinggi, dan ekosistem dataran rendah).

Menurut Salikin (2007) sistem pertanian yang berkelanjutan adalah *back to nature*, yaitu sistem pertanian yang tidak merusak, tidak mengubah, selaras, dan seimbang dengan lingkungan atau pertanian yang patuh dan tunduk pada kaidah-kaidah ilmiah. Beberapa asas yang harus diperhatikan dalam pertanian berkelanjutan, adalah sebagai berikut.

1. Sumberdaya biologis harus dimanfaatkan atau dikelola sesuai dengan kemampuan dan kodrat alamiahnya. Jika suatu sumberdaya biologis terpaksa dimanfaatkan melampaui batas kemampuan alamiahnya, dapat dilakukan introduksi teknologi untuk mengompensasikan kekurangan tersebut, asalkan tidak menimbulkan masalah-masalah baru yang lebih serius.
2. Kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumber daya alam yang diwariskan oleh suatu generasi kepada generasi selanjutnya sekurang-kurangnya harus sama dengan kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumber daya alam dari generasi sebelumnya (kurang sebanding dengan proses entropi yang alamiah).
3. Penggunaan sumberdaya biologi yang dapat diperbarui lebih diprioritaskan. Tingkat penggunaan sumberdaya biologi yang dapat diperbarui tersebut harus sama dengan tingkat pembentukan alamiahnya. Harga sumberdaya biologis tersebut harus dengan mempertimbangkan kelangkaannya (*scarcity rent*).

Keberlanjutan pertanian memberikan subak memiliki peran ganda sebagai lembaga pengelola irigasi sekaligus pengelola unit usaha ekonomi dan bisnis di tingkat usahatani. Hal itu menjadikan subak harus bersedia melakukan restrukturisasi kelembagaan termasuk melakukan penyempurnaan AD/ART. Subak perlu membentuk sebuah koperasi tani yang

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, introduksi teknologi baru yang sesuai dan efisien, peningkatan kemampuan kewirausahaan, administrasi dan manajemen melalui penyuluhan dan pelatihan. Materi penyuluhan dan pelatihan yang dibutuhkan adalah administrasi, manajemen keuangan, program komputer dan akuntansi serta pembentukan badan hukum koperasi. Selain itu juga diperlukan materi mengenai pola pengembangan produk dan unit usaha agribisnis yang mandiri dan berkelanjutan, penyusunan studi kelayakan usaha, dan pengenalan perkreditan serta menjalankan etika bisnis.

Subak agar terus memiliki keberlanjutan maka harus menerapkan agribisnis dari hulu ke hilir dalam artian mempunyai prinsip tanam – petik – olah – jual. Beberapa jenis usaha yang dapat dilaksanakan oleh subak misalnya adalah usaha lumbung padi, usaha penggilingan padi, penyediaan alat-alat mesin pertanian, dan usaha pengadaan sarana produksi serta lainnya. Banyaknya divisi usaha tersebut akan memberikan daya tarik gambaran bisnis yang tinggi sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan.

## **Peran Subak dalam Ketahanan Pangan**

FAO (2013) menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi dimana setiap orang, dari waktu ke waktu mempunyai kemampuan secara fisik dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya akan makanan bergizi dan memiliki preferensi pemilihan makanan yang sehat. Ketahanan pangan harus meliputi empat asas, yaitu ketahanan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan, dan keamanan pangan (Undang-undang Pangan No. 18 Tahun 2012).

Subak yang mempunyai prinsip *Tri Hita Karana* jika diterapkan dengan masif maka akan berdampak kepada ketahanan pangan. Hal tersebut terjadi dikarenakan subak mempunyai sistem dan kinerja yang jelas dengan implementasi yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Subak identik dengan tanaman pangan yaitu padi yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, sehingga subak sangat menunjang ketahanan pangan yang ada di Pulau Bali dengan pola distribusi air irigasi.

Faktor air irigasi sangat penting dalam menunjang ketahanan pangan dikarenakan sektor pertanian sangat membutuhkan keberlangsungan air irigasi terutama tanaman padi yang merupakan bahan baku makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut Sedana (2022), kelangkaan air dapat berpengaruh kepada produksi padi dan konversi lahan sehingga

akan memberikan dampak pada pencapaian program ketahanan pangan. Subak secara penuh mengelola kegiatan pertanian padi di pulau Bali. Subak mempunyai peran khusus dalam distribusi dan alokasi air, mobilisasi sumber daya untuk operasi dan pemeliharaan, penggalangan dana, pengelolaan konflik, dan pertunjukan ritual.

Terdapat empat sub-modal pada model pengelolaan subak, yaitu modal sosial, modal lingkungan, modal ekonomi, dan modal budaya. Simulasi pada setiap model untuk keberlanjutan peradaban subak Bali dilakukan pada model sosial dengan cara menghambat atau mengontrol laju pertumbuhan agar luas pemukiman dapat terkontrol pada model lingkungan. Dampak yang terjadi pada lahan sawah dapat ditekan pada pemukiman sehingga luas sawah dapat dikendalikan, bahkan dapat bertambah luasnya. Luas sawah yang tetap terjaga akan menghasilkan produksi padi. Peran peradaban subak dapat mendukung penyelamatan budaya subak yang berkelanjutan dengan penguatan ekonomi di bidang pariwisata. Intervensi perlu dilakukan terhadap kebijakan pemerintah melalui regulasi, peran swasta, masyarakat, dan peran subak sebagai subjek (Geria, 2019).

Martiningsih (2012) menyebutkan beberapa peluang yang menjadi kekuatan subak untuk tetap ada dan berkembang serta berperan dalam ketahanan pangan adalah sebagai berikut.

1. Mempunyai organisasi yang jelas dengan adanya struktur dan kepengurusan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab disertai dengan *awig-awig* atau peraturan dengan berbagai sanksi. Adanya SDM dan peraturan yang mengikat merupakan sebuah keharusan dalam organisasi agar terus berkembang dan mengalami keberlanjutan.
2. Setiap anggota berhak melakukan pengawasan terhadap peraturan yang telah disepakati bersama baik anggota ataupun pimpinan, sehingga antara anggota maupun pimpinan subak dapat saling mengawasi atas kinerja masing-masing yang tentunya akan semakin memperbagus kinerja subak itu sendiri.
3. Semangat gotong royong tinggi terutama pada kegiatan pemeliharaan fisik subak dan kegiatan ritual keagamaan. Hal ini didasari pada kondisi dan latar belakang yang sama sehingga semakin memperkuat solidaritas antar anggota subak.
4. Mempunyai batas wilayah yang jelas berlandaskan prinsip hidrolis bukan administratif. Hal ini terjadi karena subak bersumber pada mata air atau hulu yang sama dengan terbentuknya secara alami, sehingga tidak terpengaruh kepada batas-batas administratif desa atau kecamatan.

5. Mempunyai landasan pedoman *Tri Hita Karana* yang menekankan keseimbangan dan keharmonisan dengan sesama manusia, lingkungan, dan Tuhan Yang Maha Esa. Konsep ini jika dipegang teguh oleh seluruh anggota subak akan menjadikan subak sebagai organisasi yang kuat dan terus berkembang.
6. Peraturan atau *awig-awig* dapat diubah dengan menyesuaikan keadaan yang selalu berubah berdasarkan kesepakatan seluruh anggota subak. Subak menerapkan prinsip musyawarah mufakat untuk kebaikan bersama.
7. Berjalannya subak tentunya diperlukan biaya yang tidak sedikit sehingga dilaksanakan penggalangan dana untuk biaya perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi serta penyelenggaraan ritual.

Sedana (2022) menyebutkan beberapa rekomendasi untuk memperkuat peran subak dalam menunjang program ketahanan pangan adalah sebagai berikut.

1. Pemberian subsidi pada input dan peralatan pertanian.
2. Penguatan kapasitas subak dalam hal teknologi, manajemen dan organisasi pertanian.
3. Pengendalian harga beras yang dihasilkan petani.
4. Pemberian subsidi pajak tanah irigasi atau pembebasan pajak.
5. Jaminan ketersediaan air irigasi.
6. Pengendalian konversi lahan beririgasi.

## **Kesimpulan dan Saran**

Subak merupakan organisasi tradisional di bidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat Bali yang bersifat sosioagraris, religius, dan ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang. Keberlanjutan pertanian memberikan subak memiliki peran ganda sebagai lembaga pengelola irigasi sekaligus pengelola unit usaha ekonomi dan bisnis di tingkat usahatani. Subak agar terus memiliki keberlanjutan maka harus menerapkan agribisnis dari hulu ke hilir dalam artian mempunyai prinsip tanam – petik – olah – jual. Pertanian berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup agar tercapai melalui pengembangan ekonomi, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan dan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, selain itu juga harus fokus pada tujuan-tujuan produktivitas jangka panjang, jaminan stabilitas lingkungan (aman, bersih, seimbang, dan terbarukan),

dan kebebasan serta pemberdayaan petani. Faktor air irigasi sangat penting dalam menunjang ketahanan pangan dikarenakan sektor pertanian sangat membutuhkan keberlangsungan air irigasi terutama tanaman padi yang merupakan bahan baku makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Subak mempunyai peran khusus dalam distribusi dan alokasi air, mobilisasi sumber daya untuk operasi dan pemeliharaan, penggalangan dana, pengelolaan konflik, dan pertunjukan ritual.

## Daftar Pustaka

- BPS Provinsi Bali. (2024). *Provinsi Bali dalam angka 2024*. BPS Provinsi Bali.
- Budiasa, I. W. (2010). Peran ganda subak untuk pertanian berkelanjutan di Provinsi Bali. *Jurnal Agrisepe*, 9(1), 153-165.
- FAO. (2013). *The state of food insecurity in the world*. FAO.
- Geria, I. M., Sutjahjo, S. H., & Kurniawan, R.. (2019). Subak sebagai benteng konservasi peradaban Bali. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, 37(1), 39-54.
- Geria, I. M. (2019). *Model pengelolaan subak berkelanjutan berbasis kearifan lokal di kawasan SARBAGITA Bali*. Disertasi. Institut Pertanian Bogor University.
- Martiningsih, N. G. A. (2012). Pelestarian subak dalam upaya pemberdayaan kearifan lokal menuju ketahanan pangan dan hayati. *Jurnal Bumi Lestari*, 12(2).
- Peraturan Pemerintah Provinsi Bali Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak.
- Saliem, H. P., & Ariani, M. (2002). Ketahanan pangan, konsep, pengukuran, dan strategi. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 20(1), 12-24.
- Salikin, K. A. (2007). *Sistem pertanian berkelanjutan*. Kanisius.
- Sedana, G. (2013). *Modal sosial dalam pengembangan agribisnis petani pada sistem subak di Bali*. Disertasi. Universitas Udayana. Denpasar.
- Sedana, G., Rahmat, A. (2020). Alternative policies to strengthen the traditional irrigation system for supporting the food security program: Case of the subak's system in Bali, Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(7), 973-984.
- Sriartha, I. P., & Windia, W. (2015). Efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengendalikan alih fungsi lahan sawah subak: Studi kasus di Kabupaten Badung, Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 5(2).

- Sugino, T. (2003). *Identification of pulling factors for enhancing the sustainable development of diverse agriculture in selected Asian countries*. Palnwija  
News The CGPRT Centre Newsletter. Bogor: CGPRT Centre Publication  
Section, 20 (3): 1-6.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pangan.
- Windia, W., Sumiyati, S., & Sedana, G. (2015). Aspek ritual pada sistem irigasi subak sebagai warisan budaya dunia. *Jurnal Kajian Bali*, 5(1), 23-56.



# Tren dan Dinamika Investasi dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara

**Putri Uzdah Wulandari\*, Esti Rahayu, Arista Damayanti**

Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Gadjah Mada

putriuzdahwulandari@mail.ugm.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini menganalisis pemberitaan mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan metode analisis komparatif dan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini terdapat 40 total portal berita yang digunakan dengan pengumpulan data mencapai 504 berita. Analisis dilakukan dengan bantuan *web analytics voyant tools* untuk mengidentifikasi judul berita, sedangkan analisis konten menggunakan teori pembedaan untuk pemaknaan isi berita. Tujuh bingkai utama diidentifikasi yaitu: ekonomi, tanggung jawab, konflik, minat manusia, keamanan, konsekuensi, dan moralitas. Setiap bingkai menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam menarik minat investasi dengan penekanan pada potensi pertumbuhan yang signifikan tetapi diimbangi dengan adanya konflik kepentingan dan ketidakpastian regulasi. Selain itu, isu hak asasi manusia, budaya, dan keadilan sosial perlu diperhatikan untuk mencegah resistensi dari masyarakat lokal. Analisis *word cloud* menunjukkan dominasi kata kunci dan metrik teks mengindikasikan kepadatan kosakata yang tinggi dan kompleksitas pemahaman. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan terkait tren dan dinamika situasi pembangunan IKN, memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah, dan menjadi bahan bacaan untuk investor supaya dapat mengetahui situasi investasi pada proyek IKN.

*Kata Kunci: Tren Investasi, Dinamika Investasi, Pembangunan Ekonomi, IKN*

\* penulis korespondensi

## **Pendahuluan**

Partisipasi dalam investasi telah meningkat tajam karena keuntungan drastis menawarkan kemungkinan penghasilan lebih tinggi dari modal (Celerier et al., 2016). Fleksibilitas instrumen pasar investasi menjadi faktor investasi dapat dengan cepat melikuidasi dana dan menemukan aset yang sesuai dengan tujuan mereka (Akhtar & Das, 2019). Di sisi lain, keputusan untuk berinvestasi tetap menjadi topik yang paling sulit dibicarakan karena membutuhkan pemikiran jernih dan rasional sang investasi (Chun & Ming, 2009; Rubaltelli et al., 2010). Hal tersebut disebabkan oleh tren dan dinamika terhadap kecenderungan perilaku atau motivasi dasar yang dimiliki oleh investasi berpengaruh besar terhadap minat untuk melakukan investasi (Hans & Choudhary, 2024).

Saat ini Indonesia sedang menjalankan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yaitu pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan harapan dapat mengurangi kepadatan dan mendorong pemerataan pembangunan (Dwina & Lexianingrum, 2024). Pemindahan ibu kota ke wilayah baru ternyata dapat memberikan dampak positif pada pembangunan dan menarik minat investasi untuk berinvestasi (Myint et al., 2017). Tetapi, diketahui pada prosesnya proyek pembangunan IKN yang dilakukan oleh pemerintah masih sekitar 15% (Ulya & Ihsanuddin, 2024). Tantangan pun mulai berdatangan seperti: kebijakan, konflik kepentingan, dan kondisi pasar global (J & Majid, 2020).

Penelitian ini berusaha melihat tantangan tersebut melalui sudut pandang teori bingkai berita dengan batasan bahasan bingkai: konflik, ekonomi, minat manusia, tanggung jawab, moral, konsekuensi, dan keamanan (D'Angelo, 2019; Tewksbury & Scheufele, 2019). Bingkai berita merupakan alat konseptual yang menekankan pada isu tertentu oleh media dan individu untuk menyampaikan, menafsirkan, dan mengevaluasi inovasi (Semetko & Valkenburg, 2000). Efek pembingkai dapat membentuk persepsi publik tentang isu-isu yang dipilih. Sejumlah penelitian telah mengidentifikasi bingkai berita yang dapat membuat konsekuensi terhadap interpretasi publik melalui peristiwa (Aljanabi, 2023; Baden & Springer, 2017; Chuah & Devlin, 2011; Qiu et al., 2021; Stecula & Merkle, 2019; Sulehry & Wallace, 2021; Thier & Wu, 2024; Valenzuela et al., 2017). Supaya penelitian ini dapat menjawab tren dan dinamika rasional para investasi dalam mengambil keputusan melakukan investasi di Indonesia (Shanmugham & Ramya, 2012).

Penelitian ini melakukan analisis pembedaan mencakup semua berita yang menyebutkan tren dan dinamika investasi dalam rangka pembangunan ekonomi di IKN. Pemahaman judul berita dengan bantuan *web analytics voyant tools* bertujuan untuk memahami pola bingkai dan kompleksitas kosa kata yang digunakan oleh media berita. Penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan yaitu melihat isu-isu investasi dibentuk, dipengaruhi, dan disebarluaskan kepada publik, membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami narasi media yang memengaruhi keputusan investasi, dan memperoleh wawasan strategis terkait pengelolaan komunikasi publik yang dapat mendorong lebih banyak investasi untuk berinvestasi di IKN.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan analisis konten komperatif dengan pendekatan kuantitatif dan bantuan dari web analisis bernama *voyant tools* untuk melihat realitas berdasarkan data empiris mengenai tren dan dinamika investasi dalam pembangunan IKN (Prestby, 2024; Wachyudi, 2022). Analisis konten kuantitatif merupakan strategi untuk mengkategorisasi konten tertentu dan memaknainya berdasarkan kategori-kategori yang telah ditentukan (Thier & Wu, 2024). Dalam menentukan kategorisasi, penelitian ini menggunakan beberapa strategi studi kasus untuk meneliti setiap detail berita dan kompleksitas situasi guna memahami karakteristik dan keunikan berita (Famulari, 2020). Secara khusus pula, penelitian ini akan membandingkan dari hasil kumpulan berita dan memaknai isi berita dengan bantuan dari teori pembedaan yang tertera pada Tabel 1.

**Tabel 1**

## Kategori Konten

No	Kategori	Keterangan
1	Konflik	Fokus pada konflik antar individu, kelompok, atau institusi (Semetko & Valkenburg, 2000) Contoh: media membingkai perdebatan antara pemerintah dan kritikus proyek IKN
2	Ekonomi	Fokus pada konsekuensi ekonomi dari suatu isi seperti: dampak finansial, keuntungan atau kerugian (Setia Negara et al., 2024)
3	Minat manusia	Fokus pada cerita dari sudut pandang personal dan menyoroti individu yang terdampak pada isu tertentu (Setia Negara et al., 2024) Contoh: pendapat pengaruh pembangunan IKN terhadap masyarakat lokal dan sebagainya
4	Tanggung jawab	Penekanan terhadap aktor yang bertanggung jawab atas isu atau masalah (Temmann et al., 2021) Contoh: presiden, menteri, dan sebagainya
5	Moral	Mengaitkan berita dengan nilai-nilai moral atau etika (Severson & Coleman, 2015) Contoh: membingkai isu tentang dampak lingkungan atau keadilan sosial.
6	Konsekuensi	Berfokus pada hasil atau dampak dari suatu kejadian atau kebijakan (Vreese, 2005) Contoh: konsekuensi pembangunan infrastruktur dan ekonomi jangka panjang.
7	Keamanan	Pembuatan regulasi atau perubahan ketetapan terkait investasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menarik minat investor (Parker & Chen, 2020)

(Sumber: diolah oleh penulis, 2024)

Data dalam penelitian ini dikumpulkan secara sistematis menggunakan bantuan pencarian pada google dari lima belas kata kunci lalu digunakan fitur *filtering* 'NEWS'. Kata kunci tersebut diantaranya: 1) 'investasi ibu kota nusantara'; 2) 'investasi IKN'; 3) 'pembangunan ibu kota nusantara'; 4) 'dampak investasi di IKN'; 5) 'proyek ibu kota nusantara'; 6) 'regulasi investasi IKN'; 7) 'peran investasi asing IKN'; 8) 'tantangan investasi IKN'; 9) 'kebijakan pemerintah IKN'; 10) 'perkembangan proyek IKN'; 11) opini

investasi tentang IKN’; 12) ‘dukungan pemerintah IKN’; 13) ‘frekuensi berita investasi IKN’; 14) ‘media massa dan IKN’; dan 15) ‘kritik dan pendapat tentang IKN’.

Setelah pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pembersihan data dengan menganalisis kredibilitas dari portal berita yang telah ditemukan. Proses pembersihan data ini membutuhkan ketelitian dan pengkodean sebanyak tiga kali putaran (Lind *et al.*, 2017). Putaran pertama dan kedua dilakukan secara terpisah, sedangkan putaran ketiga data tersebut akan divalidasi secara bersama-sama.

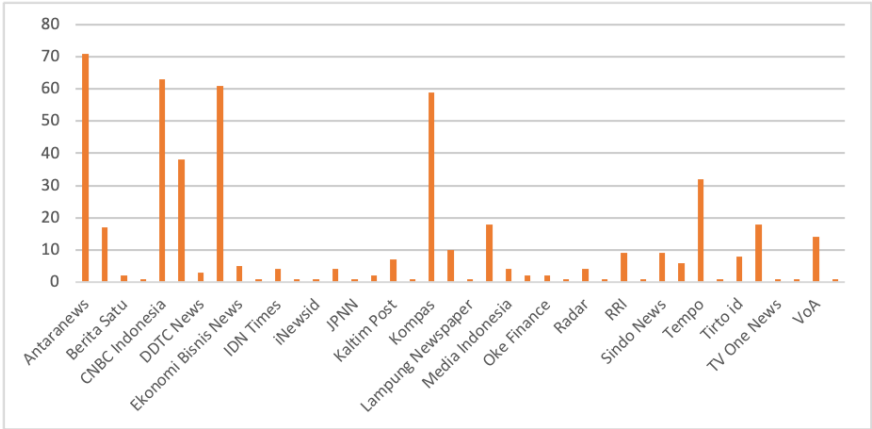
## Hasil dan Pembahasan

### Profil Objek Penelitian

Berdasarkan pencarian berita dari lima belas kata kunci, ditemukan 40 total portal berita dari masing-masing jenis portal yang membahas mengenai investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

#### Gambar 1

Tren Portal Berita Membahas Investasi di IKN



(Sumber: diolah oleh penulis, 2024)

Dari keseluruhan data pada Gambar 1 terlihat bahwa portal berita yang frekuensinya paling banyak membahas IKN yaitu Antaranews (71 pemberitaan). Antaranews merupakan kantor berita milik pemerintah sehingga dominasi ini menunjukkan adanya peran sentral pemerintah untuk menyebarkan informasi resmi mengenai situasi dan kondisi investasi di

IKN. Dengan adanya dominasi ini pula, arus media pemerintah memainkan peran penting dalam membangun narasi publik khususnya terkait investasi.

Selanjutnya, pemberitaan yang memiliki frekuensi rangking kedua hingga keempat ada pada: CNBC Indonesia (63 pemberitaan), Detik (61 pemberitaan), dan Kompas (59 pemberitaan). Diketahui CNBC Indonesia telah mengindikasikan fokus media ini pada sisi ekonomi dan peluang investasi yang terkait dengan proyek IKN. Frekuensi liputannya yang mendekati Antaranews mencerminkan adanya perhatian besar dari kalangan bisnis dan investasi terhadap proyek strategis ini, Detik sebagai portal yang mengutamakan kecepatan menunjukkan pemberitaan IKN menarik minat publik yang cukup besar. Sementara, Kompas dengan pendekatan analisis mendalam dan cenderung mengupas aspek-aspek kompleks dari pembangunan IKN seperti: sosial dan lingkungan.

Dalam konteks internasional, media seperti BBC Indonesia (17 pemberitaan) dan VoA (14 pemberitaan) turut memberikan perhatian pada proyek IKN, meskipun dengan frekuensi yang lebih rendah dibandingkan media nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meski IKN adalah proyek nasional, aspek internasional seperti daya tarik investasi asing dan posisi Indonesia di kancah geopolitik global juga menjadi topik yang mendapat sorotan. Pemberitaan dari media internasional ini penting karena menyampaikan bagaimana dunia luar melihat proyek IKN, terutama dalam kaitannya dengan investasi internasional dan diplomasi ekonomi.

Sementara itu, media dengan fokus pada sektor ekonomi yang lebih spesifik, seperti DDTC News (3 pemberitaan), Oke Finance (2 pemberitaan), dan Emiten News (1 pemberitaan), memperlihatkan cakupan yang lebih terbatas namun signifikan. Meski jumlah pemberitaannya relatif rendah, media-media ini menawarkan perspektif yang lebih mendalam dan teknis mengenai aspek keuangan, perpajakan, dan regulasi yang relevan bagi investasi yang tertarik pada peluang bisnis di IKN. Data ini mengindikasikan bahwa media ekonomi yang lebih fokus memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang bersifat khusus kepada audiens yang lebih spesifik, seperti profesional keuangan dan pelaku bisnis.

Di tingkat lokal, media seperti Kaltim Post (7 pemberitaan), Kaltim Akurat News (2 pemberitaan), dan Borneonews (1 pemberitaan) menggambarkan peran penting mereka dalam memberitakan dampak langsung dari pembangunan IKN terhadap masyarakat di Kalimantan Timur, wilayah yang akan menjadi lokasi ibu kota baru. Meskipun jumlah pemberitaan dari media lokal ini lebih rendah dibandingkan media nasional,

data ini tetap signifikan karena menunjukkan bahwa masyarakat di tingkat lokal juga mengikuti perkembangan proyek IKN, khususnya terkait dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang akan mereka alami secara langsung.

Lebih jauh lagi, beberapa media dengan frekuensi pemberitaan yang lebih rendah seperti Berita Satu (2 pemberitaan), Metro TV News (2 pemberitaan), dan Sinar Harapan (1 pemberitaan) menandakan bahwa tidak semua media memilih untuk memberitakan IKN secara intensif. Hal ini dikarenakan fokus editorial yang berbeda atau karena isu IKN tidak dianggap sebagai topik utama bagi audiens mereka. Media-media ini mungkin hanya memilih untuk meliput perkembangan penting tertentu atau berita terkait kebijakan yang berdampak langsung pada sektor yang mereka liput.

Dari keseluruhan data tersebut, terlihat adanya perbedaan signifikan dalam frekuensi pemberitaan antara media nasional utama dan media lokal maupun internasional. Antaranews dan CNBC Indonesia jelas mendominasi wacana publik terkait IKN, baik dari segi kebijakan maupun peluang investasi. Di sisi lain, BBC Indonesia dan VoA berperan dalam menyampaikan perspektif internasional yang lebih terbatas namun tetap penting. Media lokal seperti Kaltim Post menunjukkan bahwa perhatian pada IKN juga hadir di tingkat regional, meskipun cakupannya belum sebesar media nasional. Media ekonomi spesifik seperti DDTC News dan Oke Finance menawarkan informasi yang lebih mendalam kepada audiens yang lebih sempit namun strategis.

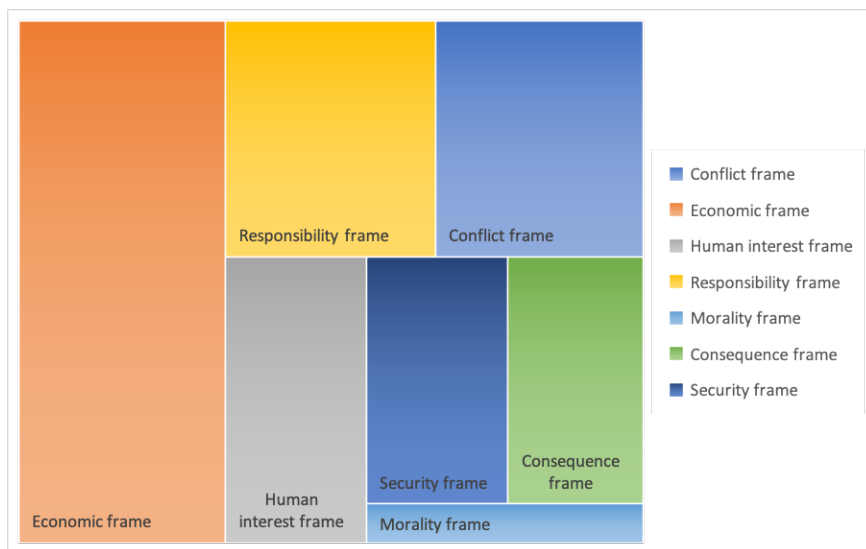
Dengan demikian, data ini memberikan gambaran yang jelas tentang berbagai media memiliki fokus dan intensitas yang berbeda dalam meliput isu investasi di IKN. Melalui data tersebut pula dapat dilihat bahwa proyek IKN menjadi perhatian luas, baik di tingkat nasional maupun internasional, dan media memainkan peran yang berbeda dalam membentuk wacana publik dan investasi tentang proyek tersebut.

### **Berdasarkan Pemaknaan Isi Konten Berita**

Secara keseluruhan, Gambar 2 mencerminkan cara media melaporkan kebijakan dan situasi terkait investasi di IKN. Berbagai bingkai (*frame*) yang digunakan oleh media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik tentang proyek ambisius ini. Dalam analisis kritis ini, penulis akan melihat cara setiap bingkai memainkan peran dalam pemberitaan dan apa yang bisa disimpulkan dari pola penggunaan bingkai tersebut dalam konteks IKN.

## Gambar 2

### Klasifikasi Konten Berita Berdasarkan Framing Theory



(Sumber: diolah oleh penulis, 2024)

Bingkai ekonomi (161 data) telah mendominasi pemberitaan tentang IKN. Hal ini menunjukkan bahwa media lebih sering menekankan aspek ekonomi termasuk investasi besar-besaran, dampak terhadap perekonomian nasional, dan peluang pertumbuhan yang diharapkan. Penekanan yang signifikan pada bingkai ekonomi dapat dipahami mengingat skala proyek IKN yang melibatkan anggaran yang sangat besar serta keterlibatan investasi domestik dan internasional. Media tampaknya memposisikan proyek IKN sebagai mesin ekonomi yang berpotensi mendorong pertumbuhan jangka panjang, memperbaiki distribusi pembangunan, serta menciptakan lapangan kerja baru. Dominasi bingkai ekonomi ini juga bisa menunjukkan adanya upaya untuk membujuk audiens, terutama para investasi yang dapat menjadi peluang ekonomi yang menguntungkan. Selain itu, penggunaan bingkai ini juga bisa menjadi respons terhadap skeptisisme publik tentang proyek yang begitu besar dengan cara menekankan berita pada potensi keuntungan ekonomi.

Meskipun bingkai ekonomi sangat kuat, bingkai tanggung jawab (74 data) menempati posisi kedua. Hal ini mengindikasikan bahwa media juga sangat memperhatikan aspek akuntabilitas dalam pemberitaan proyek IKN.

Proyek sebesar ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan tentang siapa aktor yang bertanggung jawab dan terlibat. Media dinilai menggunakan bingkai ini untuk menyoroti kebutuhan akan transparansi dan kontrol ketat dalam memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana, tanpa korupsi atau inefisiensi. Hal ini mengingatkan proyek sebesar IKN seringkali memicu kritik terkait potensi pemborosan anggaran atau dampaknya terhadap utang negara. Dengan menempatkan tanggung jawab di pusat pemberitaan, media tampaknya berupaya menyoroti pentingnya pengawasan dan peran berbagai pihak dalam menjaga keberhasilan proyek pemindahan ibu kota ini. Penggunaan bingkai tanggung jawab juga memperlihatkan cara media memainkan peran sebagai pengawasan publik yang menuntut kejelasan dari pada aktor utama mulai dari pemerintah pusat hingga investasi besar.

Selanjutnya, bingkai konflik (73 data), menyoroti ketegangan yang muncul seputar investasi di IKN. Konflik ini dapat berupa perbedaan pandangan antara berbagai kelompok kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional contohnya: ada perselisihan antara pemerintah pusat dan daerah, pertentangan proyek alasan lingkungan atau sosial, dan konflik internal antara investasi tentang prioritas pembangunan. Dengan menekankan konflik ini, media secara tidak langsung menyoroti tantangan besar yang dihadapi dalam mengkoordinasikan proyek sebesar IKN. Konflik juga bisa terjadi dalam hal perencanaan tata kota yang mana pemerintah dan investasi dinilai memiliki visi yang berbeda mengenai cara IKN seharusnya berkembang. Penggunaan bingkai konflik ini tidak hanya menciptakan elemen dramatis dalam pemberitaan tetapi dapat menyoroti bahwa keberhasilan proyek ini tidak hanya bergantung pada investasi ekonomi melainkan pada penyelesaian berbagai perbedaan kepentingan.

Bingkai minat manusia (60 data), menyoroti dampak langsung pembangunan IKN terhadap individu dalam kelompok yang lebih kecil. Hal ini berkaitan dengan masyarakat lokal yang dinilai terpengaruh oleh pemindahan ibu kota, pekerja yang terlibat dalam konstruksi, dan individu yang hidupnya berubah karena proyek ini. Walaupun bingkai minat manusia tidak sebesar bingkai ekonomi atau tanggung jawab, peranannya tetap signifikan dalam menggambarkan proyek IKN sebagai sesuatu yang tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi makro, tetapi juga kehidupan orang biasa. Penggunaan bingkai ini dinilai lebih sedikit karena proyek sebesar IKN lebih dipahami melalui perspektif yang lebih besar dan struktural.

Bingkai keamanan (52 data) dan bingkai konsekuensi (50 data), memberikan perhatian terhadap risiko dan dampak jangka panjang dari

proyek IKN. Dalam konteks bingkai keamanan, media dinilai menyoroti tantangan yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota seperti: risiko keamanan nasional, stabilitas sosial, dan ancaman gangguan yang dapat mempengaruhi investasi dan keberlangsungan pembangunan. Sementara itu, bingkai konsekuensi menggambarkan proyek IKN akan berdampak jangka panjang. Media dinilai menyoroti potensi keuntungan dan kerugian jangka panjang baik secara: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, bingkai keamanan dan konsekuensi berfungsi sebagai pengingat bahwa meskipun IKN dipandang sebagai solusi pembangunan, ada risiko yang harus dipertimbangkan secara serius.

Terakhir, bingkai moralitas (16 data) menunjukkan bahwa isu-isu moral dan etika jarang menjadi pusat perhatian dalam pemberitaan tentang IKN. Hal ini dapat dipahami bahwa perspektif praktis seperti ekonomi dan pembangunan lebih diutamakan. Namun, minimnya bingkai moralitas juga menunjukkan adanya pertanyaan-pertanyaan tentang keadilan sosial, dampak lingkungan, atau hak-hak masyarakat adat yang minim akan fokus utama dalam pemberitaan. Padahal aspek tersebut dapat dikritisi mengingat proyek sebesar IKN memiliki implikasi moral terutama dalam dampaknya terhadap komunitas lokal dan ekosistem.

Secara keseluruhan, media cenderung memprioritaskan aspek ekonomi dan tanggung jawab dalam pelaporan investasi di IKN. Konflik dan keamanan juga menjadi tema penting yang sering diangkat yang menunjukkan bahwa meskipun ada optimisme ekonomi, tantangan-tantangan besar masih harus dihadapi. Di sisi lain, aspek moralitas cenderung diabaikan, meskipun sangat berkaitan dengan proyek sebesar IKN ini. Penggunaan bingkai-bingkai ini mencerminkan cara media membentuk narasi tentang IKN sebagai proyek ekonomi raksasa, tetapi dinilai mengabaikan implikasi sosial dan moral yang lebih luas.

### **Berdasarkan Pemaknaan Judul Berita**

Studi ini melakukan analisis dinamika berita yang disampaikan oleh media dengan bantuan *web analytics* yang bernama *voyant tools*.



Ketiga, rata-rata kata per kalimat sebesar 83,6 yang menunjukkan bahwa banyak kalimat dalam teks tersebut memiliki struktur yang kompleks dan panjang. Semakin banyak kata dalam sebuah kalimat, maka semakin sulit kalimat tersebut dipahami oleh pembaca. Penggunaan kalimat yang panjang dan rumit dapat menjadikan informasi yang penting sulit dicerna dan berpotensi menghilangkan esensi pesan yang ingin disampaikan. Dalam konteks ini, perlu diingat bahwa pembaca cenderung lebih suka informasi yang ringkas dan langsung. Dalam berita yang lebih sederhana, penggunaan kalimat yang lebih pendek dan langsung biasanya lebih efektif dalam menarik perhatian pembaca dan menyampaikan informasi dengan jelas. Dengan demikian, pendekatan yang terlalu kompleks dalam penyampaian berita investasi dapat menyebabkan frustrasi bagi pembaca yang dinilai akan mengurangi ketertarikan pembaca untuk mendalami informasi lebih lanjut.

Pada dasarnya, ketiga metrik tersebut menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penyampaian informasi di bidang investasi. Meskipun pengulangan kosakata, tingkat kesulitan yang tinggi, dan struktur kalimat kompleks dapat mencerminkan kedalaman dan detail yang ingin disampaikan oleh para jurnalis. Hal ini dapat menciptakan jarak antara informasi dan pembaca. Jika dibandingkan dengan sektor berita lain, berita investasi cenderung lebih elit dan dinilai

### ***Word Cloud***

Analisis word cloud dari teks berita mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) mengungkapkan sejumlah kata kunci yang muncul dengan frekuensi tinggi, yang memberikan pandangan jelas mengenai fokus pembahasan. *Word cloud* ini memperlihatkan tema-tema utama yang dibahas dalam teks, terutama seputar pembangunan fisik, investasi, dan keterlibatan aktor-aktor penting dalam proyek tersebut. Dalam analisis kritis ini, kami akan membedah makna dari kata-kata yang muncul dominan serta implikasinya terhadap narasi secara keseluruhan..

Kata “IKN”, “nusantara”, dan “investasi” mendominasi word cloud, yang menunjukkan bahwa inti dari teks ini adalah pembangunan IKN dan aspek ekonomi yang terkait erat dengan investasi. Pengulangan kata «IKN» dan «Nusantara» mencerminkan bahwa teks ini tidak hanya menekankan pembangunan fisik dari ibu kota baru, tetapi juga memperkuat dimensi simbolik serta identitas nasional yang melekat pada proyek tersebut. Nama «Nusantara» sendiri membawa makna historis dan geografis yang lebih luas, mengindikasikan pentingnya proyek ini dalam konteks nasional.

Kata “investasi” muncul berulang kali, yang menggarisbawahi bahwa aspek finansial adalah kunci dalam proyek ini. Ini menunjukkan bahwa pembicaraan tentang IKN sangat berkaitan dengan sumber daya ekonomi, baik yang bersumber dari domestik maupun internasional. Narasi ini menggarisbawahi bahwa investasi diperlukan untuk menjalankan pembangunan dalam skala besar, yang memperkuat peran penting sektor swasta dan modal asing dalam mendukung proyek ini.

Dominasi kata-kata ini menegaskan bahwa fokus utama pembahasan terletak pada pembangunan ibu kota baru yang memerlukan dukungan investasi yang signifikan. Penggunaan kata-kata tersebut memperlihatkan bahwa narasi ini sangat berorientasi pada dimensi ekonomi dari proyek tersebut, dengan perhatian besar pada keberhasilan finansial dan aliran modal yang masuk. Hal ini juga mencerminkan bahwa proyek IKN diposisikan sebagai simbol penting bagi masa depan ekonomi Indonesia.

Kata “Jokowi” muncul sebagai salah satu kata dengan frekuensi tinggi, menandakan peran utama Presiden Joko Widodo dalam proyek pembangunan IKN. Keberadaan nama ini menunjukkan bahwa keberhasilan atau tantangan dari proyek ini akan sangat terkait dengan citra dan kebijakan presiden. Nama Jokowi di sini juga mengisyaratkan bahwa proyek ini merupakan bagian dari agenda besar pemerintah di bawah kepemimpinannya, menciptakan hubungan yang erat antara kebijakan nasional dan pembangunan ibu kota baru.

Kata-kata “otoritas” dan “pemerintah” muncul secara signifikan, mengindikasikan bahwa peran lembaga pemerintah dan badan pengawas sangat penting dalam proses pembangunan ini. Keterlibatan otoritas negara menunjukkan bahwa proyek ini tidak hanya bergantung pada sektor swasta tetapi juga menuntut partisipasi aktif pemerintah dalam mengatur, mengawasi, dan mengelola proyek. Ini menunjukkan bahwa regulasi, kebijakan, dan struktur kelembagaan memiliki peran vital dalam jalannya proyek IKN, dengan peran pemerintah yang sangat dominan dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan strategis.

Kehadiran kata-kata ini menggambarkan bahwa proyek IKN adalah proyek besar yang tidak dapat terlepas dari pengawasan dan kontrol lembaga negara. Keterlibatan aktif pemerintah menegaskan bahwa proyek ini merupakan prioritas nasional yang memerlukan regulasi ketat dan koordinasi antara berbagai badan pemerintah. Secara keseluruhan, kata-kata ini menekankan pentingnya otoritas dan regulasi dalam menentukan arah serta kesuksesan dari pembangunan IKN.

Kata “kritik” muncul dengan frekuensi yang cukup besar, yang menunjukkan adanya pandangan kritis terhadap proyek pembangunan IKN. Kata ini memperlihatkan bahwa proyek tersebut tidak hanya mendapat dukungan, tetapi juga menimbulkan resistensi dari berbagai pihak. Kritik ini bisa berhubungan dengan berbagai aspek, seperti alokasi anggaran, efektivitas kebijakan, atau bahkan dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan ibu kota baru.

Keberadaan kata «kritik» yang signifikan dalam word cloud mencerminkan bahwa wacana seputar proyek IKN diwarnai dengan skeptisisme dan pertanyaan mengenai keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat. Munculnya kritik ini menandakan bahwa proyek ini dilihat secara beragam oleh publik, dan resistensi dari kelompok-kelompok tertentu mungkin muncul akibat kekhawatiran terhadap potensi kegagalan atau ketidakselarasan dalam perencanaan proyek tersebut. Kritik ini juga dapat mencerminkan bahwa proyek IKN, meskipun ambisius, tetap menghadapi tantangan besar dalam hal penerimaan publik dan keberlanjutan pelaksanaannya.

Kata “Singapura”, “asing”, dan “global” menunjukkan keterlibatan internasional dalam proyek IKN. Kata-kata ini mencerminkan bahwa proyek ini tidak hanya berskala domestik tetapi juga menarik perhatian dan partisipasi dari aktor-aktor global. Singapura, misalnya, dapat diasosiasikan sebagai mitra strategis dalam berbagai sektor, termasuk teknologi dan investasi. Sementara itu, kata “asing” dan “global” menggarisbawahi pentingnya peran investor internasional dan keterlibatan negara-negara lain dalam mendukung pembangunan ibu kota baru ini.

Kemunculan kata-kata ini menegaskan bahwa proyek IKN diposisikan sebagai proyek yang memiliki dampak internasional, di mana negara-negara tetangga dan komunitas global melihat potensi ekonomi dari proyek tersebut. Ini menyoroti pentingnya investasi asing dalam mempercepat pembangunan dan mencapai target ambisius yang telah ditetapkan. Pada saat yang sama, kehadiran kata-kata ini juga mencerminkan keterbukaan pemerintah terhadap kerjasama internasional, yang diharapkan dapat memberikan suntikan modal dan teknologi untuk mendukung pembangunan ibu kota baru.

Kata-kata seperti “bangun”, “fasilitas”, “infrastruktur”, dan “tambah” memperlihatkan bahwa teks ini sangat berfokus pada aspek pembangunan fisik dari proyek IKN. Ini menandakan bahwa narasi pembangunan ibu kota baru mencakup penyediaan infrastruktur besar-besaran, mulai dari pembangunan jalan, gedung, hingga fasilitas publik yang akan mendukung

kehidupan di ibu kota baru. Penggunaan kata-kata ini juga menunjukkan bahwa proyek ini tidak hanya sekadar rencana di atas kertas, tetapi melibatkan tindakan nyata dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang modern dan berkelanjutan.

Kata “fasilitas” dan “infrastruktur” menggambarkan fokus pada penyediaan elemen-elemen fisik yang menjadi fondasi bagi perkembangan ibu kota baru. Ini menekankan bahwa proyek ini bersifat sangat pragmatis, dengan perhatian besar pada aspek-aspek material yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sehari-hari di IKN. Proyek pembangunan infrastruktur ini juga memperlihatkan bagaimana pemerintah berupaya menciptakan kota yang tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga fungsional dalam hal penyediaan layanan publik dan konektivitas.

Keberadaan kata-kata ini memperlihatkan bahwa pembangunan fisik menjadi fokus utama dalam diskusi seputar IKN, dengan harapan bahwa pembangunan infrastruktur yang baik akan memperkuat daya tarik ibu kota baru sebagai pusat ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia. Selain itu, narasi ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mempercepat penyelesaian proyek-proyek infrastruktur untuk mendukung target yang ambisius.

Secara keseluruhan, analisis *word cloud* ini menunjukkan bahwa narasi mengenai pembangunan IKN sangat berfokus pada investasi, infrastruktur, peran pemerintah, dan keterlibatan internasional. Dorongan investasi menjadi katalis utama dalam proyek ini, sementara peran pemerintah dan aktor-aktor penting seperti Presiden Jokowi serta otoritas negara sangat menonjol. Di samping itu, kata kritik muncul sebagai tanda bahwa proyek ini mendapat tanggapan yang beragam dari publik, dengan adanya pandangan kritis yang perlu diperhatikan. Keterlibatan internasional melalui investasi asing memperkuat posisi proyek IKN sebagai proyek berskala global yang melibatkan aktor-aktor internasional dalam proses pembangunannya. Fokus pada infrastruktur juga sangat kuat, menunjukkan bahwa pembangunan fisik menjadi prioritas utama dalam mewujudkan ibu kota baru ini.

Berdasarkan temuan ini, diketahui pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, penyediaan infrastruktur, dan respons terhadap kritik publik, untuk memastikan bahwa proyek IKN benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas dan berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

## Diskusi

Studi ini mengidentifikasi dan menemukan tujuh bingkai yang berbeda-beda dalam tren dan dinamika investasi yang terjadi di IKN. Bingkai tersebut terdiri dari berbagai topik dan sub-klaster. Misalnya, berita paling intensif dilakukan oleh pewarta Indonesia yaitu bingkai ekonomi yang sebagian besar berkaitan dengan peristiwa investasi, aktivitas investasi, dan tindakan ekonomi lainnya yang terjadi di IKN. Bingkai ekonomi difokuskan pada pasar dan industri yang mulai berjalan (Boyne & Walker, 1999). Bahasan dengan ekonomi yang mendalam akan berimplikasi pada praktik pemasaran yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi yang ada pada suatu negara (Chuah & Devlin, 2011).

Studi ini juga menemukan para pewarta membingkai tema dari investasi IKN berdasarkan bingkai tanggung jawab. Hal ini berkaitan dengan sub klaster dan *word cloud* yang kami temukan bertema ‘jokowi’, ‘otoritas’, ‘pemerintah’, dan sebagainya. Bingkai tanggung jawab sendiri berkaitan dengan cara media memberikan informasi terhadap aktor yang terlibat dan bertanggung jawab atas suatu masalah yang telah dibuat dengan cara mempengaruhi pemahaman publik dan dinamika sosial (Temmann et al., 2021). Bingkai ini pun akan memahami sisi peristiwa dalam konteks isu sosial yang mendorong penonton untuk melihat sisi sistematis dan tanggung jawab dari pemerintah (Iyengar, 1996).

Bingkai konflik dalam studi ini memiliki tingkat sentimen dari para teknokratik, masyarakat, atau aktor lainnya yang mengkritisi pemerintah dalam mengimplementasikan proyek ambisius ini. Mengingat konflik berkaitan dengan hubungan atas masalah dan tugas yang mengganggu rasionalitas dan mengancam stabilitas pentingnya untuk meredam konflik (Yang et al., 2015). Dalam hal ini aktor yang saling bertentangan sebenarnya dapat membuat dan mendefinisikan situasi menjadi emosi, rusuh, marah, dan bertentangan (van Vuuren Verkerk et al., 2021).

Sejalan dengan bingkai konflik, pada bingkai minat manusia berkaitan erat dengan aktor sub-klaster dan *word cloud* yang dimaksud seperti: ‘akademisi’, ‘politikus’, ‘menteri’, dan sebagainya. Minat manusia memang berfokus pada aspek emosional dari suatu objek (Walter et al., 2022). Dalam kasus IKN, masih terdapat sejumlah emosi dari minat para aktor sehingga ada baiknya untuk meredam konflik dan mencari solusi terbaik untuk pembangunan ekonomi di IKN.

Bingkai kelima keamanan yang berkaitan dengan ‘kebijakan’, ‘regulasi’, dan sebagainya yang sejalan dengan *word cloud* ‘HGU’. Dari

temuan kami terdapat salah satu topik yang hangat diperbincangkan. Bingkai keamanan sangat memperhatikan dari sisi cara mengambil saat situasi darurat dan cara para aktor berhasil membuat target melakukan tindakan (Silva & Pereira, 2019). Jika dikaitkan dengan studi temuan kami, maka bingkai keamanan ini menjadi bagian penting dari pemerintah untuk meyakinkan para investasi dalam melakukan investasi. Oleh karena itu, fokusnya pada proses pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan (Parker & Chen, 2020)

Keenam, bingkai konsekuensi berkaitan dengan klaster pembiayaan, kesenjangan, lingkungan, dan sebagainya. Dengan *word cloud* yang sejalan yaitu 'lingkungan' dan sebagainya. Bingkai konsekuensi memberikan pengaruh tidak langsung kepada niat dari aktor (Wagner & Sukalla, 2021). Dampak yang dihasilkan dapat mempengaruhi sosialisasi politik, pengambilan keputusan, dan tindakan kolektif dari keputusan yang sebelumnya telah ditetapkan (Vreese, 2005).

Terakhir, bingkai ketujuh tentang moral yang berkaitan dengan sudut pandang terhadap nilai-nilai moral atau etika yang mempengaruhi sikap dan pendapat publik terhadap suatu kebijakan (Severson & Coleman, 2015). Dalam temuan kami, terdapat sub kluster 'hak asasi manusia', 'keadilan sosial', dan sebagainya. Sehingga pendekatan isu tersebut berkaitan dengan cara pewarta mengemas isu dengan pendekatan moral yang digunakan untuk mempengaruhi persepsi publik dan stimulus tindakan atau dukungan (Wang & Liu, 2021).

Dari berbagai bingkai tersebut, tren dan dinamika pembangunan ekonomi IKN menghadirkan peluang dan tantangan yang kompleks. Kebutuhan mendesak terhadap tata kelola yang baik dianggap sebagai hal yang sangat dibutuhkan. Namun, kondisi lingkungan dan beberapa aspek kepentingan harus diredam terlebih dahulu supaya dapat menciptakan kota yang adil, berkelanjutan, dan inklusif bagi semua pihak.

## **Kesimpulan dan Saran**

Studi ini mengidentifikasi tujuh bingkai utama dalam pemberitaan mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yaitu: ekonomi, tanggung jawab, konflik, minat manusia, keamanan, konsekuensi, dan moralitas. Masing-masing bingkai menyoroti tren dan dinamika investasi yang signifikan dalam proyek ini. Tren pertumbuhan yang terlihat dalam investasi menunjukkan potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan pembangunan IKN. Namun, tantangan seperti konflik

kepentingan dan ketidakpastian regulasi juga muncul sebagai penghalang yang harus diatasi untuk memastikan kelancaran investasi.

Dinamika yang berkembang dari isu hak asasi manusia, budaya, dan keadilan sosial menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal sangat penting untuk keberhasilan proyek ini. Analisis metrik teks dan *word cloud* menunjukkan dominasi kata kunci seperti “IKN,” “investasi,” dan “pembangunan,” yang mencerminkan tren komunikasi yang mengedepankan aspek ekonomi. Namun, kompleksitas bahasa yang digunakan dalam pemberitaan ini dapat menyulitkan pemahaman dan menciptakan tantangan bagi para investor dan masyarakat yang terlibat. Hal ini menegaskan bahwa meskipun ada tren positif dalam investasi, kesulitan dalam memahami informasi dapat menghambat partisipasi publik dan keputusan investasi yang tepat.

Temuan ini menunjukkan bahwa narasi media memiliki pengaruh besar terhadap persepsi publik dan keputusan investasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi dinamika interaksi antara berbagai aktor yang terlibat dalam investasi, serta dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan IKN, untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tren investasi yang berkembang.

## Daftar Pustaka

- Akhtar, F., & Das, N. (2019). Predictors of investment intention in Indian stock markets: Extending the theory of planned behaviour. *International Journal of Bank Marketing*, 37(1), 97–119. <https://doi.org/10.1108/IJBM-08-2017-0167>
- Aljanabi, A. R. A. (2023). The impact of economic policy uncertainty, news framing and information overload on panic buying behavior in the time of COVID-19: a conceptual exploration. *International Journal of Emerging Markets*, 18(7), 1614–1631. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-10-2020-1181>
- Baden, C., & Springer, N. (2017). Conceptualizing viewpoint diversity in news discourse. *Journalism*, 18(2), 176–194.
- Boyne, G. A., & Walker, R. M. (1999). Social housing reforms in England and Wales: A public choice evaluation. *Urban Studies*, 36(13), 2237–2262. <https://doi.org/10.1080/0042098992403>
- Celerier, C., Vallee, B., & Calvet, L. (2016). Financial Innovation and Stock Market Participation. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2788897>

- Chuah, S. H., & Devlin, J. (2011). Behavioural economics and financial services marketing: A review. *International Journal of Bank Marketing*, 29(6), 456–469. <https://doi.org/10.1108/02652321111165257>
- Chun, W. W., & Ming, L. M. (2009). Investor behavior and decision-making style: a Malaysian perspective. *Banker's Journal Malaysia*, 133(3), 13.
- D'Angelo, P. (2019). Framing theory and journalism. *The International Encyclopedia of Journalism Studies*, 2002, 1–10.
- Dwina, R. A., & Lexianingrum, S. R. P. (2024). Analisis pro dan kontra di youtube terhadap pembangunan IKN di Kalimantan Timur dalam kaitan komunikasi politik. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2(3), 382–389.
- Silva, C. C. V., & Pereira, A. E. (2019). The theory of securitization and its application in articles published in scientific journals. *Revista de Sociologia e Politica*, 27(69). <https://doi.org/10.1590/1678987319276907>
- Famulari, U. (2020). Framing the Trump Administration's "Zero Tolerance" Policy: A quantitative content analysis of news stories and visuals in US News Websites. *Journalism Studies*, 21(16), 2267–2284. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2020.1832141>
- Hans, A., Choudhary, F. S., & Sudan, T. (2024). Behavioral determinants of investment decisions: Evidence from Indian retail equity investors in the wake of COVID-19 induced financial risks. *International Journal of Accounting & Information Management*. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-03-2024-0091>
- Iyengar, S. (1996). American academy of political and social science framing responsibility for political issues author(s): Shanto Iyengar Source: The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 546, The Media and Politics (Jul., 1996 ), pp. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 546 (The Media and Politics), 59–70.
- J, C. R. K., & Majid, M. A. (2020). Renewable energy for sustainable development in India: current status, future prospects, challenges, employment, and investment opportunities. *Energy, Sustainability and Society*, 10(1) | 10.1186/s13705-019-0232-1. *Energy, Sustainability and Society*, 10(2), 1–36. <https://scihub.se/https://doi.org/10.1186/s13705-019-0232-1>

- Lind, F., Gruber, M., & Boomgaarden, H. G. (2017). Content analysis by the crowd: Assessing the usability of crowdsourcing for coding latent constructs. *Communication Methods and Measures*, 11(3), 191–209. <https://doi.org/10.1080/19312458.2017.1317338>
- Myint, S., Lupi, A., & Tsomocos, D. P. (2017). How investment opportunities affect optimal capital structure. *Journal of Applied Corporate Finance*, 29(4), 112–124. <https://doi.org/10.1111/jacf.12266>
- Parker, C., & Chen, J. (2020). The effects of security framing, time pressure, and brand familiarity on risky mobile application downloads. *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting*, 64(1), 1872–1873. <https://doi.org/10.1177/1071181320641450>
- Prestby, T. (2024). Design techniques for COVID-19 story maps: A quantitative content analysis. *Cartography and Geographic Information Science*, 51(2), 222–241. <https://doi.org/10.1080/15230406.2022.2102077>
- Qiu, H., Weng, S., & Wu, M. S. (2021). The mediation of news framing between public trust and nuclear risk reactions in post-Fukushima China: A case study. *Journal of Risk Research*, 24(2), 167–182. <https://doi.org/10.1080/13669877.2020.1749116>
- Rubaltelli, E., Pasini, G., Rumiati, R., Olsen, R. A., & Slovic, P. (2010). The influence of affective reactions on investment decisions. *Journal of Behavioral Finance*, 11(3), 168–176.
- Semetko, H. A., & Valkenburg, P. M. (2000). Framing European politics: A content analysis of press and television news. *Journal of Communication*, 50(2), 93–109. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2000.tb02843.x>
- Setia Negara, T. A., Alkohir Anggoro, S., & Koeswahyono, I. (2024). Indonesian job creation law: Neoliberal legality, authoritarianism and executive aggrandizement under Joko Widodo. *Law and Development Review*, 17(1), 155–197. <https://doi.org/10.1515/ldr-2023-0022>
- Severson, A. W., & Coleman, E. A. (2015). Moral frames and climate change policy attitudes. *Social Science Quarterly*, 96(5), 1277–1290. <https://doi.org/10.1111/ssqu.12159>
- Shanmugham, R., & Ramya, K. (2012). Impact of social factors on individual investors' trading behaviour. *Procedia Economics and Finance*, 2(Af), 237–246. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(12\)00084-6](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(12)00084-6)
- Stecula, D. A., & Merkley, E. (2019). Framing climate change: Economics, ideology, and uncertainty in American news media content from 1988 to 2014. *Frontiers in Communication*, 4, 6.

- Sulehry, R. S., & Wallace, D. (2021). Using frame analysis to operationalize discourse theory for critical news media research. *Romanian Journal of Communication and Public Relations*, 23(3), 7–23.
- Temmann, L. J., Wiedicke, A., Schaller, S., Scherr, S., & Reifegerste, D. (2021). A systematic review of responsibility frames and their effects in the health context. *Journal of Health Communication*, 26(12), 828–838. <https://doi.org/10.1080/10810730.2021.2020381>
- Tewksbury, D., & Scheufele, D. A. (2019). News framing theory and research. In *Media effects* (pp. 51–68). Routledge.
- Thier, K., & Wu, X. (2024). Framing climate solutions: An exploratory quantitative content analysis. *Environmental Communication*, 1–17. <https://doi.org/10.1080/17524032.2024.2396978>
- Ulya, F. N., & Ihsanuddin. (2024). *Jokowi ungkap progres pembangunan IKN baru 15 persen pada 17 Agustus*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/16/13494701/jokowi-ungkap-progrespembangunan-ikn-baru-15-persen-pada-17-agustus>
- Valenzuela, S., Piña, M., & Ramírez, J. (2017). Behavioral effects of framing on social media users: How conflict, economic, human interest, and morality frames drive news sharing. *Journal of Communication*, 67(5), 803–826.
- van Vuuren-Verkerk, K., Aarts, N., & van der Stoep, J. (2021). Meaning-making on the ground: an empirical study on interactional framing in environmental conflicts. *Journal of Communication Management*, 25(4), 368–384. <https://doi.org/10.1108/JCOM-112020-0149>
- Vreese, C. H. de. (2005). New framing: Theory and typology. *Information Design Journal*, 13(2), 51–62. <https://doi.org/10.14429/djlit.37.2.10392>
- Wachyudi, K. (2022). *Penggunaan Voyant Tools dalam pembelajaran Bahasa Inggris*. 8(4), 1661–1668. <https://doi.org/10.31949/educatio.v8i4.3427>
- Wagner, A. J. M., & Sukalla, F. (2021). Targeting physical inactivity—effects of three different consequence frames on population subgroups’ health-related perceptions and behavioral intentions. *Journal of Health Communication*, 26(1), 47–56. <https://doi.org/10.1080/10810730.2020.1868025>
- Walter, D., Ophir, Y., Pruden, M., & Golan, G. (2022). Watching the whole world: The media framing of foreign countries in US News and its

- Antecedents. *Journalism Studies*, 23(15), 1994–2014. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2022.2137838>
- Wang, R., & Liu, W. (2021). Moral framing and information virality in social movements: A case study of #HongKongPoliceBrutality. *Communication Monographs*, 88(3), 350–370. <https://doi.org/10.1080/03637751.2021.1918735>
- Yang, M. Y., Cheng, F. C., & Chuang, A. (2015). The role of affects in conflict frames and conflict management. *International Journal of Conflict Management*, 26(4), 427–449. <https://doi.org/10.1108/IJCMA-09-2013-0077>

# ***Acces to Justice* Konsumen di Ruang Maya melalui Penataan Perjanjian Pinjaman Online dan Literasi Digital**

**Yuyut Prayuti, Happy Yulia Anggraeni, Yeni Nuraeni,  
L. Alfies Sihombing, Erna Listiawati\***

Universitas Islam Nusantara  
ernalistiawati7@gmail.com

## **Abstrak**

Penetrasi teknologi digital dewasa ini dianggap dapat meningkatkan efisiensi terhadap berbagai layanan, termasuk layanan pinjaman *online*, data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melansir tingginya pengguna internet di Indonesia mencapai 78,19% pada 2023 atau menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi 275.773.901 jiwa. Kenyataan tersebut bisa menghambat ataupun memperlancar pertumbuhan *digital economy* di Indonesia. Pasalnya, laporan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK), sejak Januari-Juli 2024 saja sudah melaporkan terdapat lebih dari 17.000 kasus, yang didalamnya melansir pengaduan konsumen terhadap layanan *financial technology*; penyalahgunaan data pribadi, praktik pinjaman tidak etis, dan penagihan hutang agresif. Ini menandakan terdapat urgensi penetrasi teknologi yang harus kita harmonisasikan. Fokus kajian ini mengelaborasi data empiris, komparatif dan dampak sosial ekonomi. Teori keadilan dan utilitarian digunakan sebagai teori yang mendasari. Tujuan penelitian ini mengkritisi dan mengidentifikasi celah potensial UU PK dari praktik prejudisial, supaya dapat mengembangkan model perjanjian pinjaman *online* menjadi signifikan (adil dan transparan) dengan *elaborasi* teknologi *blockchain*, bidang yang relatif belum terjamah secara luas, beriringan dengan formulasi strategi aksesibilitas pemahaman terhadap

---

\* penulis korespondensi

literasi digital sebagai langkah preventif tindakan prejudisial. Penelitian ini juga berusaha memformulasikan strategi untuk meningkatkan akses dan pemahaman terhadap literasi digital sebagai langkah preventif terhadap tindakan prejudisial. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, komparatif, dan konseptual. Bahan hukum primer yang dianalisis adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan dukungan literatur sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel terkait.

*Kata Kunci: Perjanjian Pinjaman Online, Literasi Digital, Tindakan Prejudisial, Teknologi, Perlindungan Konsumen*

## **Pendahuluan**

Sebagai negara yang memangku potensi besar pada pertumbuhan *digital economy* yang diproyeksikan tumbuh mencapai USD 130 Miliar di tahun 2025, Indonesia masih memiliki tugas yang berat dalam eskalasinya (Karina et al., 2022). Termasuk jika dilihat melalui perspektif hukum, perlu dipahami bahwa tugas berat ini juga lahir dari dinamika hukum yang kompleks yaitu perlindungan konsumen pada khususnya terhadap tindakan prejudisial. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU 8/1999) merupakan upaya legislatif untuk melindungi hak-hak konsumen di Indonesia (Prayuti, 2023a). Meskipun UU 8/1999 telah mengakomodasi kerangka kerja dalam melindungi hak-hak konsumen, namun dalam implementasinya masih menunjukkan adanya celah yang dimanfaatkan untuk tindakan-tindakan prejudisial yang mencederai hak-hak konsumen dan implementasi keadilan.

Transformasi digital telah memfasilitasi pertumbuhan eksponensial dalam berbagai layanan secara digital, termasuk layanan pinjaman *online* yang menawarkan aksesibilitas terhadap masyarakat dalam kemudahan pinjaman cepat bagi masyarakat (Putra & Waluyo, 2023). Namun ini membawa tantangan baru, khususnya terkait perlindungan konsumen. Saat ini memang perlu diakui, model perjanjian pinjaman *online* Indonesia sudah menggandeng upaya signifikan untuk mengetas dinamika hukum, tetapi belum dapat memperkuat perlindungan konsumen dan keadilan transaksi. Terlebih, terdapat tantangan yang muncul dari aksesibilitas pemahaman masyarakat yang belum masif.

Mengacu pada uraian tersebut, artikel ini melengkapi berbagai kajian terdahulu tentang hak-hak konsumen, terutama dikaitkan dengan perlindungan dalam bentuk pinjaman *online* dan model perjanjian pinjaman

*online*. Hal ini diperlukan, mengingat kajian terdahulu berlandaskan pertimbangan kajian belum mempertimbangkan aspek regulasi yang inklusif, keadilan, dan aksesibilitas dalam ranah pemahaman hukum seperti yang ditekankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Urgensi pembaharuan hukum perlindungan konsumen melalui pembentukan pengadilan khusus untuk mempermudah akses keadilan, yang terbatas pada analisis legislatif dan memerlukan pengayaan dari perspektif komparatif serta analisis dampak yang lebih luas, sebagaimana ditulis Prayuti (2023b). Dalam kajian lainnya menyoroti pentingnya aspek regulasi, seperti UU 8/1999 dalam menjaga keamanan dan kepercayaan konsumen di ranah *e-commerce* dan perlindungan data konsumen (Prayuti, 2024). Selain itu, artikel ini melengkapi aspek persyaratan dan redaksi perjanjian *online* tanpa mengupas struktur ideal model perjanjian secara mendalam seperti dalam kajian Correia et al (2022).

Pembahasan dalam artikel ini akan fokus terhadap celah tindakan prejudisial dalam UU 8/1999, dan dilengkapi dengan pengembangan model perjanjian pinjaman *online* yang mengintegrasikan prinsip hukum kontrak, perlindungan konsumen, dan teknologi informasi seperti “*blockchain*”. Penerapan “*smart contracts*” diusulkan untuk mengotomatisasi persyaratan perjanjian guna menjamin keadilan dan ketepatan transaksi, dengan menekankan pada literasi digital untuk meningkatkan aksesibilitas pemahaman konsumen. Namun, untuk mengawalinya terlebih dahulu akan diuraikan secara singkat perihal relevansi dan efektivitas UU 8/1999 terhadap permasalahan perlindungan konsumen di ranah pinjaman *online* di era digital.

Artikel ini bertujuan untuk mengkritisi sejauh mana UU 8/1999 mampu menjawab dinamika dan praktik baru dalam layanan pinjaman *online*, termasuk mengidentifikasi celah hukum yang potensial dimanfaatkan oleh penyelenggara industri untuk praktik yang menyimpangi hukum dan merugikan konsumen. Selain itu, mensistematisasi pengembangan model perjanjian pinjaman *online* yang ideal, yang dapat mengakomodir kebutuhan perlindungan konsumen secara lebih efektif dan komprehensif dalam ekonomi digital disertai dengan formulasi strategi literasi digital masyarakat terhadap aksesibilitas pemahaman dalam perjanjian pinjaman secara *online*, sehingga menciptakan ekosistem pinjaman *online* yang lebih aman, transparan, dan adil bagi konsumen.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris (*socio-legal*), dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif dan konseptual dengan mengelaborasi perspektif teknologi dalam perjanjian pinjaman *online* serta persepsi masyarakat awam terhadap tiga definisi keadilan (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, yaitu UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu lain buku-buku, jurnal, dan artikel-artikel terkait (Ali, 2021). Kemudian, akan dianalisis secara kualitatif dengan penyimpulan hasil penelitian ini menggunakan cara berfikir formal dan argumentatif untuk memanifestasikan hasil berupa naratif dan deskriptif dalam permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret mengenai kesenjangan yang terjadi pada kondisi saat ini dengan kondisi yang seharusnya.

## Hasil dan Pembahasan

### ***Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Permasalahan Perlindungan Konsumen Pinjaman Online: Relevansi dan Efektivitas***

Pada dasarnya UU 8/1999 merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan landasan hukum untuk melindungi hak-hak konsumen di teritorial negara Indonesia dari praktik yang tidak adil (Novita & Santoso, 2021). Dalam perkembangannya, UU 8/1999 dewasa ini mengalami “ujian” dengan perkembangan teknologi yang pesat dan kompleksitas baru yang muncul di sektor keuangan digital, mengharuskan penyesuaian lebih lanjut UU 8/1999 yang bertujuan untuk tetap relevan dan efektif. Beberapa ketentuan yang telah termuat sudah mengakomodasi dan memberikan perlindungan dasar kepada konsumen (Suliantoro et al., 2024). Salah satu ketentuan tersebut seperti dalam Pasal 4, menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, termasuk hak atas informasi yang jelas dan benar.

Hak atas informasi yang jelas dan benar seringkali menjadi permasalahan dalam koridor pinjaman *online*. Dalam praktiknya, konsumen seringkali tidak mendapatkan transparansi penuh terkait syarat-syarat pinjaman, termasuk bunga, denda keterlambatan, atau bahkan bagaimana data pribadi konsumen digunakan. Dalam beberapa kasus, terjadi perjanjian

pinjaman *online* yang menggunakan bahasa hukum yang rumit dan/atau klausula baku, membuat konsumen kesulitan memahami ketentuan-ketentuan yang tercantum. Hal ini sering kali menyebabkan konsumen terjebak dalam pinjaman dengan bunga yang tinggi atau denda yang memberatkan. Kasus semacam ini banyak ditemukan di layanan *fintech* ilegal yang tidak diawasi secara ketat oleh OJK. Sehingga, perlindungan yang diharapkan dari UU 8/1999 belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Pasal 7 UU 8/1999 mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selain itu, banyak penyelenggara pinjaman *online* yang memanfaatkan celah hukum untuk melakukan penagihan saat jatuh tempo pembayaran pinjaman secara agresif, yang sering kali menimbulkan tekanan psikologis bahkan ancaman terhadap konsumen.

Studi oleh Akbar (2024) mengemukakan bahwa problematika ini telah melahirkan sebuah tantangan yang terbukti dari eskalasi kasus pelanggaran terhadap hak konsumen, termasuk penyalahgunaan data pribadi, praktik pinjaman yang tidak etis, dan penagihan hutang yang agresif. Pada 2024, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024-Juli 2024, OJK menerima 17.003 pengaduan konsumen terkait sektor jasa keuangan. Dari jumlah tersebut, sektor *financial technology (fintech)* mencatatkan pengaduan terbanyak, yakni sebanyak 6.289 kasus, yang mencakup 36,9 persen dari total pengaduan yang diterima. Pengaduan lainnya mencakup sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan (OJK, 2024). Dari perspektif internasional, kasus di China menunjukkan urgensi perlindungan konsumen dalam *fintech*. Pemerintah China telah menutup banyak *platform* pinjaman *online* ilegal setelah adanya lonjakan keluhan terkait bunga yang eksesif dan penagihan yang mengikis martabat manusia (Huang & Pontell, 2023).

Selain itu, celah utama dalam UU 8/1999 kerap dimanfaatkan oleh penyelenggara layanan pinjaman *online* adalah kurangnya regulasi spesifik terkait perlindungan data pribadi dan mekanisme transparansi informasi dalam perjanjian digital. Misalnya, penyelenggara pinjaman *online* kerap kali mengakses daftar kontak di telepon konsumen dan menyebarkan informasi terkait hutang tersebut kepada kerabat atau rekan kerja konsumen (Arvante, 2022). Tindakan ini jelas melanggar hak privasi konsumen dan belum diatur tegas dalam UU 8/1999. Meskipun Pasal 26 UU 8/1999 menyinggung tentang pelanggaran praktik yang merugikan konsumen, regulasi ini masih terlalu umum dan tidak spesifik untuk mengatur transaksi yang terjadi dalam *platform digital*.

Beriringan dengan mekanisme dalam pinjaman *online*, terdapat fenomena “*debt shaming*” atau praktik mempermalukan debitur yang gagal membayar pinjaman (Kurniawati & Yunanto, 2022). Praktik ini tidak hanya melanggar privasi konsumen, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis yang berat. UU 8/1999 telah melarang penyalahgunaan informasi dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, namun ketentuan ini tidak memberikan perlindungan yang cukup dalam konteks digital dimana data dapat dengan mudah disebarluaskan melalui media sosial dan *platform online*. Dalam hal ini, relevansi UU 8/1999 perlu ditingkatkan agar lebih spesifik mengatur mekanisme perlindungan data konsumen dalam layanan digital.

Sementara itu, di Kawasan Eropa terdapat regulasi seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang telah memberikan kerangka kerja yang jelas dalam melindungi data pribadi konsumen. GDPR memuat kewajiban bagi perusahaan untuk memastikan data konsumen diproses secara aman dan transparan. Menurut Politou et al (2022) GDPR tidak hanya melarang penyalahgunaan data, tetapi juga memberikan hak kepada konsumen untuk mengontrol bagaimana data digunakan dan bahkan meminta penghapusan data jika tidak lagi relevan. Pendekatan ini menempatkan hak privasi konsumen sebagai prioritas utama, serta mewajibkan perusahaan untuk beroperasi dalam prinsip akuntabilitas dan transparansi yang ketat, yang jauh melampaui regulasi perlindungan data pribadi di banyak negara lainnya. Hal ini menjadi penting dalam konteks digital yang semakin berkembang pesat, di mana data pribadi konsumen menjadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, di mana regulasi perlindungan data pribadi masih berkembang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah lama ada, namun belum cukup memberikan perhatian khusus pada isu perlindungan data pribadi dalam ranah digital. UU 8/1999 lebih berfokus pada perlindungan terhadap hak-hak dasar konsumen dalam transaksi barang dan jasa, tanpa mengatur secara komprehensif mengenai pemrosesan data pribadi yang semakin banyak digunakan oleh penyedia layanan digital, seperti platform pinjaman online. Dalam konteks ini, Indonesia baru-baru ini mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022), yang berusaha menanggapi tantangan perlindungan data pribadi yang semakin mendesak. UU 27/2022 menunjukkan langkah maju Indonesia dalam menyelaraskan kebijakan perlindungan data dengan standar

internasional, namun masih menghadapi tantangan dalam hal implementasi dan pengawasan yang efektif.

Dibandingkan dengan GDPR yang telah matang dengan mekanisme pengawasan yang jelas dan otoritas independen di setiap negara anggota Uni Eropa, Indonesia masih perlu menguatkan kapasitasnya dalam penegakan hukum dan pengawasan perlindungan data pribadi. Sementara GDPR menetapkan kewajiban yang sangat rinci dan memberikan hak kepada konsumen untuk mengontrol serta menghapus data mereka, penerapan yang efektif di Indonesia memerlukan langkah-langkah yang lebih konkrit. UU 27/2022 harus diintegrasikan secara lebih menyeluruh dengan UU 8/1999, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan peningkatan literasi digital agar konsumen di Indonesia dapat merasakan perlindungan yang setara. Dengan demikian, adopsi pendekatan yang lebih komprehensif, yang memadukan regulasi perlindungan konsumen dan data pribadi, akan menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan adil di Indonesia, khususnya dalam sektor pinjaman *online*.

Dengan demikian, meskipun UU 8/1999 telah menyediakan fondasi penting bagi perlindungan konsumen, dalam konteks pinjaman *online* dan layanan digital, relevansi dan efektivitas undang-undang ini perlu diperkuat. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh konsumen di era digital memerlukan kerangka regulasi yang lebih spesifik dan adaptif. Penerapan teknologi dalam transaksi keuangan harus diiringi dengan regulasi yang mampu melindungi konsumen secara komprehensif, baik dalam hal privasi, transparansi, maupun akses terhadap keadilan. Dengan demikian, revisi terhadap UU 8/1999 serta harmonisasinya dengan UU 27/2022 dan regulasi terkait *fintech* menjadi sangat mendesak demi menciptakan ekosistem digital yang adil dan aman bagi konsumen. Jika dianalisis melalui lensa teori utilitarianisme yang menilai moralitas tindakan berdasarkan kemampuannya untuk memaksimalkan kebahagiaan atau kesejahteraan bagi sebanyak mungkin orang (Binmore, 2021). Sehingga dalam konteks ini, mengharuskan regulasi dan kebijakan yang diambil oleh OJK tidak hanya untuk memperbaiki perilaku penyedia jasa keuangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa tindakan tersebut memberikan manfaat maksimal bagi konsumen secara keseluruhan. Dari perspektif utilitarian, perlindungan terhadap konsumen menjadi sangat penting karena melibatkan keseimbangan antara keuntungan bagi para pelaku industri keuangan dan kesejahteraan konsumen.

## ***Upaya Memperkuat Perlindungan Konsumen di Ranah Pinjaman Online dalam Ekonomi Digital***

Dalam ranah hukum kontrak, perjanjian merupakan kesepakatan mengikat antara dua atau lebih pihak yang saling memiliki hak dan kewajiban. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya perjanjian meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan dalam membuat perikatan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks perjanjian digital seperti pinjaman *online*, kompleksitas meningkat karena kesepakatan sering dilakukan secara virtual tanpa pertemuan fisik (Poncibò, 2022). Oleh karena itu, prinsip dasar hukum kontrak seperti transparansi, itikad baik, dan perlindungan hak konsumen menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan dalam perjanjian.

Di samping itu, perlindungan konsumen dalam era digital tidak hanya terbatas pada hubungan kontraktual tradisional. Dengan pesatnya perkembangan teknologi finansial (*fintech*), terutama layanan pinjaman *online*, konsumen sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah akibat keterbatasan akses informasi, literasi digital yang rendah, serta kerentanan terhadap penyalahgunaan data pribadi. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam membentuk model perjanjian pinjaman *online* yang ideal dan strategi aksesibilitas pemahaman konsumen agar perlindungan hukum tetap terjaga di era ekonomi digital.

Model perjanjian pinjaman online yang ideal dalam ekonomi digital haruslah mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen yang komprehensif. Dalam konteks ini, perjanjian pinjaman online seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontraktual yang mengikat secara hukum, tetapi juga sebagai alat yang menjamin hak-hak konsumen secara utuh (Ayub & Tarigan, 2024). Model yang ideal perlu mengintegrasikan mekanisme teknologi yang mutakhir, seperti *smart contracts* berbasis *blockchain*, guna memastikan bahwa semua klausul yang disepakati dieksekusi secara otomatis dan transparan, tanpa manipulasi yang dapat merugikan salah satu pihak.

Teknologi *blockchain* menawarkan transparansi dalam pengelolaan perjanjian pinjaman, karena sifatnya yang *desentralistik* dan tak dapat diubah, sehingga mencegah potensi kecurangan yang sering terjadi pada model perjanjian konvensional. Studi Rahman et al (2024) mengungkapkan bahwa di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Estonia, *smart contracts* telah digunakan dalam beberapa sektor keuangan untuk mengotomatisasi pelaksanaan perjanjian, termasuk pinjaman. Hal ini

tidak hanya mengurangi potensi sengketa terkait isi perjanjian, tetapi juga memastikan bahwa setiap pihak memahami kewajiban dan hak mereka sejak awal, tanpa adanya interpretasi sepihak dari penyedia layanan. Sehingga, penggunaan teknologi ini dalam model perjanjian pinjaman *online* di Indonesia akan sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Salah satu aspek kunci dari model perjanjian pinjaman *online* yang ideal adalah adanya ketentuan yang jelas terkait bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya. Menurut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung, menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama ketidakpuasan konsumen dalam layanan pinjaman *online* adalah ketidakjelasan mengenai besaran bunga dan denda. Di Indonesia, hal ini juga menjadi sumber utama pengaduan konsumen. Perjanjian yang ideal harus mengakomodasi transparansi penuh mengenai besaran bunga, metode penghitungan, dan denda yang dikenakan jika terjadi keterlambatan pembayaran. Setiap klausul yang terkait dengan hal tersebut harus mudah dipahami oleh konsumen, dan bahkan harus disertai dengan simulasi pembayaran agar konsumen dapat memahami implikasi dari perjanjian sebelum menandatangani (BPSK, 2024).

Selain itu, perjanjian ideal ini harus mencakup ketentuan yang jelas terkait penyelesaian sengketa. Banyak kasus di mana penyedia layanan pinjaman online menggunakan cara-cara *intimidatif* dalam menagih hutang, yang kerap kali tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian awal (Ranaivo, 2024). Pasal 17 UU 8/1999 menyebutkan hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan dari layanan yang merugikan, termasuk penyelesaian sengketa yang efisien dan berkeadilan. singkatnya, model perjanjian ini perlu mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan tidak memberatkan konsumen, seperti penyelesaian melalui arbitrase *online* atau lembaga mediasi yang diawasi oleh pemerintah.

Adapun strategi aksesibilitas pemahaman konsumen menjadi elemen yang tidak kalah penting dalam memperkuat perlindungan konsumen. Tidak dapat dipungkiri, literasi digital di Indonesia masih tergolong rendah, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang sering kali menjadi target utama layanan pinjaman online. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2023 menyebutkan bahwa meskipun pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 78 persen, literasi digital masih menjadi tantangan besar (APJII, 2023). Sehingga strategi literasi digital harus dijalankan bersamaan dengan pengembangan model perjanjian yang ideal.

Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah melalui program edukasi literasi digital yang difasilitasi oleh pemerintah dan pelaku industri keuangan digital. Program ini harus dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan risiko dari perjanjian pinjaman online. Contoh program yang dapat diadaptasi adalah inisiatif dari Uni Eropa yang menggabungkan kampanye literasi digital dengan penyuluhan keuangan dasar bagi konsumen layanan digital (Esma News, 2022). Dengan mengadopsi pendekatan yang serupa, diharapkan konsumen di Indonesia dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian pinjaman *online*, sehingga mampu membuat keputusan yang lebih bijak dan terinformasi.

Di samping itu, inovasi teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan aksesibilitas pemahaman konsumen. Penggunaan aplikasi atau platform edukasi interaktif yang menjelaskan konsep dasar perjanjian pinjaman dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti dapat menjadi solusi efektif, terdapat fitur simulasi pinjaman dan kalkulator kredit. Pelaku industri *fintech*, dalam hal ini, dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan alat bantu edukasi yang terintegrasi langsung ke dalam aplikasi pinjaman online, sehingga konsumen dapat memahami risiko dan hak mereka sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan tersebut.

Secara keseluruhan, model perjanjian pinjaman *online* yang ideal dan strategi aksesibilitas pemahaman konsumen harus dirancang dalam kerangka hukum yang jelas dan dilengkapi dengan dukungan teknologi yang transparan. Integrasi antara perlindungan konsumen, teknologi informasi, dan edukasi yang luas akan menciptakan ekosistem pinjaman online yang aman, transparan, dan adil, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan konsumen dalam ekonomi digital yang sedang tumbuh di Indonesia.

## **Kesimpulan dan Saran**

Dengan maraknya kasus *fintech* dalam ranah pinjaman *online* saat ini, yang cukup mengganggu psikis hingga fisik konsumen, artikel ini harus menjadi perhatian bersama, bahwa pandangan sepele mengenai Era Digital perlu mendapatkan perhatian juga dalam payung hukum terhadap perlindungan konsumen. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah menyediakan kerangka hukum yang relevan, implementasi keduanya dalam tataran praktis masih menghadapi kendala signifikan.

UU PK, sebagai payung hukum yang mengatur perlindungan konsumen secara umum, belum mengakomodasi prinsip-prinsip khusus yang relevan dengan dinamika digital, yang membuat celah bagi pelaku industri untuk mengeksploitasi ketidaktegasan hukum dalam ranah transaksi online. Ketidakjelasan ini membuka peluang untuk praktik tidak etis yang merugikan konsumen, seperti manipulasi data pribadi dan penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, pengintegrasian ketentuan dari UU PK dengan prinsip-prinsip dalam UU PDP dapat menjadi langkah awal yang krusial dalam memperkuat perlindungan konsumen di era digital, serta menjamin terciptanya sistem yang lebih adil dan transparan dalam perdagangan online. Hal ini tidak hanya membutuhkan keselarasan normatif antara kedua undang-undang, tetapi juga pengawasan yang efektif dalam implementasinya agar tujuan perlindungan konsumen dapat terwujud secara optimal. Sejalan dengan itu, pengintegrasian teknologi seperti *blockchain* dan *smart contracts*, menawarkan manfaat substansial sekaligus menimbulkan tantangan yang memerlukan manajemen cermat bersamaan dengan tingkat literasi digital di Indonesia yang masih rendah, sehingga konsentrasinya harus disisihkan dalam membangun strategi edukasi literasi digital yang masif untuk menciptakan ekosistem digital yang adil, aman, dan berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian dalam artikel ini mengusulkan beberapa langkah untuk memperkuat perlindungan konsumen di era digital. Pertama, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri fintech diperlukan untuk membangun kerangka hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, dengan memastikan *meaningful participations*. Kedua, revisi UU 8/1999 sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi tantangan baru di ranah digital. Saat ini, pengaturan mengenai penyalahgunaan data pribadi, praktik bisnis merugikan, penggunaan klausula baku, dan penagihan yang tidak etis belum sepenuhnya mencakup dinamika transaksi online yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, regulasi yang lebih ketat dan tegas sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan hak konsumen secara menyeluruh. Meski demikian, revisi UU ini tidak harus bersifat mandatori secara menyeluruh, karena aturan teknis yang ada sebenarnya sudah cukup efektif jika diimplementasikan dengan ketat dan diawasi secara lebih menyeluruh. Dengan kata lain, penguatan pengawasan serta pemutakhiran ketentuan yang relevan lebih penting dibandingkan sekadar perubahan formal dalam undang-undang. *Ketiga*, strategi literasi digital harus diperluas melalui kampanye edukasi nasional yang melibatkan pemerintah, pelaku

industri *fintech*, dan lembaga pendidikan, agar konsumen dapat membuat keputusan yang bijak dan terinformasi. Edukasi ini dapat difasilitasi melalui alat bantu interaktif dalam aplikasi/ tools *fintech* yang mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat dengan difasilitasi fitur simulasi pinjaman dan kalkulator kredit.

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang telah mendanai penelitian tim penulis melalui Program Hibah Penelitian Dasar Fundamental periode 2024, hingga akhirnya menjadi bahan penulisan artikel ini.

## Daftar Pustaka

- Akbar, E. R. A (2024). Analisis perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Fatwa Hukum*. Retrieved September 18, 2024, from <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/78468>
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- APJII. (2023). *Survei APJII pengguna internet di Indonesia tembus 215 juta orang*. Retrieved September 19, 2024, from <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak permasalahan pinjaman online dan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87.
- Ayub, H. H., & Tarigan, T. M. (2024). Consumer protection regarding online loan cartels Ibnu Taimiyah's perspective. *Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy*, 2(1), 65–73.
- Binmore, K. (2021). Jeremy Bentham versus John Stuart Mill. In K. Binmore (Ed.), *Imaginary philosophical dialogues: Between Sages down the Ages* (pp. 95–99). Cham: Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-65387-3\\_18](https://doi.org/10.1007/978-3-030-65387-3_18)
- BPSK. (2024). *Wawancara penelitian dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) [Interview]*. Retrieved July 26, 2024.
- Correia, F., Martins, A., & Waikel, A. (2022, July 1). Online financing without FinTech: Evidence from online informal loans. *Journal of Economics and Business*, 121, 106080.

- Esma News. (2022). *Financial education and literacy: A priority for the ESAs*. Retrieved September 19, 2024, from <https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/financial-education-and-literacy-priority-esas>
- Huang, L., & Pontell, H. N. (2023). Crime and crisis in China's P2P online lending market: A comparative analysis of fraud. *Crime, Law and Social Change*, 79(4), 369–393.
- Karina, D., Sa'diyah, S. A., Nabilah, H., & Panorama, M. (2022). Pengaruh perusahaan startup terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pandemi Covid-19. *Berajah Journal*, 2(1), 156–166.
- Kurniawati, H., & Yunanto, Y. (2022). Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi debitur dalam aktivitas pinjaman online. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 102–114.
- Novita, Y. D., & Santoso, B. (2021). Urgensi pembaharuan regulasi perlindungan konsumen di era bisnis digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 46–58.
- OJK. (2024). *Wawancara penelitian dengan Otoritas Jasa Keuangan*.
- Politou, E., Alepis, E., Virvou, M., & Patsakis, C. (2022). The general data protection regulation. In E. Politou, E. Alepis, M. Virvou, & C. Patsakis (Eds.), *Privacy and data protection challenges in the distributed era* (pp. 13–39). Cham: Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-85443-0\\_3](https://doi.org/10.1007/978-3-030-85443-0_3)
- Poncibò, C. (2022). The digitalization of contracts in international trade and finance: Comparative law perspectives on smart contracts. In M. Ratajczak-Mrozek & P. Marszałek (Eds.), *Digitalization and firm performance: Examining the strategic impact* (pp. 131–155). Cham: Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-83360-2\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-030-83360-2_6)
- Prayuti, Y. (2023a). *Hukum perlindungan konsumen* (Edisi pertama, cetakan ke-1). CV. Madza Media. Retrieved from <https://isbn.perpusnas.go.id/kdt/viewkdt?id=1223002956>
- Prayuti, Y. (2023b). Urgensi pembaruan hukum perlindungan konsumen dengan pembentukan pengadilan khusus sebagai upaya pemenuhan akses terhadap keadilan bagi konsumen. *UNES Law Review*, 6(1), 2181–2192.
- Prayuti, Y. (2024). Dinamika perlindungan hukum konsumen di era digital: Analisis hukum terhadap praktik e-commerce dan perlindungan data konsumen di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 5(1).

- Putra, A. H., & Waluyo, W. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online berkeadilan dan kepastian hukum. *Jurnal HPE*, 11(1), 118.
- Rahman, F., Titouna, C., & Nait-Abdesselam, F. (2024). Fundamentals of blockchain and smart contracts. In N. El Madhoun, I. Dionysiou, & E. Bertin (Eds.), *Blockchain and smart-contract technologies for innovative applications* (pp. 3–37). Cham: Springer Nature Switzerland. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-50028-2\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-031-50028-2_1)
- Ranaivo, M. M. R. (2024). Illegal online loan (Pinjol) in Indonesia: Ethical and human rights perspectives. *Recht Studiosum Law Review*, 3(1), 58–76.
- Rizkia, N., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode penelitian hukum (normatif dan empiris)* (Cetakan pertama). Widina Media Utama.
- Suliantoro, A., Andraini, F., Saputra, A., & Suciyaningsih. (2024). Pencegahan penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden* atau *undue influence* dalam Undang–Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 10(2), 76–91.

# **Identifikasi Diskusi Publik di Media Massa Terkait Kendaraan Listrik di Indonesia Menggunakan *Latent Dirichlet Allocation***

**Paskalis Krisna Puspadewa, Yun Prihantina Mulyani**

Departemen Teknik Mesin dan Industri, Universitas Gadjah Mada

paskaliskrisnapuspadewa@mail.ugm.ac.id

## **Abstrak**

Pengembangan ekosistem kendaraan listrik merupakan salah satu solusi dalam mengatasi perubahan iklim yang terjadi di dunia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mendorong percepatan pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Diskusi publik terkait kendaraan listrik seperti di media massa dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dalam proses percepatan pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi topik yang didiskusikan di publik terkait kendaraan listrik di media massa menggunakan metode pemodelan topik yaitu *Latent Dirichlet Allocation*. Data berita dari berbagai media massa online di Indonesia didapatkan sebanyak 5478 artikel berita pada periode 1 Juli – 31 Desember 2023. Hasil dari pemodelan topik menggunakan LDA didapatkan 5 topik diskusi publik di media massa terkait kendaraan listrik di Indonesia, masalah polusi udara dan upaya penyelesaiannya (8.6%), investasi Pengolahan Nikel menjadi Baterai Kendaraan Listrik di Indonesia (10.5%), subsidi motor listrik (7.3%), peluncuran mobil listrik (47.2%), pengembangan industri kendaraan listrik (26.5%). Perbedaan periode artikel berita yang digunakan pada penelitian ini dapat berubah seiring berkembangnya kemajuan kendaraan listrik. Penelitian di masa mendatang dapat membandingkan perbedaan topik yang didiskusikan berdasarkan garis waktu tertentu.

*Kata Kunci: Pemodelan Topik, Latent Dirichlet Allocation, Media Massa, Diskusi Publik, Kendaraan Listrik*

## Pendahuluan

Bumi mengalami kenaikan suhu hingga 2 derajat celcius dari tahun 1940 – 2023 akibat emisi gas rumah kaca (Copernicus, 2023). Emisi gas rumah kaca datang dari berbagai sektor salah satunya sektor transportasi yang menyumbang sebesar 15% dari total keseluruhan emisi gas rumah kaca secara global (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023). Permasalahan emisi gas rumah kaca seperti ini sudah menjadi permasalahan global dan perlu adanya tindakan nyata untuk menahan laju kenaikan suhu bumi.

Kendaraan listrik seperti mobil listrik untuk penggunaan pribadi maupun taksi dan bus listrik menjadi salah satu solusi yang dapat menurunkan emisi gas rumah kaca (Alimujiang & Jiang, 2020). Pemerintah Indonesia melalui Perpres No. 55 Tahun 2019 melakukan percepatan pembangunan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai sebagai wujud untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 2022). Rencana dari pengembangan KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai), terdapat 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit motor listrik di Indonesia pada tahun 2030 (Anshori, 2023).

Proses percepatan ekosistem kendaraan listrik perlu didukung kebijakan dan strategi agar masyarakat ingin beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Kebijakan dan strategi dengan memperhatikan kekhawatiran atau persepsi publik terkait respon terhadap kendaraan listrik mampu mempercepat proses adopsi kendaraan listrik (Ruan & Lv, 2022). Terdapat beberapa data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekhawatiran atau persepsi publik seperti pada media sosial dan media massa.

Identifikasi topik diskusi publik dapat dilakukan dengan pemodelan topik. Salah satu untuk melakukan pemodelan topik dapat dilakukan dengan metode *Latent Dirichlet Allocation* (LDA). Penggunaan metode LDA sudah banyak digunakan untuk memodelkan topik dari data media sosial (Ruan & Lv, 2022; Anwar dkk., 2022) dan media massa (Bohn & Rogge, 2022). Penelitian Anwar dkk. (2022) menggunakan LDA secara spesifik untuk mengidentifikasi topik diskusi publik di media sosial terkait kendaraan listrik di Indonesia. Hasil penelitian Anwar dkk. (2022) efektif untuk menghasilkan 5 topik utama terkait kendaraan listrik di Indonesia dari media sosial X (Twitter).

Penggunaan data media massa untuk mengidentifikasi topik diskusi publik terkait kendaraan listrik di Indonesia belum pernah dilakukan

sebelumnya. Perbedaan topik yang didiskusikan oleh publik di media sosial dan media massa dapat terjadi diantara kedua media (Schreiber, dkk., 2023). Identifikasi topik menggunakan data media massa dapat dimungkinkan memberikan persepsi publik yang berbeda dari publik di media sosial terkait kendaraan listrik di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi topik diskusi publik di media massa terkait kendaraan listrik di Indonesia.

## Metode

Pemodelan topik dengan metode LDA digunakan untuk mengidentifikasi topik diskusi publik di media massa terkait kendaraan listrik di Indonesia. Data menggunakan artikel berita dari media massa daring di Indonesia yang membahas kendaraan listrik di Indonesia. Beberapa tahapan dasar dalam pemodelan topik dilakukan untuk menjaga kualitas topik yang dihasilkan metode LDA. Semua proses tahapan pengumpulan artikel berita dan pemodelan topik ini menggunakan bahasa pemrograman Python.

Tahapan pertama dilakukan dengan mengumpulkan artikel berita dari media massa daring yang ada di Indonesia terkait kendaraan listrik. Proses pengumpulan mendapatkan total 5478 artikel berita yang terbit dari tanggal 1 Juli – 31 Desember 2023. Artikel berita diambil dari media massa daring Detik.com, Kompas online, CNNIndonesia.com, Liputan 6, dan Metro TV News yang masuk ke dalam media massa daring yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia dalam laporan bertajuk Digital News Report 2023 (Steele, 2023). Selain itu, artikel berita diambil dari media massa Grid.Oto, AutoNetMagz, dan Otosia sebagai media massa daring otomotif.

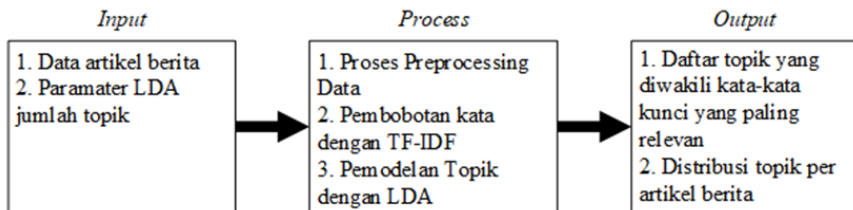
Tahapan kedua melakukan *pre-processing* untuk menghilangkan gangguan atau data teks yang tidak berarti. Terdiri dari proses *data cleaning*, *case folding*, *remove punctuation*, *stopword removal*, *lemmatization*, dan *tokenization*. Hasil dari tahapan ini akan memberikan serangkaian dokumen artikel berita dengan kata-kata yang lebih bersih atau memiliki makna tertentu.

Tahapan ketiga melakukan pemodelan topik dengan metode LDA. Sebelum dilakukan proses pemodelan topik, dilakukan pembobotan kata dengan *Term Frequency-Inverse Document Frequency* (TF-IDF). Terdapat beberapa parameter yang diatur pada kondisi *default* dan jumlah topik yang dihasilkan sebanyak lima topik. Parameter jumlah topik ditentukan sebanyak

lima topik dipilih agar nantinya dapat dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang menggunakan data media sosial. Tahapan ini dapat dilihat dalam diagram *input, process, output* yang dapat dilihat pada Gambar 1.

### Gambar 1

Diagram *Input, Process, Output* Penelitian



Daftar topik yang diwakili kata-kata yang paling relevan selanjutnya akan analisis untuk diberikan judul topik secara manual. Pemberian judul topik juga berdasarkan dari analisis artikel-artikel berita yang paling relevan mewakili topik berdasarkan distribusi topik per artikel berita.

## Hasil dan Pembahasan

Proses pemodelan topik diskusi publik di media massa terkait kendaraan listrik di Indonesia dengan jumlah 5 topik diwakili 10 kata kunci yang paling relevan dengan masing-masing topik, yaitu:

### 1. Masalah Polusi Udara dan Upaya Penyelesaiannya (8.6%)

Topik ini memiliki beberapa kata kunci seperti “polusi udara”, “jokowi”, “kualitas udara”, “dki jakarta”, “tesla”, “luhut”, “kota”, “transportasi”, “bus”, “udara”. Topik 1 berisi artikel berita yang memberitakan terkait permasalahan polusi udara dan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Media massa secara spesifik banyak memberitakan terkait polusi udara yang terjadi di DKI Jakarta. Artikel-artikel berita memberitakan terkait dampak kerugian dari polusi udara terutama pada bidang kesehatan serta upaya pemerintah untuk mengurangi polusi udara salah satunya dengan penggunaan kendaraan listrik.

Salah satu artikel berita dengan persentase distribusi topik 1 terbesar memiliki judul berita “Perang Bahu-membahu Lawan Polusi Udara” (Purba, 2023). Artikel berita tersebut menyebutkan bahwa salah satu penyebab dari polusi udara di Jakarta adalah sektor transportasi.

Kendaraan pribadi konvensional dengan sistem pembakaran menghasilkan CO<sub>2</sub> yang menyebabkan terjadinya polusi udara di Jakarta. Terdapat beberapa cara untuk mengurangi polusi udara yang perlu dilakukan secara masif seperti menggunakan transportasi umum berbasis listrik, uji emisi untuk mobil dan sepeda motor, uji emisi untuk cerobong asap di industri, dan tidak melakukan pembakaran sampah. Pemerintah juga harus memulai secara serius proses transisi energi dari pembangkit listrik batu bara menjadi energi terbarukan, serta memperbanyak taman kota sebagai paru-paru kota di semua wilayah perkotaan.

Artikel berita lainnya memiliki judul berita “Mendagri Terbitkan Aturan Pengendalian Pencemaran Udara untuk Wilayah Jabodetabek” (Nugraheny & Santosa, 2023). Pemerintah melalui Mendagri menerbitkan aturan yang berisi upaya pengendalian pencemaran udara di wilayah Jabodetabek yang tertuang dalam instruksi mendagri Nomor 2 Tahun 2023. Terdapat beberapa aturan yang diterapkan seperti sistem kerja WFH (Work From Home) dan WFO (Work From Office), penggunaan transportasi umum dan/atau kendaraan listrik bagi karyawan yang WFO, dan sebagainya.

## 2. Investasi Pengolahan Nikel menjadi Baterai Kendaraan Listrik di Indonesia (10.5%)

Topik ini memiliki beberapa kata kunci seperti “asean”, “sepeda listrik”, “jokowi”, “investasi”, “nikel”, “negara”, “kerja”, “as” “australia”. Topik 2 berisi artikel berita terkait investasi pada hilirisasi nikel di Indonesia yang memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. Artikel berita memberitakan perekonomian kawasan ASEAN akan tumbuh dengan sektor kendaraan listrik sebagai pendorong utama. Pemerintah Indonesia dalam beberapa artikel sudah melakukan upaya untuk menarik investor asing dalam pengolahan nikel menjadi baterai listrik.

Artikel berita dengan kontribusi distribusi topik 2 terbesar memiliki judul “Konsistensi Hilirisasi SDA untuk Percepatan Transformasi Ekonomi” (Soesatyo, 2023) yang membahas pentingnya hilirisasi SDA (sumber daya alam) Indonesia. Pengolahan SDA dari bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah dapat mendorong perekonomian Indonesia. Salah satunya perusahaan baterai kendaraan listrik asal China yang menjalin kerja sama dengan Indonesia dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik meliputi memproduksi,

memasok, sampai mendaur ulang baterai kendaraan listrik (Kurniawan & Kurniawan, 2023).

Pengembangan industri kendaraan listrik yang dilakukan Indonesia juga dilakukan di kawasan ASEAN yang memiliki tujuan sebagai hub global kendaraan listrik. Salah satu artikel berita memberitakan ekonomi kawasan ASEAN diproyeksikan mencapai 4,6% pada 2023, dengan sektor kendaraan listrik sebagai salah satu yang mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut melalui investasi dari asing, pembukaan lapangan kerja baru, dan meningkatkan perdagangan (Adhitiawarman, 2023). Dijelaskan dalam artikel berita tersebut Indonesia dengan SDA yang berlimpah memiliki potensi besar berkontribusi dalam produksi baterai dan komponen kendaraan listrik yang dapat dimanfaatkan kawasan ASEAN untuk memperkuat posisi kawasan di pasar global.

3. Subsidi Motor Listrik (7.3%)

Topik ini memiliki beberapa kata kunci seperti “subsidi”, “rp 7”, “beli”, “konversi”, “rp” “masyarakat”, “konversi motor”, “unit”, “syarat”, “sepeda motor”. Artikel berita yang termasuk dalam topik 3 membahas terkait subsidi motor listrik sebesar 7 juta rupiah. Diberitakan oleh berbagai media massa, terdapat perubahan syarat penerima subsidi motor listrik pada periode waktu pengambilan artikel berita. Tujuannya untuk mempercepat penyerapan subsidi dalam rangka percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Judul berita dari artikel berita dengan kontribusi distribusi topik 3 terbesar yaitu “Subsidi Motor Listrik Rp 7 Juta Dibuka untuk Umum” (Sari & Sukmana, 2023). Artikel berita tersebut memberitakan adanya perubahan syarat subsidi listrik pada bulan Agustus 2023. Terdapat 4 syarat yang dihapus yaitu, UMKM penerima KUR, penerima bantuan produktif usaha mikro, penerima subsidi upah, dan penerima subsidi listrik dengan daya 450VA hingga 900VA. Syarat lalu dipermudah hanya dengan pengajuan KTP elektronik untuk mendapatkan subsidi satu motor listrik. Tujuannya untuk mencapai kuota subsidi motor listrik sebanyak 200.000 unit di tahun 2023.

4. Peluncuran Mobil Listrik (47.2%)

Topik ini memiliki beberapa kata kunci seperti “honda”, “rp”, “harga”, “ev”, “model”, “wuling”, “luncur”, “konsumen”, “air ev”, “wuling air”. Topik 4 berisi artikel berita yang membahas perkembangan mobil listrik dengan semakin banyak pemain. Terdapat produsen Honda dan

Wuling yang cukup banyak diberitakan berbagai media massa. Selain itu, terdapat produsen lain yang menawarkan berbagai model dengan variasi harga yang dapat menyesuaikan kebutuhan konsumen.

Artikel berita dengan kontribusi distribusi topik 4 terbesar berjudul "Pilihan Mobil Listrik di Bawah Rp 500 Juta" (Liputan6.com, 2023). Berita tersebut menjelaskan terkait spesifikasi dan harga dari beberapa model mobil listrik seperti Wuling Air EV, DFSK Seres E1, Neta V, Citroen e-C3, dan DFSK Gelora E. Diberitakan pada artikel berita lainnya model-model mobil listrik lainnya (Priyantoro & Kurniawan, 2023) sehingga menambah deretan pilihan mobil listrik bagi masyarakat untuk berpindah ke kendaraan listrik. Beberapa media massa juga menguji coba kendaraan listrik untuk memberikan informasi terkait pengalaman berkendara dengan mobil listrik seperti mobil Wuling Binguo yang diperkenalkan pada bulan November 2023 (Otosia.com, 2023).

#### 5. Pengembangan Industri Kendaraan Listrik (26.5%)

Topik ini memiliki beberapa kata kunci seperti "produksi", "byd", "pabrik", "hyundai", "ev", "china", "usaha", "spklu", "unit", "insentif". Topik 5 berisi beberapa artikel usaha Pemerintah Indonesia dalam mempercepat pengembangan industri kendaraan listrik untuk mempercepat proses transisi kendaraan listrik. Terdapat beberapa langkah oleh Pemerintah Indonesia dengan meningkatkan produksi kendaraan listrik, pembangunan infrastruktur SPKLU, dan dukungan insentif. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan adopsi kendaraan listrik oleh masyarakat.

Artikel berita dengan kontribusi distribusi topik 5 memiliki judul berita "Raksasa Otomotif China Bakal Bikin Mobil Listrik Merek Lokal di Indonesia" (Deny, 2023). Diberitakan Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan perusahaan otomotif asal China bernama Geely untuk memproduksi mobil listrik lokal di Indonesia. Investor asing juga dibantu dengan insentif fiskal seperti tax holiday hingga 20 tahun dan pembebasan PPN atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor. Insentif tersebut diharapkan dapat menarik perusahaan otomotif lain seperti BYD untuk berinvestasi di Indonesia (Amani, 2023).

## **Perbandingan Topik di Media Massa dan Media Sosial X**

Penelitian yang dilakukan Anwar dkk. (2022) menghasilkan lima topik utama yang didiskusikan di media sosial yaitu X (Twitter). Tabel 1 menampilkan perbandingan 10 kata kunci dari masing-masing topik hasil pemodelan topik di media massa dan media sosial. Penelitian yang dilakukan Anwar dkk. (2022) mengambil data dari media sosial X pada periode waktu 3 Februari – 9 Maret 2022. Hasil penelitian tersebut menunjukkan empat dari lima topik berisi lebih banyak tweet yang diunggah oleh akun portal media massa. Oleh sebab itu, antara penelitian yang dilakukan oleh Anwar dkk. (2022) dan penelitian ini menunjukkan adanya perubahan topik diskusi pada dua periode waktu berbeda seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Secara garis besar, Pemerintah Indonesia dari tahun 2022 ke tahun 2023 terjadi perubahan dari yang sebelumnya berupa rencana pengembangan menjadi implementasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Topik diskusi di media sosial X pada awal 2022 lebih banyak membahas terkait awal mula pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang berfokus pada rencana pengembangan dan pembangunan infrastruktur SPKLU atau pengisian daya kendaraan listrik. Sedangkan pada pertengahan tahun hingga akhir tahun 2023 atau tahun berikutnya lebih banyak membahas terkait produk kendaraan listrik itu sendiri seperti mobil dan motor listrik serta implementasi program pemerintah. Program percepatan mulai diimplementasikan untuk mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik dengan berbagai program salah satunya subsidi pembelian kendaraan listrik. Program dari Pemerintah Indonesia juga tidak berfokus pada masyarakat tetapi juga pada investor yang bergerak pada ekosistem kendaraan listrik untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Artikel berita pada periode ini lebih banyak membahas mobil listrik dibandingkan motor listrik.

**Tabel 1**

Perbandingan 10 Kata Kunci Topik antara Media Massa dan Media Sosial

Media Massa		Media Sosial	
Persentase	10 Kata Kunci	Judul Topik	10 Kata Kunci
47,2 %	<i>honda, rp, harga, ev, model, wuling, luncur, konsumen, air ev, wuling air</i>	Peluncuran Mobil Listrik	Ekosistem, kembang, energi, pln, cepat, Pertamina, kolaborasi, perintah, presiden, dukung
26,5 %	<i>produksi, byd, pabrik, hyundai, ev, china, usaha, spklu, unit, insentif</i>	Pengembangan Industri Kendaraan Listrik	Masuk, motor, mobil, Ekosistem, dukung, spklu, Jokowi, operasi, lingkungan, Jakarta
10,5 %	<i>asean, sepeda listrik, Jokowi, investasi, nikel, negara, kerja, as, australia</i>	Investasi Pengolahan Nikel di Indonesia	Bumn, menteri, kembang, industri, erick, thohir, motor, nyata, wujud, negara
8,6 %	<i>polusi udara, Jokowi, kualitas udara, dki Jakarta, tesla, luhut, kota, transportasi, bus, udara</i>	Masalah Polusi Udara dan Upaya Penyelesaiannya	Isi, stasiun, mudah, layan, tukar, spklu, fasilitas, Pertamina, baterai, masyarakat, spklu
7,2 %	<i>subsidi, rp 7, beli, konversi, rp masyarakat, konversi motor, unit, syarat, sepeda motor</i>	Subsidi Motor Listrik	Investasi, produksi, mobil, baterai, basis, barat, motor, hijau, Jawa, dukung

## Kesimpulan dan Saran

Terdapat lima topik utama, yaitu masalah polusi udara dan upaya penyelesaiannya (8.6%), investasi Pengolahan Nikel menjadi Baterai Kendaraan Listrik di Indonesia (10.5%), subsidi motor listrik (7.3%), peluncuran mobil listrik (47.2%), pengembangan industri kendaraan listrik (26.5%). Diskusi publik pada media massa tahun 2023 telah berkembang dibandingkan topik yang didiskusikan di X (Twitter) pada tahun 2022 dan terlihat adanya kemajuan dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Topik diskusi publik di media massa terkait kendaraan listrik di Indonesia lebih banyak membahas hal yang berkaitan dengan produk kendaraan listrik terutama mobil listrik. Pada periode pengambilan data, diketahui sudah semakin banyak pilihan produk kendaraan listrik didukung dengan program Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan minat masyarakat membeli kendaraan listrik. Pemerintah Indonesia juga berfokus mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dan meningkatkan ekonomi dengan menarik banyak investor asing sehingga proses pembuatan komponen hingga perakitan kendaraan listrik dapat dilakukan di Indonesia.

Diskusi publik terkait kendaraan listrik di masa mendatang berpotensi lebih banyak membahas kondisi penggunaan kendaraan listrik. Potensi tersebut muncul karena pada periode pengambilan data banyak artikel berita yang memberitakan terkait peluncuran produk kendaraan listrik seperti mobil listrik dan motor listrik. Perbedaan kedua periode waktu juga memberikan gambaran terus berkembangnya teknologi kendaraan listrik terutama di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian di masa mendatang dapat membandingkan perbedaan topik yang didiskusikan berdasarkan garis waktu tertentu. Kebijakan dan strategi pemerintah juga harus dinamis mengikuti kekhawatiran atau persepsi publik untuk mempercepat proses adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Adhitiawarman, D. (2023, November 21). Ekonomi ASEAN semakin kuat, ini potensi dan prospeknya. *Detik.com*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7047997/ekonomi-asean-semakin-kuat-ini-potensi-dan-prospeknya>
- Alimujiang, A., & Jiang, P. (2020). Synergy and co-benefits of reducing CO2 and air pollutant emissions by promoting electric vehicles—A

- case of Shanghai. *Energy for Sustainable Development*, 55, 181–189. <https://doi.org/10.1016/j.esd.2020.02.005>
- Amani, N. K. (2023, November 7). Ini dia keuntungan pakai kendaraan listrik, mulai segi biaya hingga lingkungan. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5446714/ini-dia-keuntungan-pakai-kendaraan-listrik-mulai-segi-biaya-hingga-lingkungan>
- Anshori, L. (2023, November 21). Ternyata segini jumlah kendaraan listrik di Indonesia. *Detik.com*. <https://oto.detik.com/kendaraan-listrik/d-7048461/ternyata-segini-jumlah-kendaraan-listrik-di-indonesia>
- Anwar, M. T., Utami, M. P., Ambarwati, L., & Arohman, A. W. (2022). Identifying social media conversation topics regarding electric vehicles in Indonesia using Latent Dirichlet Allocation. *Proceedings - 2022 IEEE International Conference on Cybernetics and Computational Intelligence, CyberneticsCom 2022*, 102–106. <https://doi.org/10.1109/CyberneticsCom55287.2022.9865493>
- Bohn, S., & Rogge, J.-C. (2022). The framing of green innovations—A comparative topic modeling study on the public frames of the electric vehicle in Germany and UK. *Journal of Cleaner Production*, 364. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132499>
- Copernicus. (2023, November 21). Global temperature exceeds 2°C above pre-industrial average on 17 November. *Copernicus*. <https://climate.copernicus.eu/global-temperature-exceeds-2degc-above-pre-industrial-average-17-november>
- Deny, S. (2023, September 14). Raksasa otomotif China bakal bikin mobil listrik merek lokal di Indonesia. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5397386/raksasa-otomotif-china-bakal-bikin-mobil-listrik-merek-lokal-di-indonesia>
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). Climate change 2023: Synthesis report. <https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647>
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2022, Februari 23). Kemenperin dukung akselerasi ekosistem kendaraan listrik. *Kementerian Perindustrian Republik Indonesia*. <https://kemenperin.go.id/artikel/23140/Kemenperin-Dukung-Akselerasi-Ekosistem-Kendaraan-Listrik>
- Kurniawan, R., & Kurniawan, A. (2023, Desember 12). Pertama di dunia, China resmi investasi ekosistem baterai EV di RI. *Kompas.com*.

- <https://otomotif.kompas.com/read/2023/12/29/080200115/pertama-di-dunia-china-resmi-investasi-ekosistem-baterai-ev-di-ri>
- Liputan6.com. (2023, November 7). Pilihan mobil listrik di bawah Rp 500 juta. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/otomotif/read/5446800/pilihan-mobil-listrik-di-bawah-rp-500-juta>
- Nugraheny, D.E., & Santosa, B. (2023, Agustus 23). Mendagri terbitkan aturan pengendalian pencemaran udara untuk wilayah Jabodetabek. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/23/07374261/mendagri-terbitkan-aturan-pengendalian-pencemaran-udara-untuk-wilayah?page=all>
- Otosia.com. (2023, November 24). Pengalaman berkendara Wuling Binguo, kabinnya lega banget dan cocok buat upgrade!. *Otosia.com*. <https://www.otosia.com/review/read/5463970/pengalaman-berkendara-wuling-binguo-kabinnya-lega-banget-dan-cocok-buat-upgrade>
- Priyantoro, D.D., & Kurniawan, A. (2023, Agustus 25). Pilihan mobil listrik yang baru meluncur di Indonesia, ada 14 model. *Kompas.com*. <https://otomotif.kompas.com/read/2023/08/25/104200015/pilihan-mobil-listrik-yang-baru-meluncur-di-indonesia-ada-14-model?page=all>
- Purba, L.A.H. (2023, Agustus 25). Perang bahu-membahu lawan polusi udara. *CNNIndonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230824190413-21-990163/perang-bahu-membahu-lawan-polusi-udara>
- Ruan, T., & Lv, Q. (2022). Public perception of electric vehicles on Reddit over the past decade. *Communications in Transportation Research*, 2. <https://doi.org/10.1016/j.commt.2022.100070>
- Sari, H.P., & Sukmana, Y. (2023, Agustus 30). Subsidi motor listrik Rp 7 juta dibuka untuk umum. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2023/08/30/075217726/subsidi-motor-listrik-rp-7-juta-dibuka-untuk-umum?page=all>
- Schreiber, J., Scherrer, A., & Breetz, H. L. (2023). Driving discussion: media framing of electric, hydrogen, and conventional vehicles in German Newspapers and Twitter. *Energy Research and Social Science*, 103. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.103193>
- Soesatyo, B. (2023, Juli 3). Konsistensi hilirisasi SDA untuk percepatan transformasi ekonomi. *Detik.com*. <https://news.detik.com/kolom/d-6802729/konsistensi-hilirisasi-sda-untuk-percepatan-transformasi-ekonomi>
- Steele, J. (2023). Digital news report 2023: Indonesia. <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2023/indonesia>

**Kajian *Tikarwe* (Tikar Rotan)  
sebagai *Home Industry* di Dusun Kopo,  
Desa Mungkin, Kecamatan Orong Telu,  
Kabupaten Sumbawa**

**Anindya Laksmi Larasati<sup>1</sup>, Eliya Nur Safitri<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Gadjah Mada, <sup>2</sup> Universitas Diponegoro  
laraslaksmi35@gmail.com; eliyanurs@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis *tikarwe* sebagai industri rumahan Dusun Kopo, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. dalam aspek ekonomi, sosial budaya, serta analisis Swot. Melalui desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menunjukkan bahwa *tikarwe* memiliki potensi sebagai media pemberdayaan masyarakat inklusif Dusun Kopo melalui pemanfaatan tumbuhan rotan sebagai sumber daya alam yang tumbuh liar di sekitar desa. Melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang ada maka dapat menciptakan masyarakat mandiri. Dalam segi kekuatan, *tikarwe* memiliki keotentikan bentuk, kekuatan dan keawetan bahan, serta fungsi *tikarwe* sebagai tikar rotan. Di sisi lain, realitas data lapangan menunjukkan bahwa *tikarwe* dihadapkan dengan tantangan regenerasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan promosi produk karena masalah aksesibilitas jaringan jalan & sinyal. Pada akhirnya, penelitian ini mengkritisi bagaimana pentingnya keterlibatan masyarakat desa sebagai upaya pemajuan ekonomi mikro sekaligus berimplikasi pada pelestarian budaya dan pemajuan pariwisata Sumbawa. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui (1) perbaikan aksesibilitas desa sehingga dapat memudahkan dalam distribusi dan promosi *tikarwe*, (2) pendokumentasian & pengarsipan pengetahuan lokal mengenai *tikarwe* sebagai upaya preventif terhadap ancaman regenerasi pelaku *tikarwe*, dan (3) pendaftaran *tikarwe*

sebagai bagian indikasi geografis Dusun Kopo, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

**Kata Kunci:** *Tikarwe, home industry, tikar, pemberdayaan, ekonomi inklusif.*

## **Pendahuluan**

Ekonomi merupakan aspek penting dalam menunjang kemajuan Indonesia sebagai negara berkembang. Berdasarkan data BPS dalam Profil Industri Mikro dan Kecil Tahun 2021–2023, jumlah pekerja di industri IMK meningkat setiap tahunnya. Jumlah pekerja meningkat 3,38% pada tahun 2022 dari jumlah pekerja 9.109.297 menjadi 9.416.779, dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2023 sebesar 4,54% dengan jumlah pekerja 9.843.840. Data tersebut membuktikan bahwa industri kecil berperan penting, terutama usaha rumahan atau *home industry*. *Home industry* mengacu pada bisnis skala kecil yang dioperasikan dari rumah, biasanya melibatkan tenaga kerja terbatas dan berfokus pada industri tertentu (Suminartini & Susilawati, 2020). Usaha berskala kecil ini berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kondisi ekonomi penduduk lokal dan mereka yang berpenghasilan rendah.

Dewasa ini, rotan merupakan salah satu bagian dalam produk lokal *home industry*. Mengutip melalui penelitian Mordor *Intelligence* (2024) dalam ukuran pasar global furnitur rotan, pada tahun 2024 diperkirakan mencapai USD 0,91 miliar dan diperkirakan akan mencapai USD 1,05 miliar pada tahun 2029. Produsen produk terbesar di dunia adalah Cina yang kemudian diikuti oleh Indonesia pada rentang tahun 2019 hingga 2022 dengan nilai ekspor furnitur Indonesia mencapai USD2,5 miliar. Menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam Profil Industri Mikro dan Kecil (2023), produk lokal rotan dan sejenisnya termasuk lima besar usaha dari industri mikro dan kecil. Data tersebut menunjukkan usaha rotan di Indonesia sangat besar.

Industri rotan sebagai *home industry* di tengah lanskap Indonesia yang dinamis, menunjukkan contoh sukses dari usaha kecil dapat mengubah potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan. Peranan *home industry* dapat dirasakan oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Munculnya *home industry* dalam sebuah komunitas atau wilayah akan memiliki peran yang besar terhadap lapangan kerja dan ekonomi dimana industri ini berdiri (Fadrillah et al., 2022). Begitupun menurut Mubyarto

dalam Lailatul Munawwaroh et al. (2024) yang menyatakan bahwa usaha kecil, terutama di daerah pedesaan dapat berperan penting dalam upaya mendorong kesetaraan dan pembangunan ekonomi pedesaan karena mereka dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan sumber pendapatan baru.

Peranan *home industry* berkaitan dalam pengembangan ekonomi inklusif. Menurut World Economic Forum (WEF) bahwa ekonomi inklusif adalah strategi peningkatan kinerja perekonomian dengan memperluas kemakmuran dan kesempatan ekonomi, dan memberi akses luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, ekonomi inklusif dalam konteks *home industry* memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses produksi dan distribusi, serta dapat merasakan manfaat ekonominya. Pengembangan ekonomi ini mendorong pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan keterampilan lokal. Selain itu, peranan *home industry*, terutama tikar rotan, tidak hanya memberikan manfaat dasar saja, melainkan bisa saja sebagai usaha pelestarian budaya lokal suatu masyarakat.

Eksistensi rotan sebagai produk lokal memiliki peran signifikan dalam ekonomi lokal di beberapa daerah di Indonesia. Sumber daya rotan yang melimpah salah satunya berada di Nusa Tenggara Barat. Industri rotan ketak di Lombok Tengah merupakan inovasi ekonomi lokal sebagai upaya pengembangan kearifan lokal di sektor *home industry* yang mana telah berkacah hingga mancanegara dengan beraneka modifikasi bentuk produk seperti tas, nampan, piring, hingga keranjang. Kekuatan nilai industri rotan ketak karena adanya keterlibatan perempuan, ramah lingkungan, memiliki jaringan bahan baku dan nilai lokal, serta jaringan pasar yang kuat (Asnita et al., 2020).

Berbeda dengan rotan ketak di Lombok Tengah, terdapat produk tikar rotan bernama *tikarwe* yang berada di Dusun Kopo, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Hanya saja, keberadaan *tikarwe* Sumbawa tidak sekecil industri rotan ketak di Lombok. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian secara spesifik yang mengkaji *tikarwe* sebagai *home industry*. Kekosongan penelitian tersebut menjadi dasar penting untuk dilakukannya penelitian yang berfokus pada aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*). Penelitian ini mencoba memadukan konteks pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi inklusif sehingga penelitian mengenai *tikarwe* menjadi semakin relevan. Dengan demikian, peneliti memberikan judul “Kajian Tikar

Rotan (*Tikarwe*) sebagai *Home Industry* di Dusun Kopo, Desa Mungkin, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa.”

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan & menganalisis *tikarwe* sebagai *home industry* Dusun Kopo, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dalam aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*). Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam pelestarian budaya dan pengembangan produk lokal yang pada akhirnya berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## Metode

Penelitian dilakukan di Dusun Kopo, Desa Mungkin, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dengan desain kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Sampel penelitian dipilih melalui *purposive sampling* yaitu pengrajin *tikarwe* karena dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Sumber data didapatkan melalui wawancara mendalam dan observasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data sehingga dapat diperoleh pemahaman yang mendalam berupa deskriptif. Triangulasi penelitian dilakukan dengan menggabungkan beberapa sumber data meliputi wawancara, catatan lapangan, dan observasi.

## Hasil dan Pembahasan



*Tikarwe*

Sumber: Dokumentasi penulis (2024)

Jamaludin, seorang pengrajin tikar rotan, menceritakan perjalanannya yang sudah tiga dekade lamanya bergelut dalam bidang ini. Produk kerajinan tersebut dikenal dengan sebutan “*tikarwe*” dalam bahasa Sumbawa yang artinya tikar rotan. Jamaludin dengan penuh semangat menceritakan proses panjang yang ia jalani dalam membuat tikar dari bahan dasar rotan yang diambil langsung dari lingkungan sekitarnya. Keterampilan tersebut ia dapatkan secara turun temurun.

*“Belajar dari saudaranya dulu. Jadi dari orang tuanya atau keturunan, diajarin, karena sebenarnya kemampuan-kemampuan untuk membuat ini dulu kemampuan mendasar, jadi semua bikin rumah bikin kayak rotan rotan kek gini tuh kemampuan mendasar yang harus dimiliki oleh orang-orang terdahulu. Karena kalau bukan mereka ya siapa lagi kita tidak bisa hidup di sini. Beli rumah yang dibuat sederhana kek rumah rumah di ladang, kemampuan mendasar orang-orang di sini itu wajib orang-orang karena kalau bukan kita ya siapa lagi. Kemampuan dasar parang, buka lahan/berantas, menebas pepohonan untuk dibuka lahan itu kemampuan-kemampuan dasar.”*

(Wawancara, 15 Agustus 2024 dengan bahasa yang sudah diterjemahkan)

Masyarakat Sumbawa memiliki hubungan erat dengan lingkungan yang terintegrasi dalam *local knowledge* atau pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal tersebut meliputi siklus tanam-panen rotan, pemilahan tumbuhan untuk mengikat bilah-bilah rotan, hingga cara produksi *tikarwe*. Dalam produksi *tikarwe*, masyarakat melakukan klasifikasi atau pemilihan sumber daya lokal mana yang dapat digunakan untuk hidup, sehingga terbentuk keseimbangan alam untuk keberlanjutan.

#### 1. Proses Pembuatan *Tikarwe*

Proses yang dijalani membutuhkan keahlian khusus dan kesabaran tinggi karena rotan yang digunakan adalah tumbuhan liar, bukan hasil budidaya. Ia juga merupakan satu-satunya pengrajin tikar rotan yang masih bertahan di desanya.

*“Jadi, tumbuhan ini tidak ditanam tetapi ini adalah tumbuhan liar yang kami manfaatkan sebagai bahan pembuatan tikar.”*

(Wawancara, 15 Agustus 2024 dengan bahasa yang sudah diterjemahkan)

Proses pembuatan *tikarwe* bisa memakan waktu kurang lebih selama dua hingga tiga hari. Pada umumnya pengerjaan berlangsung dari pagi hingga sore hari, tetapi tidak jarang proses ini bisa memakan

waktu lebih lama bahkan hingga malam hari. Tantangan terbesar dalam proses ini adalah menyerut rotan dengan pisau tajam agar halus. Jamaludin mengakui bahwa kesalahan sedikit saja bisa merusak rotan tersebut. Proses pembuatan *tikarwe* dimulai dengan pemilihan bahan baku yang sangat spesifik yakni rotan kayu yang sudah berusia 8-12 bulan. Perhitungan kapan pohon rotan dapat dipanen diperhitungkan melalui kalender tradisional yang disebut sebagai *tangal*.

*”Baru baru sekarang ada jam, jadi orang orang dulu ada perhitungan. Kayak misalkan gini di hitung dari kejadian terus peristiwa. Pas nikahannya ini, pas acara ini, pas ke acara maulid, pas melihat bulan ada di sumbawa itu. Bulan nudi, bulan tereak, jadi secara menghitung ada lagi di sumbawa. Jadi orang-orang cukup melihat bulan bisa lihat puasa, musim hujan, itu bisa diprediksi melalui bulan. Tetapi itu memang fakta, orang orang mungkin bisa melihat secara ilmiah itu ngga bisa dibuktikan, tapi atas kemampuan orang-orang asli Sumbawa itu melihat bulan sejak aidah tinggi belanta, masile hujan. Ada cara ngitungnya, istilahnya tangal. Kalo kita sama-sama tanggal, kalau masyarakat sini ini tangal.”*

(Wawancara, 15 Agustus 2024 dengan bahasa yang sudah diterjemahkan)

Secara teknis, pohon rotan yang tumbuh liar di hutan sekitar dusunnya ditebang dan dikumpulkan oleh para pekerja, kemudian dibeli satu ikat rotan untuk dijadikan satu lembar tikar. Setiap batang rotan dibelah menjadi empat bagian, di dalamnya terdapat serat yang serupa dengan serat pada pohon tebu. Serat-serat tersebut harus dibersihkan hingga hanya menyisakan kulit rotannya saja. Bilah-bilahan rotan disatukan satu sama lainnya menggunakan tujuh tali, kemudian tali yang digunakan dari bahan nilon untuk kekuatan lebih. Jamaludin sendiri lebih memilih menggunakan tali alami yang berasal dari tumbuhan sekitar desanya yang dianggap cukup kuat selama tidak terkena air.

## 2. Penjualan dan Harga

Saat ini penjualan tikar masih terbatas di wilayah Kecamatan Orong Telu dan Kecamatan Lunyuk. Meski demikian, kerap kali pesanan dari luar daerah seperti Bali melalui distributor di Sukamaju, Kecamatan Lunyuk. Jamaludin menjual tikarnya seharga Rp200.000 dengan keuntungan bersih kurang lebih sekitar Rp100.000/tikar. Adapun dengan biaya bahan baku rotan sebesar Rp50.000 dan biaya

tenaga sebesar Rp50.000. Sembilan hingga sepuluh tahun yang lalu, tikarwe dijual dari harga Rp50.000, kemudian naik ke harga Rp100.000, Rp150.000, hingga saat ini Rp200.000.

### 3. Peluang dan Tantangan Tikarwe

Secara ketahanan fungsi, tikar rotan dapat bertahan hingga puluhan tahun asalkan tidak terkena air. Selain itu, tikarwe pun memiliki nilai lebih sebagai produk alami yang memberi rasa nyaman dan sejuk saat digunakan. Artinya, ketahanan fungsi dan kenyamanan tikarwe membuka peluang untuk menembus pangsa pasar yang lebih luas.

Meskipun produknya memiliki kualitas yang baik, usaha ini belum mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah atau dinas terkait. Hal ini dibuktikan dengan belum meluasnya segmentasi penjualan *tikarwe*. Akan tetapi, Jamaludin tetap mempertahankan usahanya, berharap suatu saat ada perhatian dan dukungan yang lebih dari pihak terkait untuk mempromosikan dan melestarikan budaya tersebut. Untuk saat ini, pengrajin *tikarwe* hanya tersisa Jamaludin karena sebagian besar penduduk menilai tenaga pembuatan *tikarwe* tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan karena daya jual yang rendah, sehingga penduduk memilih mata pencaharian lain.

## A. Aspek Ekonomi

### 1. Produksi

Sumber daya lokal merupakan sebuah potensi atau nilai guna yang berasal dari daerah setempat atau dari potensi desa. Sumber daya tersebut meliputi kekayaan alam, sumber daya manusia, serta sumber daya sosial yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nopi et al., 2021). Berdasarkan penelitian ini, rotan liar di Dusun Kopo digunakan sebagai bahan baku pembuatan *tikarwe* yang mana rotan dianggap sebagai sumber daya lokal. Pemanfaatan sumber daya lokal ini memberikan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi di dusun tersebut, tergantung bagaimana mereka memanfaatkannya. Akan tetapi, kesempatan tersebut belum tercapai karena tidak ada regenerasi yang piawai dalam pembuatannya dan masalah aksesibilitas. Hal ini dibuktikan hanya satu orang saja yang bisa membuat *tikarwe*, serta jarak tempuh selama 2-3 jam hanya untuk membeli benang nilon di kecamatan.

Penelitian menunjukkan bahwa pembuatan *tikarwe* masih secara tradisional atau manual dengan alat yang sederhana. Hal ini kurang efisien secara waktu sebab proses pembuatan satu tikar saja bisa membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga hari. Selain itu, tenaga kerja yang diandalkan hanya satu orang, "Jamaludin", sehingga mempengaruhi keefisienan dalam hal produktivitas. Untuk meningkatkan produktivitas suatu produk, setidaknya harus melakukan peningkatan efisiensi (waktu & bahan baku), teknik produksi meliputi peningkatan keterampilan, dan peningkatan sumber daya manusia (Amalya et al., 2021).

Pada dasarnya, *tikarwe* merupakan kerajinan turun temurun di Dusun Kopo. Seiring berkembangnya waktu, warga dusun meninggalkan aktivitas membuat *tikarwe* karena pindah ke kota agar mendapatkan sumber penghidupan yang pasti. Oleh sebab itu, keterbatasan sumber daya manusia dan aksesibilitas menjadi momok inti dalam industri ini sehingga perlunya pelatihan guna meningkatkan keterampilan masyarakat, dan perbaikan aksesibilitas meliputi jaringan jalan dan sinyal.

Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, *home industry tikarwe* merupakan upaya pengembangan ekonomi yang melibatkan masyarakat dalam proses produksi dan distribusi produk, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi tersebar merata di Dusun Kopo. Hal ini mencakup upaya meningkatkan keterampilan pengrajin lokal, menyediakan aksesibilitas yang layak, serta dapat menciptakan lapangan kerja mereka di dusun tersebut. Pertumbuhan ekonomi inklusif ini dapat tercapai melalui pelatihan dan transfer pengetahuan kepada generasi muda, serta peningkatan akses pasar baik secara lokal maupun global. Dengan demikian, keuntungan dari *home industry* ini tidak hanya dilakukan oleh segelintir orang, tetapi tersebar merata pada penduduk dusun, sehingga meningkatkan perekonomian serta pelestarian budaya lokal.

## 2. Modal dan Uang

Modal untung merupakan aspek penting dalam usaha, baik industri kecil maupun besar. Permasalahan yang paling sering dialami masyarakat ketika membuka usaha adalah modal (Warta Ekonomi, 2018). Tanpa adanya modal, produksi tidak bisa dilaksanakan. Begitupun dengan untung, tanpa keuntungan yang

didapatkan menjadi pertimbangan keberlanjutan suatu usaha. Dengan kata lain, modal dan untung merupakan elemen kunci dalam setiap usaha yang saling berkaitan dan mempengaruhi keberhasilan suatu bisnis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal yang dikeluarkan untuk membeli satu ikat rotan dari warga lain sebesar Rp50.000 dan biaya tenaga sebesar Rp50.000. Satu ikat rotan tersebut dijual dengan harga Rp200.000/tikar sehingga dapat dihitung laba bersih sebesar Rp100.000. Dengan demikian, sebagaimana definisi oleh Devi (2021) bahwa modal usaha merupakan unsur yang sangat penting bagi industri kecil untuk membangun usahanya dan meningkatkan pendapatannya dan sesuai dengan prinsip ekonomi, modal terbatas tetapi mampu memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.

### 3. Pemasaran

#### a. Target Pasar dan Segmentasi

Penelitian menunjukkan bahwa target pasar dan segmentasi pasar masih terbatas dalam lingkup kecamatan. Di sisi lain, target pasar pada dasarnya dapat dimaksimalkan hingga Sumbawa Kota, Lombok, hingga Bali. Didukung pula pada merebaknya berbagai kafe, dan penginapan seperti *homestay* dan hotel yang menggunakan konsep estetik atau *instagramable* juga selera warga negara asing yang menyukai keautentikan yang erat dengan konsep tradisional. Hotel dapat menerapkan elemen budaya lokal dalam desain interior untuk menciptakan atmosfer yang autentik dan memberikan rasa lokal pada pengalaman tamu yang datang ke hotel tersebut (Ida Ayu Kalpikawati et al., 2024). Preferensi konsumen asing terhadap produk tradisional sering kali condong pada rasa ingin tahu akan cita rasa unik dan pengalaman budaya. Studi literatur menunjukkan bahwa sumber daya berwujud dan tidak berwujud yang berasal dari tradisi merupakan pendorong sebuah inovasi yang mampu menghasilkan produk khususnya identitas suatu tempat yang memunculkan keaslian dan membuatnya semakin menarik (Palmi dan Lezzi, 2020).

Tabel 1 Analisis Preferensi Konsumen

Kategorisasi Segmentasi Pasar	Referensi
Usia	Kaum <b>usia lebih tua</b> cenderung menyukai aspek budaya tradisional. Pada <b>kaum muda</b> cenderung menyukai aspek keautentikan <i>instagramable</i> .
Pendapatan	Dapat dijual dalam berbagai kisaran harga, mengikuti kategori masyarakat menengah hingga atas.
Wilayah	Pada <b>masyarakat perkotaan</b> , <i>tikarwe</i> dapat digunakan sebagai bagian dekorasi atau hiasan rumah yang lebih mengedepankan nilai estetika, sedangkan pada <b>masyarakat pedesaan</b> dapat digunakan sebagai bagian kegiatan sehari-hari untuk bercengkerama.

Sumber: Olah Data Penulis (2024)

Dengan memahami preferensi konsumen meliputi usia, pendapatan, wilayah, hingga gaya hidup konsumen, diharapkan dapat membuka potensi untuk meningkatkan daya saing yang berimplikasi pada meluasnya jangkauan pasar. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan badanya faktor belum meluasnya pangsa pasar *tikarwe* yang disebabkan karena minimnya aksesibilitas dan regenerasi.

Secara aksesibilitas, Dusun Kopo “ada” dalam keterbatasan jaringan jalan dan sinyal internet. Di sisi lain, aksesibilitas memegang salah satu peranan penting dalam meningkatkan jangkauan pasar yang berkelanjutan, mempermudah proses transaksi, dan meningkatkan potensi kolaborasi. Pada dasarnya, produk kerajinan tikar memiliki potensi segmentasi pasar yang luas. Potensi pasar tersebut berasal dari konsumen yang mencari produk secara fungsional maupun mereka yang mencari produk secara penilaian estetis atau budaya. Di sisi lain, produk tikar pun dapat digunakan sebagai elemen kehidupan sehari-hari dalam berinteraksi.

b. Distribusi dan Promosi

Produk *tikarwe* belum memiliki label produk. Di sisi lain, label produk merupakan media promosi sehingga dapat dikenal lebih mudah dan memiliki nilai tambah. Penjualan

pun mayoritas masih dalam lingkup antar kecamatan, yaitu Kecamatan Orong Telu dan Kecamatan Lunyuk dengan cara sistem *pre order* atau pemesanan melalui kesepakatan antara pembeli dan penjual. Meskipun demikian, beberapa kali ada pemesan dari Bali melalui distributor dari Dusun Sukamaju, Kecamatan Lunyuk.

Promosi produk *tikarwe* melalui mulut ke mulut secara organik (*organic world of mouth*). Hal tersebut dibuktikan dengan dialog antar warga di dusun lainnya yang membicarakan *tikarwe* sebagai produk khas Dusun Kopo, yang mana jarak antar dusun membutuhkan waktu tempuh tiga jam karena minimnya aksesibilitas jaringan jalan. Hal ini merefleksikan bahwa jaringan sosial merupakan salah satu faktor penting dalam menyebarkan *word of mouth*.

Pada dasarnya promosi dapat dilakukan melalui media digital seperti *e-commerce*. Akan tetapi, penggunaan gawai sebagian besar digunakan oleh pemuda-pemudi saja, sedangkan Jamaludin sudah berusia lanjut, sehingga sangat terbatas dalam mengoperasikan gawai. Begitu pun halnya dengan tidak adanya regenerasi *tikarwe* yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pengembangan suatu produk usaha karena berkat sumber daya manusia yang terampil dan handal, maka produk usaha dapat lebih mudah untuk berkembang (Mutmainna & Hidayati, 2022). Pelaku usaha perlu memahami apa yang dibutuhkan konsumen terhadap produk yang diinginkan. Mempelajari sikap konsumen dilakukan untuk mengetahui apa saja atribut penentu dari produk kerajinan rotan (Ocenia et al., 2024). Dalam hal ini, regenerasi berkaitan erat dengan diversifikasi produk dan desain baru seperti modifikasi pewarnaan baru maupun motif pada *tikarwe*.

## B. Aspek Sosial Budaya

### 1. Sebagai Identitas Daerah dan Kearifan Lokal

Tidak hanya bernilai secara ekonomi, *tikarwe* pun memiliki nilai sosial-budaya yang merefleksikan "*way of life*" dan makna simbolik. *Way of life* tercermin bahwa *tikarwe* sebagai produk dari aktivitas cara memanfaatkan sumber daya lokal. Aktivitas tersebut

cerminan identitas lokal. Dalam bahasa Sumbawa, rasa nyaman dan sejuk saat menggunakan tikarwe dikenal dengan istilah “*senap*”. Pada zaman dahulu, *tikarwe* merupakan alat kesehatan tradisional untuk meluruskan punggung laki-laki sembari membuka baju setelah berladang yang dikenal dengan istilah “*seluris bangkang*”.

Eksistensi tikarwe di era modern ini membuktikan bahwa “dirinya” telah melampaui perannya mata pencaharian (*livehood*) yang semata-mata hanya berorientasi pada profit. Sementara itu, makna simbolik tersebut tercermin melalui proses pembuatan *tikarwe*. Produksi *tikarwe* yang tidak terlepas dari perhitungan kalender tradisional. *Tanggal* memiliki hubungan erat dengan siklus alam dan ketersediaan bahan baku pembuatan jaringan tikar. Artinya, pengetahuan lokal tersebut menjadi panduan atau pedoman pengrajin dalam memilih waktu terbaik untuk memanen bahan baku *tikarwe*. Akan tetapi, dewasa ini seiring tergerus modernisasi penggunaan tanggal dalam proses *tikarwe* semakin termarginalkan. Dengan adanya kalender modern seperti saat ini memberi konsekuensi tersendiri bagi pengetahuan lokal. Walaupun demikian, *tanggal* masih relevan bagi kerajinan *tikarwe* karena terkandung nilai-nilai budaya di dalamnya.

Selain itu, berbicara produk sebagai bagian dari identitas daerah tidak dapat dilepaskan dari potensi pengembangan pariwisata yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah komodifikasi budaya. Di sisi lain, pengembangan pariwisata menimbulkan konsekuensi sosial budaya di tingkat masyarakat lokal yang telah dibuktikan pada penelitian sebelumnya. Komodifikasi budaya mempengaruhi etika dalam kegiatan pariwisata masyarakat suku Osing Banyuwangi. Hasilnya menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi Osing mencerminkan komodifikasi budaya yang dapat memperluas jaringan sosial. Meskipun telah terjadi komodifikasi budaya, kegiatan ekonomi tetap didasarkan pada nilai-nilai kolektif atau utilitarianisme kolektif (Nurhadi et al., 2022).

## 2. Di Balik Layar Tikarwe: Modal, Habitus, dan Arena Dalam Pandangan Bourdieu

Diskursus mengenai produksi, promosi, hingga pemasaran tidak serta merta hanya dibaca dalam konteks ekonomi saja, melainkan dapat dibaca melalui aspek sosial-budaya. Ketiga aspek

tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dan berpengaruh terhadap keberadaan *tikarwe* saat ini. Pierre Bourdieu, melalui Teori Praktik Sosialnya dapat memberi kerangka untuk membaca ulang faktor produksi dan tantangan pengrajin *tikarwe*.

Studi mengenai Praktik Sosial Bourdieu, Mustikasari et al (2023) dalam penelitiannya berupaya mengetahui pemikiran Bourdieu untuk memahami realitas sosial yang menunjukkan bahwa interaksi individu dapat membentuk sebuah “praktik”. Proses terbentuk tersebut dari tiga elemen besar yaitu habitus, modal, dan arena. Apabila diadopsi pada penelitian ini, didapatkan analisis sebagai berikut:

**Tabel 3**

No	Aspek	Temuan
1	Modal ekonomi	Alat produksi meliputi pisau tajam dan bahan baku meliputi rotan, tali nilon, serta tumbuhan lainnya sebagai tali
2	Modal budaya	Kepercayaan masyarakat dan jangkauan sosial yang direfleksikan dengan <i>worth of mouth</i>
3	Modal sosial	Pengetahuan lokal yang terintegrasi dalam proses pembuatan
4	Habitus	Membentuk sebuah persepsi pengrajin terhadap <i>tikarwe</i> meliputi memandang <i>tikarwe</i> sebagai budaya luhur, sehingga hingga saat ini masih diproduksi
5	Arena	Dalam konteks penelitian ini, sumber daya yang diperebutkan atau dikejar adalah nilai yang terkandung dalam <i>tikarwe</i>

Dalam lensa Bourdieu, penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan akses dan dominasi struktur sosial ekonomi yang berpengaruh pada *tikarwe*. Ketimpangan tersebut tercermin dalam keterbatasan modal ekonomi seperti modal teknologi & akses pasar yang dapat disebabkan karena pengaruh dinamika politik setempat. Selain itu, keterbatasan modal budaya meliputi regenerasi *tikarwe* yang menjadi tantangan terbesar dalam hal produksi.

Adanya dominasi struktur sosial dan pengaruh dinamika politik yang tidak cepat memperbaiki aksesibilitas masyarakat setempat semakin memperburuk kondisi ini sehingga menjadi salah satu faktor

belum meluasnya "nama" *tikarwe* di khayalak luas, serta habitus pengrajin yang cenderung resisten terhadap inovasi *tikarwe* seperti motif.

## Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan bagian dari proses perencanaan sekaligus hal utama yang ditekankan bahwa suatu usaha perlu melakukan penilaian terhadap hasil usaha guna menentukan kondisi yang dapat dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Satu hal yang perlu ditekankan adalah pengusaha perlu melihat kondisi saat ini dan prospek masa depan sehingga dapat membuat perhitungan ulang untuk mencapai tujuannya. Berkaitan dengan hal tersebut, *home industry tikarwe* di Dusun Kopo juga dapat diidentifikasi melalui hasil analisis sebagai berikut:

Tabel 4

<b>Strengths</b>		<b>Weakness</b>	
-	Bahan baku melimpah dan tahan lama	-	Aksesibilitas jaringan jalan dan sinyal internet
-	Biaya produksi rendah	-	Pasar terbatas
-	Nilai budaya	-	Keterbatasan kapasitas produksi
		-	Kurangnya teknologi
		-	Belum memiliki merek
<b>Opportunities</b>		<b>Threats</b>	
-	Pangsa pasar	-	Tidak ada regenerasi pelaku usaha
-	Tidak ada pesaing di lingkup kecamatan		

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa kekuatan *home industry tikarwe* terletak pada ketersediaan bahan baku yang melimpah dan tahan lama, serta biaya produksi yang rendah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tumbuhan rotan di Dusun Kopo yang mana daya tahannya sampai puluhan tahun, asalkan tidak terkena air. Selain itu, produk lokal *tikarwe* juga memiliki nilai budaya yang tinggi, diidentifikasi sebagai bagian dari identitas lokal masyarakat setempat, dan menyimpan sejarah penggunaan kalender tradisional. Kemudian, *home industry* ini mengalami kesulitan dalam mendistribusikan hasil kerajinan sebab jalan yang dilintasi tidak mudah dilalui sehingga berpengaruh pada pangsa pasar yang tidak menentu. Tidak hanya mobilitas, sinyal internet guna mempromosikan produk juga

sulit karena tidak adanya sinyal yang baik di sana. Kurangnya teknologi yang dimiliki dan hanya satu pelaku usaha membuat kapasitas produksi terbatas.

Jika aksesibilitas jalan diperbaiki, pendistribusian *tikarwe* akan menjadi lebih mudah, dan jumlah produk yang dijual dapat meningkat. Tidak adanya pesaing di tingkat kecamatan memberikan peluang besar bagi *tikarwe* untuk memperluas pangsa pasarnya. Namun, terdapat kendala dalam mempertahankan *home industry* ini karena tidak ada generasi penerus sehingga diperlukan pelatihan dan transfer pengetahuan mengenai pembuatan *tikarwe* kepada masyarakat Dusun Kopo untuk menjaga kelangsungan usaha yang berlandaskan identitas lokal.

## Kesimpulan dan Saran

Kajian ini menunjukkan bahwa produksi *tikarwe* memiliki peluang besar dalam pembangunan ekonomi inklusif melalui pemberdayaan pelaku usaha *tikarwe*. *Tikarwe* membuka peluang untuk meningkatkan perekonomian lokal dengan pemanfaatan rotan sebagai sumber daya lokal. Akan tetapi pada aspek ini, *tikarwe* berhadapan pada ancaman regenerasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan aksesibilitas sebagai penopang promosi produk. Selain itu, temuan *tikarwe* merefleksikan pentingnya keterlibatan kelompok marginal dalam sektor kerajinan tradisional berkelanjutan. Implikasinya adalah menjadi media dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja baru yang pada akhirnya mendorong laju pertumbuhan ekonomi mikro.

Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan *tikarwe* tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi lokal saja, melainkan berdampak pelestarian budaya Sumbawa karena pada zaman dahulu *tikarwe* merupakan salah satu cara bertahan hidup masyarakat Sumbawa dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Produk ini memberi potensi dalam pengembangan ekonomi pariwisata dengan keotentikan *tikarwe*. Di sisi lain, potensi tersebut memberikan konsekuensi sosial-budaya masyarakat setempat. *Tikarwe* adalah angin segar dalam pengembangan pariwisata asalkan tetap berdasar pada utilitarianisme kolektif dan tidak meninggalkan identitas asli budaya Sumbawa.

*Home industry tikarwe* di Dusun Kopo dapat berkembang secara inklusif dengan memanfaatkan ketersediaan bahan baku rotan yang melimpah dan nilai budaya produk lokal, sambil mengatasi tantangan yang ada. Peningkatan akses jalan dan sinyal internet akan memudahkan distribusi maupun promosi produk sehingga meningkatkan pangsa pasar. Perlunya

pendokumentasian pengetahuan produksi *tikarwe* sebagai pedoman dalam memberikan pelatihan kepada generasi selanjutnya. Pendokumentasian pengetahuan berimplikasi pada peningkatan sumber daya manusia dan kapasitas produksi sehingga *tikarwe* dapat dilanjutkan. Dengan cara tersebut, profit *tikarwe* akan menyebar ke seluruh masyarakat Dusun Kopo sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan melestarikan identitas lokal.

Setelah menarik kesimpulan dari penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapa saran yang dapat diimplementasikan dalam penelitian dan langkah konkret berikutnya. Untuk penelitian berikutnya perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai *tikarwe* dengan objek material dan objek formal yang berbeda, misalnya mengenai kajian etnobotani: pemanfaatan pohon rotan sebagai sumber daya lokal. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan metode etnografi sehingga hasil data lebih mendalam. Kemudian, dalam penelitian selanjutnya dapat dikomparasikan dengan persepsi masyarakat setempat mengenai *tikarwe*, sehingga dapat mengkaji urbanisasi masyarakat setempat yang berdampak pada eksistensi *tikarwe* saat ini.

Sementara dalam penerapan secara konkret, diperlukan adanya perbaikan aksesibilitas jaringan jalan dan sinyal internet. Harapannya dapat membantu dalam aspek distribusi dan promosi. Kemudian dilakukan pendokumentasian dan pengarsipan pengetahuan pengolahan *tikarwe* secara mendalam. Selain itu melakukan pendaftaran sebagai bagian indikasi geografis Sumbawa. Terakhir, pembuatan merk dagang.

## Daftar Pustaka

- Amalya, Sri Rezky., et al. (2021). Pengaruh Penggunaan Teknologi dan Produktivitas Kerja terhadap Kinerja Karyawan (Pada Studi PT, PLN (Persero) UP3 Makassar Selatan. *Center Economic Student Journa*, 4(1), 62-67. <https://doi.org/10.56750/csej.v4i1.179>.
- BPS. (2021). *Profil Industri Mikro dan Kecil 2021*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2022). *Profil Industri Mikro dan Kecil 2022*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2023). *Profil Industri Mikro dan Kecil 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Devi, Rahmadiawati. (2021). Pengaruh Modal Usaha dan Sikap Kewirausahaan terhadap Pendapatan Usaha Kecil (Mikro) di Kawasan Industri M. Said Samarinda. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 9(1), 36-45. <http://dx.doi.org/10.54144/jadbis.v9i1.4768>.
- Duan, Zi Yan., et al. (2023). Crafting a Place-Based Souvenir for Sustaining Cultural Heritage. *Heliyon*, 9(5): e15761. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15761>.

- Ha-Brookshire, Jung dan Sarah Song Southworth. (2016). The Impact of Cultural Authenticity on Brand Uniqueness and Willingness to Try: The Case of Chinese Brands and U.S. consumers. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 28(4), 724-742. <https://doi.org/10.1108/APJML-11-2015-0174>.
- Kalpikawati, Ida Ayu., et al. (2024). *Kepariwisata Berbasis Masyarakat, Budaya, dan Berkelanjutan: Potensi Menuju Pariwisata Budaya Berkelanjutan* (I. H. H. Sihombing). Bali: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Pariwisata Bali.
- Marizar, Eddy Supriyatna, Agustinus Purna Irawan, dan Jap Tji Beng. (2019). The Knock Down System Of Rattan Furniture For Global Market. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 508(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/508/1/012104>.
- Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (SMEs) of Indonesia (2024). *Rattan Furniture and Decoration Dominates Global Market Share*. Diakses dari <https://smesta.kemenkopukm.go.id>.
- Mordor Intelligence. (2023). *Rattan Furniture Market Size & Share Analysis-Growth Trends & Forecast (2024-2029)*. Diakses dari <https://www.mordorintelligence.com>.
- Munawwaroh, Lailatul. (2024). Peran Home Industry dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Home Industry Kerupuk Desa Sladi, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Pembangunan*, 2(1), 58-64.
- Mustikasari, M., Arlin, A., & Kamaruddin, S. A. (2023). Pemikiran Pierre Bourdieu Dalam Memahami Realitas Sosial. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 6(1), 9–14. <https://doi.org/10.31539/Kaganga.V6i1.5089>
- Mutmainna dan Wiwiek Hidayati. (2022). Strategi Pengembangan Usaha Kerajinan Rotan di Kabupaten Pangkep. *Jumanji (Jurnal Manajemen Jambi)*, 5(1), 1-10. <https://doi.org/10.35141/jmj.v5i1.219>.
- Nopi, Aimie Sulaiman, dan Sujadmi. (2021). Optimalisasi Potensi Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Tanjung Gunung. *Jurnal Studi Inovasi*, 1(3), 23-29. <https://doi.org/10.52000/jsi.v1i3.45>.
- Nurhadi, Iwan., et al. (2022). Cultural Commodification and Ethical Transition of Tourism Development: A Case in Osing Community, Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(01), 24-43. <https://doi.org/10.22500/10202238564>.

- Ocena, Yolanda, Novia Dewi, dan Yeni Kusumawaty. (2024). Analisis Sikap Konsumen Produk Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Agri Sains*, 7(2), 232–241. <https://doi.org/10.36355/jas.v7i2.1234>.
- Pamela, Palmi dan Greta Enrica Lezzi. (2020). How Authenticity and Tradition Shift Into Sustainability and Innovation: Evidence from Italian Agritourism. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(15), 1-23. <https://doi.org/10.3390/ijerph17155389>.
- Ramadani, Fadriillah, Rahma Muin, dan Busyra. (2022). Peran Industri Rumah Tangga Kerajinan Rotan dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pengrajin Rotan di Desa Tonyaman. *Journal Pengruang: Conference Series*, 4(2), 690-696. <https://doi.org/10.35329/jp.v4i1.2302>.
- Sebayang, Asnita Frida, Imam Indratno, dan Lesta Karolina S. (2020). Local Economic Innovation: Lesson from Rotan Ketak Industry in Central Lombok Regency, Indonesia. *International Journal of Economics Development Research*, 1(2), 150-165. <https://doi.org/10.37385/ijedr.v1i2.65>.
- Suminartini dan Susilawati. (2020). Pemberdayaan Masyarakat melalui Bidang Usaha Home Industry dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 3(3), 226-237. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v3i3.3340>.
- Warta Ekonomi. (2018). *6 Kendala Usaha saat Pertama Kali Memulai Bisnis*. Diakses dari <https://www.wartaekonomi.co.id>.

# **Penggunaan Data Spasial untuk Penilaian Kesesuaian Lahan Pertanian dan Permukiman di Kabupaten Bantul**

**Diniyarti<sup>1</sup>, Dini Rachmadhani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Gadjah Mada<sup>2</sup> Universitas Gadjah Mada

diniyarti@mail.ugm.ac.id ; dini.rachmadhani@mail.ugm.ac.id

## **Abstrak**

Penduduk Kabupaten Bantul meningkat sebanyak 23.664 jiwa selama 2020-2023 (BPS, 2024), yang memengaruhi penggunaan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kesesuaian lahan pertanian dan evaluasi kesesuaian lahan kawasan permukiman kemudian selanjutnya dilakukan analisis kesesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul. Metode yang digunakan adalah penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dengan pendekatan skoring berdasarkan data sekunder dan interpretasi citra. Hasil menunjukkan, lahan untuk permukiman diklasifikasikan sebagai cukup sesuai (55,92%) dan sesuai (44,08%), namun kesesuaian dengan RTRWK hanya 38,8%. Untuk jagung, 47,31% lahan sesuai, tetapi hanya 41,8% sesuai dengan RTRWK. Sementara itu, lahan padi sebagian besar cukup sesuai (72,06%), namun hanya 44,5% sesuai dengan RTRWK.

**Kata Kunci:** *Evaluasi Kesesuaian Lahan, SIG, Penginderaan Jauh, Pertanian, Permukiman*

## Pendahuluan

Peningkatan penduduk Kabupaten Bantul sebanyak 23.664 jiwa selama 2020-2023 (BPS, 2024) telah memicu perubahan penggunaan lahan, terutama untuk permukiman dan fasilitas pendukungnya. Pertumbuhan ini mendorong perlunya evaluasi kesesuaian lahan guna memastikan pemanfaatan lahan secara efektif dan berkelanjutan (Mega et al., 2010). Evaluasi lahan merupakan proses penilaian potensi suatu lahan untuk penggunaan tertentu, membantu pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan, dan mengatasi kompetisi antar penggunaan lahan. Penelitian BPN DIY (2020) menunjukkan pergeseran penggunaan lahan di Kabupaten Bantul seluas 3.937,44 ha selama 2015-2020, dengan pergeseran utama dari lahan pertanian ke non-pertanian. Ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap tata ruang mencapai 30,55%, dengan ketidaksesuaian terbesar di kawasan industri (96,61%). Secara keseluruhan, 69,45% penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang, sedangkan 30,55% lainnya tidak sesuai.

Sumber data analisis diperoleh dari instansi pemerintah berupa data spasial dengan format *shapefile* maupun data tabular. Dalam analisis kesesuaian lahan untuk permukiman dan kesesuaian lahan untuk pertanian menggunakan beberapa faktor fisik antara lain penggunaan lahan, kemiringan lereng, drainase permukaan, daya dukung tanah, jalan utama, dan kedalaman muka air tanah, tekstur tanah, kedalaman efektif tanah, temperatur rerata, curah hujan, dan drainase tanah. Citra *Google Earth* digunakan untuk *updating* data penggunaan lahan dan data DEM untuk ekstraksi data kemiringan lereng. Karena resolusi spasial yang tinggi, aplikasi penginderaan jauh dapat menyadap data secara detail seperti liputan vegetasi, kepadatan bangunan, jarak permukiman terhadap jalan utama, dan informasi industri untuk identifikasi penggunaan lahan.

Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) digunakan untuk menganalisis parameter yang berpengaruh dalam memvisualisasikan dalam bentuk peta (Maru, 2015). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode skoring/pembobotan dimana setiap parameter diperhitungkan dengan pembobotan yang berbeda (Bakosurtanal, 2010). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kesesuaian lahan pertanian dan evaluasi kesesuaian lahan kawasan permukiman kemudian selanjutnya dilakukan analisis kesesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul.

## Metode

### 1. Lokasi Penelitian

Wilayah kajian penelitian terletak di Kabupaten Bantul yang merupakan salah satu dari lima kabupaten dan kotamadya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul memiliki luas 506,85 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 17 kecamatan, dengan tiga diantaranya merupakan kecamatan pesisir yaitu Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Kretek. Pusat ekonomi Kabupaten Bantul adalah pertanian karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari pertanian dan diapit oleh dua sungai yaitu Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Opak di sebelah timur.

### 2. Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data vektor, tabular, dan raster dari instansi pemerintah pusat, Kabupaten Bantul, dan USGS sebagai input analisis kesesuaian dan evaluasi lahan untuk permukiman, jagung, dan padi. Data curah hujan diperoleh dari BMKG dan dianalisis spasial menggunakan metode IDW (*Inverse Distance Weighting*), sementara data temperatur diturunkan dari Landsat 8 OLI, dan kemiringan lereng dari DEM (*Digital Elevation Model*). Jarak terhadap jalan utama dianalisis menggunakan buffer. Selain itu, data penggunaan lahan, bahaya erosi, drainase, daya dukung tanah, kedalaman air tanah, tekstur tanah, jenis tanah, drainase tanah, serta RTRW Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 yang diperoleh dari instansi pemerintah pusat dan Kab. Bantul.

### 3. Analisis

Analisis spasial dalam Sistem Informasi Geografis dilakukan menggunakan metode skoring dan tumpang susun (*overlay*) dengan perangkat lunak ArcMap 10.6.1 untuk menghasilkan peta tematik. Variabel-variabel dianalisis melalui tumpang susun dan skoring untuk menentukan kelas kesesuaian lahan permukiman, pertanian padi, dan jagung. Klasifikasi yang digunakan dalam analisis kesesuaian lahan yaitu Equal Interval dimana nilai total dari masing-masing faktor/ indikator kemudian dibagi data ke dalam kelas-kelas berukuran (sesuai, cukup sesuai, dan tidak sesuai). Hasil analisis kesesuaian lahan lalu dievaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 menggunakan *overlay* analisis untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara hasil analisis dan data tata ruang (penggunaan lahan).

a. Analisis Kesesuaian Lahan untuk Permukiman

Analisis kesesuaian lahan permukiman menggunakan variabel seperti penggunaan lahan, kemiringan lereng, drainase permukaan, daya dukung tanah, jarak jalan utama, dan kedalaman muka air tanah. Penggunaan lahan mencerminkan interaksi manusia dan lingkungan, mempengaruhi kualitas ruang permukiman (Dale dan Polasky, 2007). Kemiringan lereng mempengaruhi kualitas lahan, dengan daerah datar lebih sesuai dibandingkan daerah berbukit (Zuidam, 1979 dalam Khadiyanto, 2005). Daya dukung tanah dan drainase terkait dengan kerawanan erosi, yang dapat mempengaruhi kesesuaian lahan permukiman (Sarief, 1986; Nursa'ban, 2006). Jarak ke jalan utama berpengaruh pada aksesibilitas dan kualitas hidup (McHarg, 1969), sementara kedalaman muka air tanah penting untuk stabilitas fondasi dan mencegah banjir.

Tabel a.1 Klasifikasi Kesesuaian Lahan Untuk Permukiman

Indikator	Harkat				
	Sangat Baik (5)	Baik (4)	Sedang (3)	Jelek (2)	Sangat Jelek (1)
<sup>1</sup> Penggunaan Lahan	Semak, lahan kosong, dan lahan tidak dimanfaatkan	Pekarangan, kebun campuran, dan sejenisnya	Lahan pertanian kering berupa tegalan, Perkebunan, dan semacamnya	Lahan pertanian berupa sawah non irigasi dan sejenisnya	Permukiman, industri, kawasan militer, situs purbakala, fasilitas pendidikan, dan jasa
<sup>2</sup> Kemiringan lereng	Datar (0-2%)	Landai (2-8%)	Agak Miring (8-15%)	Miring (15-30%)	Terjal (>30%)
<sup>3</sup> Drainase Permukaan	Lahan kerring, pengaliran sangat cepat	Lahan dengan pengaliran cepat setelah turun hujan	Lahan dengan pengaliran sedang, sedikit terpengaruh fluktuasi tanah	Lahan dengan pengaliran lambat, terpengaruh dengan fluktuasi air tanah	Lahan dengan pengaliran sangat lambat
<sup>4</sup> Daya Dukung Tanah	>4.00 tanah berpasir, berbatu, berkelikir	2.75-4.00 tanah berpasir	1.75-2.75 tanah bergeluh	1.25-1.74 tanah debu atau lempung	<1.25 tanah rawa atau lumpur
<sup>5</sup> Jarak Terhadap Jalan Utama	0-500 meter	500-1000 meter	1000-1500 meter	1500-2000 meter	>2000 meter
<sup>6</sup> Muka Air Tanah Dangkal	1.5-<10 meter	10-<15 meter	15-<20 meter	>20 meter	<1.5 meter

Sumber: <sup>1</sup>Malingreau (1982), <sup>2</sup>Van Zuiddam (1977) dalam Prapto Suharsono (1984), <sup>3</sup>Ortiz (1977) dalam Prapto Suharsono (1984), <sup>4</sup>Sunarto dan Suratman Woro (1994) dalam Amirul Ikhsan (2009), <sup>5</sup>Klimazewski (1969) dalam Sutikno (1982), <sup>6</sup>FAO (1973) dengan modifikasi dalam modul kuliah Aplikasi SIG

Tabel a.2 Tabel Faktor Penimbang Parameter Pengembangan Lokasi Permukiman

<b>Parameter</b>	<b>Penimbang</b>
Kemiringan Lereng	1
Drainase Permukaan	1
Jarak Terhadap Jalan Utama	3
Penggunaan Lahan	3
Daya Dukung Tanah	2
Kedalaman Muka Air Tanah	3

Sumber : Suharyadi (1996) dengan modifikasi dalam modul kuliah Aplikasi SIG

Tabel a. 3 Klasifikasi Kesesuaian Permukiman

<b>Klasifikasi</b>	<b>Nilai</b>
Sesuai	43.4-65
Cukup Sesuai	21.7-43.3
Tidak Sesuai	0-21.6

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2024

b. Analisis Kesesuaian Lahan untuk Pertanian Padi

Analisis kesesuaian lahan untuk padi menggunakan variabel kemiringan lereng, penggunaan lahan, tekstur tanah, kedalaman efektif tanah, dan drainase tanah, karena faktor-faktor tersebut mempengaruhi efektivitas budidaya padi. Lahan datar lebih cocok untuk pertanian padi karena memudahkan irigasi dan mengurangi erosi, sementara lereng curam lebih rentan terhadap erosi yang dapat mengurangi produktivitas (Zdruli et al., 2010). Penggunaan lahan saat ini juga mempengaruhi potensi konversi lahan menjadi pertanian. Tekstur tanah, kedalaman tanah, dan drainase berperan penting dalam pertumbuhan padi, dengan tekstur tanah yang baik untuk menahan air, kedalaman tanah yang memungkinkan penyerapan air dan nutrisi, serta drainase yang seimbang untuk mendukung perkembangan akar tanaman (Djaenudin et al., 2011).

Tabel b.1 Klasifikasi Kesesuaian Lahan Untuk Pertanian Padi

Indikator	Harkat				
	Sangat Baik (5)	Baik (4)	Sedang (3)	Jelek (2)	Sangat Jelek (1)
<sup>1</sup> Kemiringan Lereng	Datar-Landai (0-5%)	Berombak-Bergelombang (5-15%)	Berbukit Rendah (15-25%)	Berbukit (25-45%)	Bergunung (>45)
<sup>1</sup> Tekstur Tanah	Halus (Grumosol, Latosol, Aluvial Kelabu)	Agak Halus (Gley Humus, Rensina, Podsol)	Sedang (Aluvial Coklat, Mediteran)	Agak Kasar (Podsolik, Andosol)	Kasar (Regosol, Litosol, Organosol)
<sup>1</sup> Kedalaman Tanah	Sangat Dalam (>100 cm)	Dalam (75-100 cm)	Sedang (50-75 cm)	Dangkal (30-50 cm)	Sangat Dangkal (<30 cm)
<sup>2</sup> Kriteria Drainase Tanah	Sangat Cepat (Resapan air kedalam tanah sangat cepat)	Cepat (Resapan air cepat)	Sedang (resapan tidak begitu cepat, dengan jenuh air)	Lambat (ada bercak dalam horizon A, B air tanah cukup tinggi)	Sangat Lambat (Daerah basah, jenuh 1-3 bulan, seluruh tanah bercak-bercak)
<sup>3</sup> Penggunaan Lahan	Semak, lahan kosong, dan lahan tidak dimanfaatkan	Pekarangan, kebun campuran, dan sejenisnya	Lahan pertanian kering berupa tegalan, Perkebunan, dan semacamnya	Lahan pertanian berupa sawah non irigasi dan sejenisnya	Permukiman, industri, kawasan militer, situs purbakala, fasilitas pendidikan, dan jasa

Sumber : Suharsono, P dkk (1995 dalam Halengkara, 2017), <sup>2</sup>Suratman Worosuprodjo (1995), <sup>3</sup>Manglireau (1984 dengan Modifikasi)

Tabel b. 2 Klasifikasi Kesesuaian Pertanian Padi

<b>Klasifikasi</b>	<b>Nilai</b>
Sesuai	5-11.67
Cukup Sesuai	11.68-18.35
Tidak Sesuai	18.36-25

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2024

b. Analisis Kesesuaian Lahan untuk Pertanian Jagung

Analisis kesesuaian lahan untuk pertanian jagung menggunakan variabel temperatur udara rerata, tekstur tanah, curah hujan, drainase, kedalaman tanah, kemiringan lereng, dan bahaya erosi karena faktor-faktor ini mempengaruhi pertumbuhan jagung. FAO (2007) menyatakan suhu 20–26°C ideal untuk pertumbuhan jagung, sementara suhu ekstrem dapat menghambat fotosintesis dan perkembangan biji. Menurut Landon (1991), jagung membutuhkan tanah dengan tekstur lempung berpasir hingga lempung berliat untuk keseimbangan retensi air dan aerasi. Drainase yang baik diperlukan untuk menghindari genangan yang merusak akar (Dudal, 1976). Curah hujan yang memadai penting untuk mendukung pertumbuhan, sementara kedalaman tanah mempengaruhi ruang tumbuh akar dan penyerapan air (Sys et al., 1991). Erosi tanah terutama di lahan berlereng juga mengancam kesesuaian lahan untuk jagung (Morgan, 2005).

Tabel c. 1 Klasifikasi Kesesuaian Lahan Untuk Pertanian Jagung

Indikator	Kelas Kesusuain Lahan				
	S1 (Sangat Sesuai)	S2 (Cukup Sesuai)	S3 (Sesuai Marginal)	N (Tidak Sesuai)	
Skor	3	2	1	0	
Rata-rata temperature (°C)	20-26	26-30	30-32	>32	
Curah Hujan (mm/ bln)	500-1200	400-500	300-400	-	
Drainase	Agak Lambat	-	-	Terhambat, cepat	
Tekstur	Halus, Agak Halus, Sedang	Halus, Agak Halus, Sedang	Agak Kasar	Kasar	
Kedalaman Tanah (cm)	<60	60-140	140-200	>200	
Lereng (%)	<8	8-16	16-30	>30	
Bahaya Erosi	Sangat Rendah	Rendah-Sedang	Bahaya	Sangat Bahaya	

Sumber : Dajenuidin dkk (2000 dalam Wirosoedarmo, 2011)

Tabel c. 2 Klasifikasi Kesesuaian Lahan Jagung

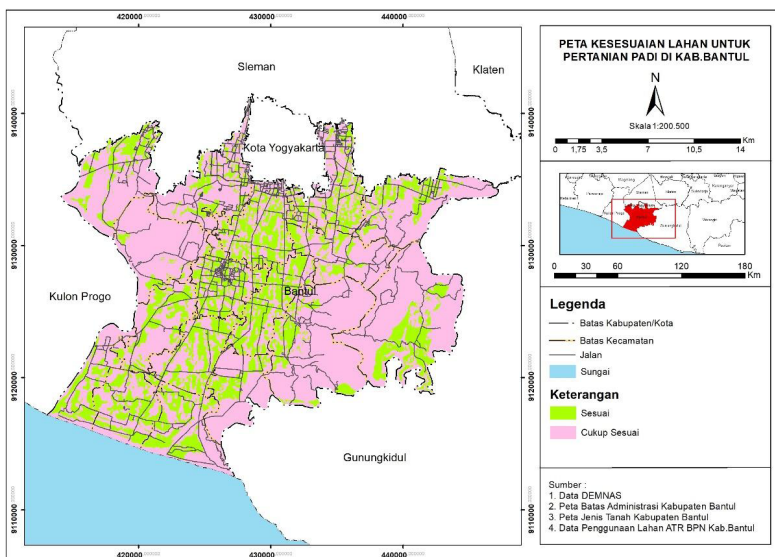
Klasifikasi	Nilai
Sesuai	15-21
Cukup Sesuai	8-14
Tidak Sesuai	0-7

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2024

## Hasil dan Pembahasan

### A. Kesesuaian Lahan Pertanian Padi

Analisis kesesuaian lahan untuk pertanian padi di Kabupaten Bantul merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian. Kabupaten Bantul memiliki potensi besar untuk budidaya padi yang merupakan komoditas pangan utama bagi masyarakat. Namun, potensi ini hanya dapat dioptimalkan jika lahan pertanian dikelola dengan baik dan sesuai dengan karakteristik fisik wilayahnya. Melalui analisis kesesuaian lahan, dengan menggunakan parameter yang terdiri dari kemiringan lereng, jenis tanah, tekstur tanah, kedalaman tanah, drainase tanah, dan penggunaan lahan. Diperoleh hasil evaluasi kesesuaian lahan untuk padi di Kabupaten Bantul seperti tergambar A.1.

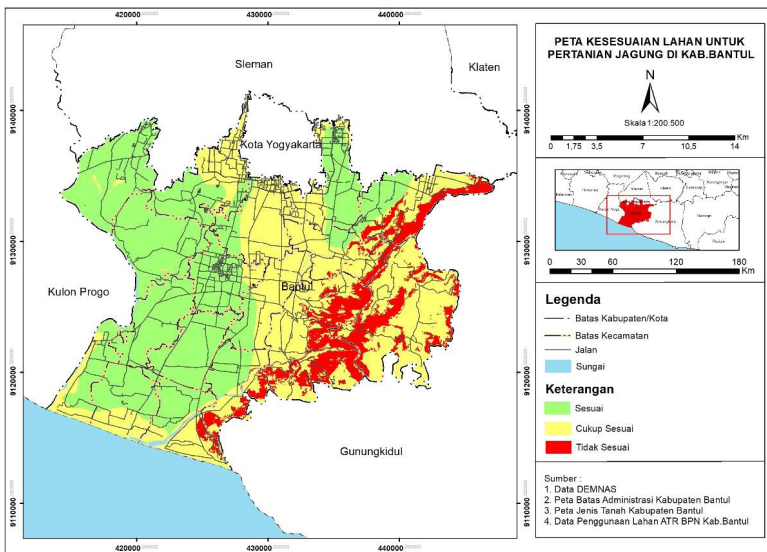


Gambar A.1 Peta Kesesuaian Pertanian Padi Kabupaten Bantul (Hasil Analisis, 2024)

Hasil analisis menunjukkan sebagian besar wilayah Kabupaten Bantul berpotensi baik untuk pertanian padi, dengan klasifikasi cukup sesuai (36.839,67 Ha) dan sangat sesuai (14.289,46 Ha). Kawasan cukup sesuai memerlukan penyesuaian manajemen, sedangkan kawasan sangat sesuai mendukung pertumbuhan padi tanpa banyak intervensi. Untuk meningkatkan produktivitas, disarankan fokus pada pengembangan lahan sangat sesuai serta pengelolaan tepat di kawasan cukup sesuai. Infrastruktur pertanian yang baik dan praktik berkelanjutan penting untuk menjaga sumber daya alam dan meningkatkan hasil produksi.

## B. Kesesuaian Lahan Jagung

Evaluasi kesesuaian lahan diperlukan untuk meningkatkan produksi pertanian dan mengoptimalkan penggunaan lahan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menyediakan data wilayah yang paling cocok untuk pengembangan jagung menggunakan sistem informasi geografis sebagai dasar perencanaan di Kabupaten Bantul. Analisis kesesuaian melibatkan faktor temperatur udara rata-rata, curah hujan, drainase, tekstur tanah, kedalaman tanah, kemiringan lereng, dan bahaya erosi. Berdasarkan data Landsat, suhu di Kabupaten Bantul diklasifikasikan menjadi 17–20°C, 20–26°C, dan 26–30°C, dengan curah hujan <300 mm/bulan dan 300–400 mm/bulan. Kemiringan lereng terbagi menjadi <8%, 8–16%, 16–30%, dan >30%.

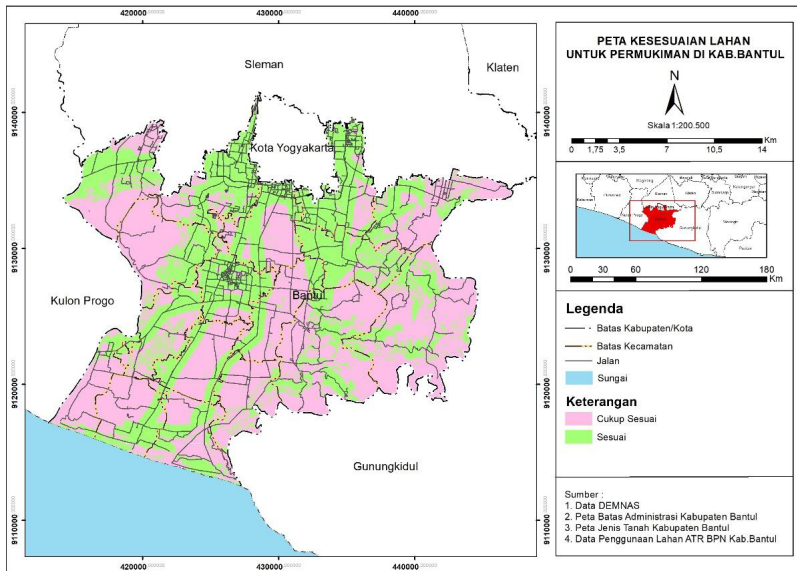


**Gambar B.1** Peta Kesesuaian Pertanian Jagung Kabupaten Bantul (Hasil Analisis, 2024)

Analisis overlay digunakan untuk menilai kesesuaian lahan jagung di Kabupaten Bantul dengan menggabungkan peta faktor analisis. Hasilnya menunjukkan tiga kelas kesesuaian: tidak sesuai, cukup sesuai, dan sesuai. Lahan tidak sesuai, seluas 5.926,89 Ha, berada di timur Bantul dengan kemiringan lereng 16–30% hingga >30%, menunjukkan pengaruh kemiringan terhadap kesesuaian lahan. Lahan cukup sesuai, seluas 21.485,22 Ha, tersebar di bagian barat dan sebagian utara Bantul. Sementara itu, lahan sesuai memiliki luas 24.656,80 Ha.

### **C. Kesesuaian Lahan Permukiman**

Kesesuaian lahan mencerminkan tingkat kecocokan suatu area untuk penggunaan tertentu, seperti permukiman. Analisis menggunakan variabel penggunaan lahan, kemiringan lereng, drainase permukaan, daya dukung tanah, jalan utama, dan kedalaman muka air tanah. Faktor penimbang memberikan nilai tertinggi pada parameter paling berpengaruh, seperti jarak jalan utama, penggunaan lahan, dan kedalaman muka air tanah. Hasil analisis menunjukkan lahan sesuai untuk permukiman berada di utara Kabupaten Bantul, mengikuti jalur utama. Buffer jalan utama dengan jarak 0–500 meter memiliki harkat tertinggi, sedangkan jarak >2000 meter terendah. Lahan semak, kosong, atau tidak dimanfaatkan dengan kedalaman muka air tanah 1,5–10 meter masuk kategori sesuai. Kabupaten Bantul memiliki 28 klasifikasi penggunaan lahan, dengan sawah irigasi teknis sebagai penggunaan lahan terluas (14.222,3 Ha) dan industri aneka sandang sebagai penggunaan lahan terkecil (0,22 Ha). Luas permukiman mencapai 14.811,05 Ha dan terus bertambah seiring pembangunan di wilayah tersebut.



**Gambar C.1** Peta Kesesuaian Lahan Permukiman Kabupaten Bantul (Hasil Analisis, 2024)

Hasil analisis kesesuaian lahan untuk permukiman di Kabupaten Bantul menunjukkan dua klasifikasi: cukup sesuai (28.581,85 Ha atau 55,92%) dan sesuai (22.525,38 Ha atau 44,08%). Untuk menjaga kelestarian lingkungan, pembangunan permukiman harus dibatasi pada lahan yang sesuai, sementara lahan tidak sesuai sebaiknya dialokasikan sebagai kawasan lindung atau penyangga. Pemerintah perlu menegakkan aturan dan memberikan sanksi terhadap pembangunan di lahan yang tidak sesuai, demi melindungi lingkungan dan keselamatan penghuni.

Kesesuaian lahan pertanian pada tanaman jagung di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain temperatur rerata, curah hujan, drainase, tekstur, kedalaman tanah, lereng, dan bahaya erosi. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman jagung, temperatur yang kurang tepat akan menghambat pertumbuhan tanaman. Tidak hanya itu curah hujan yang sedikit dan drainase yang tidak sesuai mengakibatkan hasil panen menurun sedangkan bila terlalu banyak air akan merusak akar tanaman dan menurunkan produktivitas. Kondisi tekstur tanah yang sesuai akan mengoptimalkan hasil produksi jagung. Selanjutnya parameter kedalaman tanah berkaitan dengan pertumbuhan akar tanaman jagung, bila akar tumbuh dengan optimal maka pada fase pertumbuhan jagung memiliki ketersediaan

air dan nutrisi yang cukup. Kemiringan lereng berkaitan erat dengan erosi tanah dimana lereng lebih dari 30% tidak sesuai untuk pertumbuhan tanaman jagung, lereng yang curam dengan risiko erosi tinggi mengakibatkan tanaman jagung akan kehilangan nutrisi yang akan digunakan untuk pertumbuhannya. Pada area kajian klasifikasi kesesuaian lahan untuk jagung dengan kategori sesuai disebabkan sebagian besar pada suhu 20 hingga 26 derajat celcius, dengan tekstur tanah kersay-gumpal pejal dan lempung berpasir. Kelas lereng pada kategori sesuai kurang dari 8% dan bahaya longsor termasuk dalam klasifikasi rendah. Berdasarkan data BPS terjadi penurunan luas panen jagung dari tahun 2015 hingga 2017, pada tahun 2015 sebesar 4.312 Ha dan tahun 2017 sebesar 3.283 Ha, namun hal ini berkebalikan dengan hasil analisis dimana luas kesesuaian lahan untuk jagung sebesar 24.656,80 Ha, hasil ini jauh lebih luas bila dibandingkan dengan data dari BPS. Selain itu dilakukan analisis kesesuaian lahan pertanian jagung terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Bantul nomor 4 Tahun 2011, diperoleh hasil 21.368,3 Ha atau sebesar 41,8% luas wilayah sesuai untuk digunakan sebagai lahan pertanian jagung.

Selain itu, untuk lahan pertanian pada tanaman padi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor dimana faktor yang mendukung kesesuaian lahan padi pada kategori sesuai umumnya dipengaruhi oleh tekstur yang cenderung halus yaitu tanah lempung berpasir dan lempung liat dengan kemiringan lereng datar (0-5%) hingga berombak (4-15%) serta penggunaan lahan existing yang memang sudah digunakan sebagai lahan pertanian padi dan penggunaan lahan lain yang secara biaya rendah dan mudah dikonversi menjadi lahan pertanian padi pada lokasi kajian misalnya tegalan dan kebun campuran. Jika dilihat dari aspek fisik wilayah studi, untuk kategori kesesuaian lahan cukup sesuai faktor yang menjadi penghambat yaitu tekstur tanah (Pasir, Liat < 40%) dan dari aspek lain yaitu penggunaan lahan eksisting seperti penggunaan lahan permukiman, industri dll yang menjadi faktor pembatas dalam kelas kesesuaian lahan sedang untuk pertanian padi. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan pertanian padi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Bantul nomor 4 Tahun 2011, diperoleh hasil 22.759,7 Ha atau sebesar 44,5% luas wilayah sesuai untuk digunakan sebagai lahan pertanian padi.

Analisis Kesesuaian lahan permukiman menggunakan variabel Penggunaan Lahan, Kemiringan Lereng, Drainase Permukaan, Daya dukung tanah, Jalan Utama, Kedalaman Muka Air Tanah. Parameter ini digunakan dengan tujuan dapat memenuhi kriteria fisik, ekologis, dan infrastruktur

sehingga aman, nyaman, dan mendukung keberlanjutan. Selain itu untuk mengurangi risiko bencana seperti banjir, longsor, serta kerusakan struktur akibat kondisi tanah yang tidak stabil. Diharapkan dengan memilih lokasi yang sesuai, permukiman dapat mendukung kualitas hidup yang lebih baik, seperti kualitas lingkungan yang sehat, kemudahan akses air tanah, dan drainase yang baik. Kesesuaian lahan permukiman yang termasuk dalam klasifikasi sesuai seluas 22.525,38 Ha namun berdasarkan analisis penggunaan tanah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi DI Yogyakarta luas permukiman di Kabupaten Bantul tahun 2020 seluas 14.811 Ha. Sebagian besar wilayah yang sesuai untuk dijadikan permukiman yaitu wilayah dataran rendah dengan kemiringan lereng 2-8% yang berlokasi di utara Kabupaten Bantul. Tekstur tanah di sebagian besar di wilayah yang termasuk dalam kategori sesuai yaitu lempung berpasir dan jenis tanah kambisol. Selain jarak terhadap jalan juga mempengaruhi nilai kesesuaian lahan terhadap permukiman, semakin jauh lokasi terhadap jalan utama maka nilai kesesuaian akan semakin rendah. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan permukiman terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul diperoleh hasil 19.857.8 Ha atau 38,8 % dari luas wilayah Kabupaten Bantul sesuai untuk permukiman.

## **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa terdapat 2 klasifikasi kesesuaian lahan terhadap permukiman yaitu cukup sesuai sebesar 55,92% dan sesuai sebesar 44,08%. Namun setelah dilakukan analisis kesesuaian lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) angka kesesuaian terhadap RTRWK hanya sebesar 38,8%. Sedangkan kesesuaian lahan untuk jagung dibagi menjadi 3 klasifikasi sesuai, cukup sesuai dan tidak sesuai, untuk kategori sesuai sebesar 47,31% dari total luas Kabupaten Bantul. Selanjutnya diperoleh hasil kesesuaian terhadap RTRWK sebesar 41,8%. Klasifikasi kesesuaian lahan untuk padi terbagi menjadi 2 klasifikasi yaitu sesuai dan cukup sesuai dan sebagian besar wilayahnya masuk kategori cukup sesuai dengan nilai sebesar 72,06% namun setelah dilakukan analisis kesesuaian terhadap RTRWK yang termasuk dalam kategori sesuai sekitar 44,5% dari total luas Kabupaten Bantul.

Dari kesimpulan tersebut, kiranya dapat dirumuskan beberapa saran. Sebaiknya menggunakan eksplorasi analisis kesesuaian lahan permukiman dan kesesuaian lahan pertanian seperti matching agar dapat membandingkan hasil analisis serta meningkatkan akurasi dalam penelitian. Menambahkan

data primer lainnya dalam proses analisis untuk menghasilkan output yang lebih sesuai dengan kondisi eksisting di lokasi kajian.

## Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, (2023). Kabupaten Bantul Dalam Angka Tahun 2024. Bantul : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, (2024). Kabupaten Bantul Dalam Angka Tahun 2024. Bantul : Badan Pusat Statistik.
- Bakosurtanal. (2010). *Pedoman Teknis Analisis Data Spasial*. Cibinong: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.
- Dale, V. H., & Polasky, S. (2007). *Measures of the effects of land-use change on ecosystem services*. *Ecological Economics*, 64(2), 294–302. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2007.05.013>
- Djaenudin, D., H., M., H., S., & Hidayat, A. (2011). Petunjuk teknis evaluasi lahan untuk komoditas pertanian. Balai Besar Pertanian Dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, Badan Penelitian Pengembangan Pertanian, Bogor.
- Dudal, R. 1976. *Inventory of the major soils of the world with special reference to mineral stress hazards*. Rome: FAO.
- FAO.(2007). Food and Agriculture Organization (FAO) Climate Change and Food Security: a framework document. FAO.Rome
- Hardjowigeno, S. dan Widiyama. (2007). Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tataguna Lahan. Universitas Gadjah Mada Press. Yogyakarta. 352 hal.
- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020). Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten Bantul. Yogyakarta. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.
- Khadiyanto, Parfi. (2005). Tata Ruang Berbasis Pada Kesesuaian Lahan. Universitas Diponegoro. Semarang
- Kodoatie, R., (2013). Rekeyasa dan Banjir Kota. Penerbit ANDI. Yogyakarta
- Landon, J. R. (1991). *Booker Tropical Soil Manual: A handbook for soil survey and agricultural land evaluation in the tropics and subtropics*. Essex: Longman Scientific & Technical.
- Maru dkk (2015). Perubahan Penggunaan Lahan Kota Makassar Tahun 1990-2010. Jurnal Sainsmat, Vol 4, No 2 September 2015.
- McHarg, I. L. (1969). *Design With Nature*. Garden City. New York: Doubleday/Natural History Press.

- Mega, I.M., Dibia, I.N., Ratna, I.G.P dan Kusmiyarti, T.B. (2010). Klasifikasi Tanah dan Kesesuaian Lahan. Fakultas Pertanian, Universitas Udayana, Denpasar. hlm 145.
- Morgan, R. P. C. (2005). *Soil Erosion and Conservation* (3rd ed.). Oxford: Blackwell Publishing
- Nursa'ban, M.,(2006). Pengendalian Erosi Tanah Sebagai Upaya Melestarikan Kemampuan Lingkungan. Jurnal Geomedia.
- Prahasta, Eddy, (2001). Konsep-Konsep Dasar SIG. Bandung. Penerbit Informatika.
- Sarief, S.E. (1986). Ilmu Tanah Pertanian. Pustaka Buana. Bandung
- Sys, C., van Ranst, E., & Debaveye, J. (1991). *Land Evaluation: Part I. Principles in land evaluation and crop production calculations*. Brussels: General Administration for Development Cooperation.
- Zdruli, P., Pagliai, M., Kapur, S., & Faz Cano, A. (Eds.). (2010). Land Degradation and Desertification: Assessment, Mitigation and Remediation. Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/978-90-481-8657-0>
- Wirosoedarmo.Ruslan,dkk (2011). Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Jagung Menggunakan Metode Analisis Spasial. Agritech Vol. 31 No. 1, Februari 2011.

